

CARA

Edisi Juni 2025

PANDANG

Inspirasi Terkini!

SEMESTER PERTAMA PEMERINTAHAN PRABOWO



**PARTISIPASI SEMESTA
WUJUDKAN PENDIDIKAN
BERMUTU UNTUK SEMUA**

**PARPOL ANTRI
TIKET CAWAPRES
DI PILPRES 2029**

**MELIHAT INDONESIA
DARI KACAMATA
PEREMPUAN**

LOISJEANS.ID

DISCOUNT 

UP TO 70%

YEAR

END

Sale



DAFTAR ISI

TAJUK

**MENATAP MASA DEPAN:
PELUANG DAN TANTANGAN** 5

LAPORAN KHUSUS

**KERJA POLITIK JOKOWI UNTUK
SIAPA?** 14

**TPPO DAN RIBUAN WARGA
INDONESIA YANG MENJADI
KORBAN** 20

NASIONAL - PENDIDIKAN

**MAKAN BERGIZI GRATIS
SEHATKAN ANAK, SAKITI
INDONESIA** 24

**RAPOR PENDIDIKAN
KOMITMEN WUJUDKAN
PENDIDIKAN BERMUTU
UNTUK SEMUA** 31

**TEKS PIDATO MENDIKDASMEN
HARI PENDIDIKAN NASIONAL
2025** 37

**MAKNA LOGO HARI
PENDIDIKAN NASIONAL 2025** 39

**UPACARA HARDIKNAS 2025
SEMANGAT KEBERSAMAAN
DALAM KEBERAGAMAN** 41

**PELUNCURAN PROGRAM
HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)** 44

**JALAN SEHAT HARDIKNAS 2025,
WADAH KOMUNIKASI EFEKTIF
INSAN PENDIDIKAN GALANG
KOLABORASI** 46

**MALAM TASYAKURAN
HARDIKNAS 2025:
APRESIASI BAGI PENGGERAK
PENDIDIKAN INDONESIA** 48

**KONSOLIDASI NASIONAL
PENDIDIKAN 2025:
MENATA MASA DEPAN
PENDIDIKAN YANG INKLUSIF
DAN BERKEADILAN** 50

**PAMERAN KONSOLIDASI
NASIONAL PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH 2025** 57

**DELAPAN REKOMENDASI
HASIL KONSOLNAS
DIKDASMEN 2025** 58



LAPORAN UTAMA

**ELEKTABILITAS MELEJIT TAPI
“DISERBU” DEMO BERTUBI-TUBI** 6

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik sejak 20 Oktober 2024. 100 Hari melelahkan telah di lewati meskipun tidak ada target khusus yang ditetapkan. Hingga saat ini, terhitung hampir 5 bulan Prabowo-Gibran memimpin Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

NASIONAL - HUKUM

**KORUPSI PERTAMINA,
DUGAAN PENGOPLOSAN
MINYAK OLEH “ORANG-
ORANG SENANG”** 60

**SUARA GERAKAN ADILI
JOKOWI MENGGEMA** 65

NASIONAL - POLITIK

**PARPOL ANTRI TIKET
CAWAPRES DI PILPRES
2029** 69

**JOKOWI DAN PRABOWO
SULIT DIPISAHKAN** 73

**INOVASI KEMENHUB
TINGKATKAN KUALITAS
LAYANAN** 77

INTERNASIONAL

**KEBANGKITAN INDUSTRI
ANIMASI TIONGKOK** 81

**DONALD TRUMP DAN
SEGALA KONTROVERSINYA** 83

**STRATEGI EKONOMI ATAU
BENCANA PERDAGANGAN?** 87

OLAHRAGA

**SELAMAT DATANG, PATRICK
KLUIVERT!** 91

OPINI

KORUPSI? SIAPA TAKUT! 95

FILM

**FILM ANIMASI “JUMBO”:
TONGGAK BARU INDUSTRI
ANIMASI INDONESIA** 99

HUMANIORA

**MELIHAT INDONESIA
DARI KACAMATA
PEREMPUAN** 101

**PERTUKARAN SANDERA
HAMAS DAN ISRAEL TAK
KUNJUNG SELESAI** 110

**GEN BETA, GENERASI
TERBARU RAS MANUSIA** 113

Reformasi Sektor Energi dan Solusi Jangka Panjang

Sebagai warga negara Indonesia, saya melihat pemerintahan Prabowo memiliki kesempatan besar untuk melakukan reformasi sektor energi. Langkah yang perlu diambil adalah membenahi struktur pengelolaan energi nasional, mendorong diversifikasi sumber energi, dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan.

Salah satu kebijakan yang dinanti adalah bagaimana menyeimbangkan antara keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan energi nasional. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan geothermal yang dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memperbaiki ketahanan energi nasional.

Pada sektor hulu, upaya untuk memperbaiki manajemen sumber daya alam dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara sangat penting.

Jika ini dapat dilakukan dengan baik, maka kerugian yang selama ini terjadi pada sektor energi dapat diminimalisasi.

Di semester kedua, masyarakat berharap pemerintah Prabowo dapat menjaga stabilitas politik dan meningkatkan keadilan sosial. Sebagai pemimpin, Prabowo perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, upaya untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi harus tetap seimbang dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, mengingat isu-isu perubahan iklim yang semakin mendesak. Dalam hal ini, transisi energi yang adil dan inklusif menjadi kunci untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.

Ujang Asep Ridwan
Kota Cianjur



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Faozan Amar, S.Ag, M.M., Jalu Dwi Putranto S.IP

Pemimpin Umum: Zulfikar Rachman **Ombudsman:** Mahmud Marhaba (Ahli Pers Dewan Pers) **Direktur:** Michael Malik

Pimpinan Redaksi dan Penanggung Jawab: Habibi **Wakil Pimred:** Amir Fiqi, Mujamin Jassin **Koordinator Daerah:** Nafik Muthohirin (Jawa Timur), Wiwin Alfianti (Riau), Hamid Toliu (Gorontalo), Linda Sari (Sumatera Barat) **Redaktur Pelaksana:** Amir Fiqi, Edo Soeryadi **Redaktur:** Rais Syauqi, Jirga R. Azka, Amira Izzati, Wiwin Alfianti, Zoel Rachman, Haedar Zafran **IT Support:** Zulfikar Iskandar, Dede Hidayatullah **Kreatif:** Robby Firmansyah, Hengki **Media Sosial:** Obie **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayah

Alamat Redaksi Pusat

Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87 Kota Bekasi 17147 Telp: (021) 82760392 dan (021) 21383521
Email: redaksi@carapandang.com

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi



Menatap Masa Depan: Peluang dan Tantangan

Semester pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memang penuh tantangan, namun juga menawarkan harapan besar bagi masa depan Indonesia. Fokus pada penguatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi memberikan sinyal bahwa pemerintah ini serius untuk menciptakan perubahan yang signifikan di berbagai sektor.

Namun, perjalanan masih panjang dan penuh dinamika. Pemerintah perlu mengatasi sejumlah tantangan, mulai dari meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menyelesaikan ketimpangan

sosial, hingga menjaga stabilitas politik. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik.

Dengan semangat dan komitmen yang kuat, pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi untuk membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik, meskipun tantangan besar masih harus dihadapi. Selama kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan dengan tepat, dan dukungan masyarakat terus mengalir, Indonesia memiliki peluang untuk menatap masa depan yang cerah.



SEMESTER PERTAMA PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN ELEKTABILITAS MELEJIT TAPI “DISERBU” DEMO BERTUBI-TUBI

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik sejak 20 Oktober 2024. 100 Hari melelahkan telah di lewati meskipun tidak ada target khusus yang ditetapkan. Hingga saat ini, terhitung hampir 5 bulan

Prabowo-Gibran memimpin Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Sejak hari pertama menjabat, berbagai manuver dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai persiapan awal pembentukan pondasi pemerintahannya menghadapi 100



hari pertama. Alih-alih mendapatkan simpati, keputusan demi keputusan yang diambil oleh Prabowo mendapatkan “nyinyiran” dari masyarakat Indonesia.

Hal yang paling awal disorot adalah gemuknya kabinet yang dibentuk Prabowo-Gibran. Dari politikus yang merupakan koalisi, kalangan artis, hingga lawan “tanding” dalam Pilpres beberapa waktu lalu mendapatkan jabatan dalam Kabinet Merah Putih besutan Prabowo-Gibran.

Kabinet Merah Putih memiliki 48 menteri dimana 7-nya merupakan menteri koordinasi (menko), 56 wakil menteri, 5 pejabat setingkat menteri.

Jumlah tersebut belum termasuk penasihat khusus, staf khusus dan utusan khusus.

Terkait gemuknya kabinet tersebut, Prabowo membela diri dengan menegaskan bahwa pemerintahannya tersebut diisi oleh orang-orang hebat.

“Ada yang mengatakan kabinet kita gemuk, banyak. Tapi kalau banyak orang hebat, kenapa? Kan yang menikmati rakyat Indonesia,” tutur Prabowo dalam penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Hotel Rit-Carlton, Februari lalu.

Prabowo mengatakan kabinet gemuk tersebut dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang kuat.

Indonesia, kata dia, bercita-cita akan besar, maka dari itu membutuhkan kabinet yang besar.

Pembentukan kabinet gemuk tersebut memang telah sesuai dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UU yang disetujui DPR RI dan di tandatangai oleh Presiden Jokowi lima hari sebelum masa habis masa jabatannya tersebut akhirnya memberikan keleluasan kepada Prabowo untuk “memonopoli” jumlah menteri di kabinetnya.

Meskipun demikian, masyarakat bukan memandang gemuknya kabinet sebagai suatu permasalahan. Akan tetapi, jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk menggaji semua menteri hingga utusan khusus tersebut yang menjadi sorotan.

Apabila dipandang dari segi anggaran dan fiskal, penggemukan kabinet berimbas pada meningkatnya jumlah anggaran negara untuk membiayai gaji para menteri yang ada. Mulai dari mobil dinas hingga uang pensiun bagi menteri dan wakil menteri yang menjabat tersebut tentunya memberikan dampak yang signifikan pada anggaran.

Mengutip CNBC Indonesia, para peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), mereka memperkirakan potensi jumlah pembengkakan anggaran negara menjadi Rp. 1,95 triliun untuk 5 tahun kedepan yang diakibatkan adanya koalisi kabinet gemuk milik Prabowo-Gibran tersebut.

Jumlah ini jika dibandingkan dengan anggaran kementerian Presiden Jokowi yang berjumlah Rp. 777 miliar dari sebelumnya hanya Rp. 387,6 miliar pertahun.

Jika dikalkulasikan, ada

peningkatan sebesar Rp. 389,4 miliar pertahun dari kabinet era Jokowi dengan era Presiden Prabowo-Gibran.

100 Hari Pertama Prabowo-Gibran

Memasuki 100 hari pertama Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam melakukan transformasi nasional. Berbagai program dan kebijakan strategis diklaim telah digulirkan sebagai langkah nyata dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil dan sejahtera.

Fokus utama Pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik, mendukung peningkatan kapasitas guru, serta memastikan kesejahteraan mereka demi menciptakan generasi muda yang unggul dan siap bersaing.

Selain itu, yang paling luar biasa dan perkembangannya sangat signifikan adalah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini memang menjadi salah satu fokus Prabowo sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Dengan pendekatan tegas dan sistem transparan, pemerintah berusaha memperkuat integritas birokrasi dan lembaga negara agar dapat bekerja lebih efisien dalam melayani masyarakat.

Program unggulan yang berhasil memikat rakyat Indonesia hingga kemenangan Prabowo-Gibran diperoleh adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang berjalan.

Hendry Noor



Tujuan dari program ini tidak lain adalah untuk pengentasan stunting, memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan nutrisi yang cukup guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan menuju Generasi Emas 2045.

Program ini menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan

kualitas hidup masyarakat sejak usia dini.

100 Hari Prabowo Minim Kejelasan Perencanaan dan Eksekusi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Hendry Noor, mengutip dari laman website resmi UGM, menyoroti lemahnya sistem *check and balance* di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hendry melihat, gemuknya kabinet



Prabowo-Gibran serta koalisi yang juga gemuk di parlemen berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

“Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, hubungan eksekutif-legislatif saat ini cenderung bersifat *partnership*,” tutur Hendry mengutip di laman website UGM.

Sementara itu, rekan Hensdry, Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menilai bahwa janji-janji dalam Asta Cita Prabowo-Gibran masih belum terealisasi secara kongkret.

Mada mengatakan, mulai dari MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul, masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi.

“Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” kata Mada mengutip dari laman website UGM.

Mada pun menyebutkan bahwa

pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih menari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Konstelasi hubungan antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi dengan jejaring ekonomi-politik masa lalu dan baru saling bernegosiasi untuk menentukan dominasi dalam kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Ekonom UGM, Yudistira Hendra Permana membahas tentang kebijakan penghapusan utang UMKM, petani dan nelayan. Dia menganggap kebijakan tersebut sebagai langkah desperatif daripada solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian.

“Apakah ini langkah untuk merangsang pemulihan ekonomi atau malah ternyata pemerintah telah kehabisan opsi?” tutur Yudistira.

Dalam 100 hari memimpin, pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan banyak kritik hampir di semua bidang. Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) salah satu menjadi hal yang krusial. Selain itu,

permasalahan lingkungan, ekonomi, demokrasi, politik luar negeri, hingga program MBG dan efisiensi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo.

Berbagai kebijakan pemerintah dinilai merupakan warisan dari Presiden Joko Widodo, dimana lebih menguntungkan oligarki namun merugikan rakyat dan lingkungan.

Sebagai contoh adalah rencana pemerintah mengalihfungsikan 20 juta hektar hutan untuk swasembada pangan dan energi memicu kekhawatiran terhadap komitmen iklim dan biodiversitas Indonesia.

Alihfungsi lahan ini mengancam lingkungan, mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati, serta merugikan masyarakat lokal yang menggantungkan hidup mereka pada hasil hutan.

Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak dengan tegas mengatakan gagasan kedaulatan pangan yang di canangkan Prabowo tersebut hanyalah sebuah ilusi.

“Emisi karbon jelas terjadi saat pembukaan lahan, termasuk memicu kebakaran dan kabut asap, terutama di lahan gambut. Menyamakan perkebunan kelapa sawit dengan keanekaragaman hutan Indonesia yang kaya adalah kekeliruan besar,” tegas Leonard.

Kontroversi menyulap 20 juta lahan tersebut ternyata tidak sampai disitu saja. Prabowo juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres ini dikatakan Leonard bermasalah



**Yudistira
Hendra
Permana**

karena sarat dengan pendekatan militerisme, yang terlihat jelas dari penunjukan Menteri Pertahanan dan TNI sebagai pengurus untuk menertibkan kawasan hutan.

“Militerisme atas nama penertiban kawasan hutan ini berpotensi menambah daftar panjang tindakan refresif negara terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal yang selama ini hidup dan beraktivitas di sekitar hutan. Contohnya terjadi di pusaran proyek *food and energy estate* Merauke, Papua Selatan,” kata Leonard.

“Dengan struktur satgas yang problematik, kita patut mempertanyakan komitmen dan transparansi pemerintah untuk menertibkan dan melindungi kawasan hutan,” tambahnya.

Elektabilitas Melejit

Banyaknya komentar miring tentang 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran ternyata tidak berpengaruh pada kepuasan publik terhadap kinerja Presiden terpilih. Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil survei yang berbanding terbalik dengan apa yang di suarkan oleh para pakar terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bagaimana tidak, hasil survei 100 hari kerja Prabowo-Gibran tercatat mendapatkan 80,9 persen kepuasan publik dan dari IPI 79,3 persen meski hanya menggunakan pendapat 1.000 responden dari 38 provinsi.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretaris Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa Pemerintah menyambut baik hasil survei



Leonard Simanjuntak



tersebut. Dia mengatakan, hasil survei tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional.

“Hasil survei ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah untuk terus bekerja cerdas dan lebih keras, konsisten, serta inovatif dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Yusuf menegaskan, kedati hasil survei terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran melejit, namun pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak akan terlena dengan apa yang telah didapatkan tersebut.

Rapor Merah dari Celios

Meski beberapa lembaga survei memperoleh hasil yang memuaskan, berbeda pula dengan Center of Economic and Law Studies (Celios) yang malah memberikan rapor merah untuk hasil

kerja 100 hari Prabowo-Gibran.

Celios memberikan nilai 5 dari 10 untuk kinerja Presiden Prabowo dan memberikan nilai 3 dari 10 untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Celios menggunakan survei berbasis expert judgment. Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah.

Menurut survei Celios, kinerja Presiden Prabowo selama 100 hari pertama apabila dirata-rata hanya mendapatkan nilai 5.

Sementara itu, lembaga survei lain, Amnesty International Indonesia menilai kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung mengkhawatirkan.

Amnesti Internatioanl memberikan kartu kuning kepada pemerintah, dalam hal ini Prabowo-Gibran. Pasalnya, mereka mencatat selama periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025, kinerja Prabowo-Gibran justru diwarnai berbagai pelanggaran HAM yang dibenarkan oleh kebijakan, keputusan, dan komentar pejabat publik.

Menurut Amnesty International, kemunduran HAM di 1–hari pemerintahan Prabowo-Gibran tidak sulit untuk dilacak karena terjadi di berbagai aspek.

Aksi Protes Mahasiswa Warnai 1 Semester Pemerintahan Prabowo-Gibran

Presiden Prabowo melakukan langkah besar saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan. Efisiensi besar-besaran diumumkan oleh presiden guna menopang anggaran untuk program tersebut serta Danantara yang pun telah di resmikan oleh Presiden Prabowo bersama Mantan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini.

Tidak main-main, Prabowo menargetkan efisiensi sebanyak Rp. 750 Triliun untuk menambah modal kedua programnya tersebut.

Pemerintah mengklaim bahwa efisiensi tersebut lebih bermanfaat dibandingkan dengan belanja operasi serta kegiatan seremonial.

Kendati demikian, klaim dari Pemerintah tersebut tidak dapat di terima oleh masyarakat. Berbagai aksi penolakan dilakukan kalangan masyarakat dan mahasiswa.

Ribuan mahasiswa serta aksi kamisan masyarakat di berbagai daerah mengkritik efisiensi dan program MBG yang di canangkan oleh Presiden Prabowo.

Aksi “Indonesia Gelap” yang dilakukan di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Februari 2025 lalu mengkritik langkah yang di ambil oleh Prabowo, khususnya untuk bidang pendidikan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna menilai efisiensi



anggaran pendidikan kurang tepat. Pasalnya, efisiensi itu akan berdampak pada 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang disinyalir akan putus kuliah karena keadaan ekonomi.

“Ini tentunya bisa mencekik teman-teman mahasiswa. Belum lagi KIP tahun 2025 yang tengah berjalan ini terancam tak dilanjutkan, kami pikir ini tidak tepat,” tutur Iqbal kepada awak media.

MBG turut menjadi perhatian mahasiswa dalam aksi tersebut. Bagaimana tidak, MBG berdampak serius pada sektor anggaran. Mahasiswa menilai, banyak anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk

pendidikan dan kesehatan malah menjadi faktor pendukung program MBG tersebut.

Sementara itu, aksi Kamisan ke-31 yang di gelar di Patung Catur Muka, Denpasar, Bali pun mengkritik hal yang sama. Salah satu orator mengungkit tentang kemiskinan.

“Lingkaran setan kemiskinan struktural terus berputar tidak ada ujungnya,” tuturnya.

Humas Aksi Kamisan tersebut, Tomy Priatna berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan efisiensi dan program MBG.

Selanjutnya, aksi Jogja memanggil yang juga menyoroti program MBG yang dinilai didasari ambisi semata.

Gebrakan 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming memasuki 100 hari masa kerja semenjak dilantik pada 20 Oktober 2024. Selama itu, Prabowo-Gibran melakukan gebrakan melalui sejumlah kebijakan maupun program berikut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen



Dimulai

1 Januari 2025

Deskripsi:

PPN 12% hanya ditujukan untuk barang dan jasa mewah. Sementara kebutuhan pokok, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa angkutan umum dan rumah sederhana tidak kena PPN.

Diskon tarif listrik 50 persen



Diskon tarif listrik bagi seluruh pelanggan dengan daya maksimal 2200 VA untuk melindungi daya beli masyarakat.

Periode

Januari hingga
Februari 2025

Makan Bergizi Gratis



Dimulai

5 Januari 2025

Penyediaan makananan bergizi bagi kelompok rentan, yakni balita, santri, siswa (PAUD, TK, SD, SMP, SMA), serta ibu hamil dan menyusui dengan target 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Indonesia menjadi anggota penuh BRICS



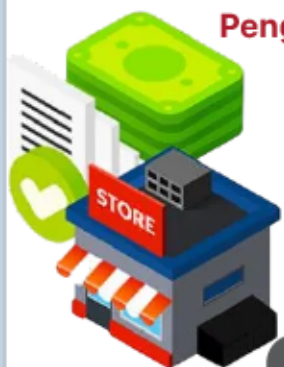
Merupakan forum kerja sama bagi sejumlah negara berkembang.

Dimulai

6 Januari 2025



Penghapusan utang macet UMKM



1 juta nasabah pengusaha UMKM mendapatkan fasilitas penghapusan piutang.

Dimulai

Pekan kedua Januari
2025 hingga April 2025.

Pengoperasian 37 proyek infrastruktur ketenagalistrikan

Proyek ketenagalistrikan yang tersebar di sejumlah provinsi dengan total kapasitas 3,2 GW untuk melistriki rumah maupun industri.



Peresmian

21 Januari 2025

“Kita yang penting niat kerja keras, dan saya sangat bangga kepada tim dan kabinet saya bekerja dengan sangat kompak.”



Presiden
Prabowo Subianto

Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Kabinet Merah Putih selama 100 hari masa kerja, Senin (27/1), sebagai berikut.



Alasan kepuasan

Di antaranya:

Tegas, berwibawa, berani, bijaksana **18,9**

Pemberantasan korupsi berjalan baik **17,4**

Berkinerja bagus, terbukti **12,8**

Banyak program kerja mulai terealisasi **9,2**

Sering memberi bantuan **5,9**

Program Makan Bergizi Gratis **5,7**

Membawa perubahan **3,5**

Perhatian kepada rakyat, merakyat **3,7**

Ramah, baik, sopan **1,8**

Cepat dalam bekerja **1,4**

Tingkat kepuasan

Data Indikator Politik Indonesia, 27 Januari 2024

Angka dalam persen



Seputar Survei

- Menggunakan sampel acak, melibatkan 1.220 orang responden, terdiri dari 49,9% laki-laki dan 50,1% perempuan.
- Responden berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan melalui wawancara tatap muka.
- Survei dilakukan pada 16-21 Januari 2025.

“Presiden dan juga Kabinet Merah Putih menyatakan apresiasi terhadap masyarakat. Walaupun hasilnya baik, ini peringatan karena di dalamnya terdapat harapan publik yang tinggi.”

Philips Jusario Vermonte
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan





KERJA POLITIK JOKOWI UNTUK SIAPA?

Joko Widodo alias Jokowi terus melakukan kerja-kerja politik. Meskipun telah berhasil membangun dinasti dengan menghantarkan putra pertamanya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, namun kerja politik terus dilakukan. Kerja politik Jokowi sebenarnya untuk siapa?

Pasca mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, Jokowi tidak henti-hentinya melakukan kerja-kerja politik. Apa yang dilakukan Jokowi seakan-akan membantah pernyataannya sendiri, bahwa dirinya akan istirahat di Solo

setelah menyelesaikan amanahnya sebagai presiden selama 10 tahun.

Kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Jokowi yang terbaca oleh publik adalah bagaimana dia memastikan orang-orang kepercayaannya menang dalam kontestasi pemilihan kepala

atau Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Misalnya Pilkada di Provinsi Jawa Tengah, Jokowi bekerja keras memastikan pasangan Ahmad Lutfi-Taj Yasin menang. Bahkan, publik menilai bahwa Pilkada Jateng sebagai daerah pertarungan antara PDI Perjuangan (Megawati) dengan Mantan Presiden Jokowi.

Penilaian tersebut wajar, pasalnya pasca reformasi Jawa Tengah merupakan basis kekuatan dari PDI



Perjuangan. Bahkan Jateng mendapat julukan sebagai kandang banteng. Sebab, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini tidak pernah kalah di setiap pemilihan kepala daerah.

Untuk menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh yang kuat di Jawa Tengah Jokowi habis-habisan berjuang untuk memenangkan pasangan Ahmad Lutfi-Taj Yasin. Bahkan dia langsung turun gunung dengan ikut berkampanye menarik dukungan masyarakat Jawa Tengah. Jokowi juga turut berkeliling di sejumlah kota di Jawa Tengah. Tidak hanya di Jakarta, Jokowi juga turun gunung di Pilkada DKI Jakarta untuk memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.

Namun, pengaruh Jokowi hanya berpengaruh di Jawa Tengah dengan berhasil menghantarkan kemenangan bagi pasangan Ahmad Lutfi-Taj Yasin. Sedangkan pengaruh Jokowi di DKI Jakarta meredup dengan kegagalan pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Bahkan kealahannya diluar prediksi, Pilkada di DKI Jakarta berlangsung satu putaran yang dimenangkan pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno.

Tidak hanya Pilkada di Jawa Tengah dan DKI Jakarta, Jokowi juga turut memiliki peran di Pilkada sejumlah daerah. Peran yang dilakukan dengan meng *endorse* dengan konsep “open jastip” atas jasa titip dukungan bagi calon kepala daerah.

Dalam sebuah video yang viral di media sosial, sejumlah calon kepala daerah dari berbagai kota dan kabupaten seperti Tegal, Kediri, Kupang, Lamongan, hingga Pringsewu terlihat berbondong-bondong mengunjungi kediamana Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Mereka berharap mendapatkan dukungan dari Jokowi untuk memenangkan pemilihan tersebut.

Menanggapi fenomena “Open Jastip” Jokowi, analisis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic menilai apa yang dilakukan Jokowi sebagai kerja politik. Menurutnya, Presiden ke-7 ini sedang mengambil risiko dalam politik Indonesia. Jokowi sedang menunjukkan eksistensinya serta menguji apakah pengaruhnya masih kuat meskipun sudah pensiun.

Merawat Eksistensi

Jokowi adalah politisi yang akrab dengan pencitraan. Masuknya Jokowi

ke level politik nasional hingga menjadi presiden dua periode tidak lepas dari itu, mulai dari blusukan, mobil Esemka hingga masuk gorong-gorong.

Untuk merawat eksistensinya setelah pensiun dari jabatannya sebagai presiden, Jokowi pun terlihat masih sibuk membangun pencitraan. Misalnya dia berkunjung ke Bank Sampah Banjarnegara di Desa Kasilib, Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah pada Senin 6 Januari 2025. Bahkan kunjungannya menjadi polemik karena diperlakukan istimewa, seperti kedatangan presiden dengan pengawalan yang super ketat oleh polisi.

Selain itu, untuk membangun kedekatan dengan masyarakat Jokowi mencitraan diri sebagai sosok pemimpin yang masih dicintai rakyat, sebagai bukti setelah lengser sebagai presiden banyak warga yang ingin bertemu dengan dirinya. Bahkan dalam unggahan video di media sosial terlihat para pengunjung rela antri hanya untuk bertemu dan bersalaman dengan Jokowi.

Salah satu video yang dibagikan ulang oleh akun X @PartaiSocmed pada 29 Januari 2025, sejumlah pengunjung bahkan membawa payung



untuk menghindari terik Matahari.

“De-Jokowisasi dilakukan secara masif oleh PDIP seperti de-Soekarnoisasi dilakukan oleh Orde Baru terhadap Bung Karno. Tapi karena itu rakyat justru memperlihatkan simpati pada Jokowi dan antipasti terhadap PDIP,” cuit pemilik akun tersebut.

Namun, menurut salah satu warganet, kunjungan masyarakat ke rumah Jokowi hanyalah settingan atau telah diatur. Menurut pengakuan netizen dengan akun X @ZeroPnumbra pada 31 Januari 2025, pemilik akun mengaku melihat setidaknya tiga bus yang dikoordinir untuk mengangkut orang ke kediaman Jokowi.

“Semua itu settingan doang. Nih gue kemarin siang lewat depan rumah di Mulyono yang pengidap NPD akut itu ada 3 bus yang dikoordinir untuk angkut orang-orang yang disuruh datang ke rumah dia,” tulis pemilik akun sembari mengutip cuitan.

Unggahan yang disukai sebanyak lebih dari 1.900 kali tersebut kemudian menuai beragam tanggapan dari

pengguna X lainnya. Sejumlah netizen pun memiliki pendapat serupa dan menduga jika kunjungan warga ke rumah Jokowi telah diatur. “Bener bang, kata kawan bokap gua, pas dia tour rombongan ke Solo, ke Masjid Zayed, terus ada yang arahin ke tempat Mulyono. Dan di sana dikasih bingkisan katanya,” komentar @dino*****

“Pakai logika aja, ngapain orang pada datang cuma 5-10 menit terus balik lagi. Mau ngambil karomahnya gitu... wkwkw kalau orang ziarah aja sampai berjam-jam,” tambah @sute**

Waktu masih jadi presiden aja massa digerakkan, apalagi sudah jadi mantan. Untuk sekadar dapat dukungan di medsos aja pakai buzzer, apalagi di lapangan,” timpal @anak_***

“Nggak jauh dari perkiraan gue, hanya pencitraan dan orang-orang desa disuruh datang biar dibilang masih banyak yang ngefans,” sahut @bung*****

“Ini kayaknya strategi bapaknya fufufafa dan kroni-kroninya untuk terus-terusan menarik simpati masyarakat yang sudah dimiskinkan,”

ujar @semi*****

KERJA politik Jokowi untuk siapa?

Kekuasaan adalah candu, sehingga banyak dari pemimpin yang berani menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya.

Jokowi diduga melakukan hal itu. Seperti yang sudah jamak diketahui publik Jokowi berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, mulai dengan mengkondisikan menunda pelaksanaan pemilu 2024 hingga meminta penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Tapi, semua upaya yang dilakukan gagal.

Untuk melanggengkan kekuasaannya, Jokowi diduga memiliki peran penting dalam meloloskan putra pertamanya Gibran Rakabuming Raka sehingga bisa memenuhi syarat sebagai Capres/Cawapres pada Pilpres 2024, yakni dengan melakukan intervensi kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Alhasil Gibran akhirnya lolos dan terpilih menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Prabowo Subianto.

Modus yang sama juga dilakukan untuk meloloskan Kaesang Pangarep agar bisa mengikuti kontestasi Pilkada. Namun, upaya tersebut gagal karena terganjal putusan MK terkait syarat batas usia calon kepala daerah. Padahal, sebelumnya Ketua Umum PSI ini dikabarkan akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ahmad Lutfi dan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju plus atau KIM plus.

Dalam membangun dinasti politik Jokowi terbilang berhasil, karena dalam waktu yang sangat singkat dia berhasil menghantarkan anaknya sebagai Wakil Presiden RI. Selain itu Jokowi dengan kekuasaannya menjadikan menantunya, Boby Nasution sebagai

wali kota Medan dan pada kontestasi Pilkada 2024 dia berhasil menduduki kursi nomor satu di Sumatera Utara sebagai gubernur.

Sehingga sangat wajar, publik menilai Jokowi melakukan kerja-kerja politik hanya untuk mempertahankan kekuasaan untuk keluarga yakni membangun politik dinasti. Dan bisa jadi upaya Jokowi membayangkan Presiden Prabowo memiliki agenda tersendiri.

Publik menduga, intervensi Jokowi di pemerintahan Prabowo ada dua agenda yakni mencari perlindungan akan kasus-kasus besar yang menjeratnya, dan agenda untuk menghantarkan anak pertamanya menduduki kursi nomor satu di republik, yakni menjadi Presiden ke-9.

Pencitraan Gibran tuai kritik

Setelah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, Gibran langsung tancap gas. Dia membangun pencitraan membangun image sebagai pemimpin pemimpin muda yang siap bekerja untuk rakyat.

Hal itu ditunjukkan, satu hari hari dilantik Gibran langsung bekerja dengan meninjau proyek Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase 2 di Jakarta Pusat pada Senin 21 Oktober 2024. Selain itu, pencitraan yang dibangun adalah dengan membagi-bagi susu untuk anak-anak dan memberikan bantuan sembako yang diberinama Bantuan Gibran.

Selain itu Gibran juga meluncurkan program layanan pusat pengaduan masyarakat bertajuk Laporan Masyarakat Wapres. Pos Pengaduan tersebut mulai dibuka pada Senin 10 November 2024 lalu. Layanan



tersebut dibuka Senin sampai Jumat. Melalui layanan ini masyarakat dapat mengajukan aduan secara langsung ke Sekretariat Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, jalan Kebon Sirih No.14 Jakarta Pusat atau menghubungi kontak WhatsApp di nomor 08117042207.

Aksi yang lain yang dilakukan Gibran adalah membagi-bagikan *skincare* saat meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 13 Jakarta, Kamis 20 Februari 2025. Alasan Gibran membagi *skincare* kepada anak-anak agar tidak berjerawat sehingga lebih nyaman saat beraktivitas.

Namun, aksi Gibran bagi-bagi *skincare* menuai kritik dari ahli gizi dr. Tanshot Yen menurutnya apa yang dilakukan Gibran tidak sesuai dengan tujuan sekolah. Menurutnya untuk merawat wajah agar bersih cukup mengajarkan anak hidup bersih.

“Ajarkan anak sekolah PHBS pola hidup bersih dan sehat. Cuci muka pake sabun, bukan cleasing lotion. Potong kuku pendek, bukan panjang-panjang sarang kuman. Jijik. Udah ya *gak* usah *endorse skincare*,” ujarnya di feed akunnya, Jumat 21 Februari 2025.

Sebagian warganet mendukung narasi itu. “Sepertinya tugas beliau rada mleset sih, sekelas wapres ngurusin *skincare* anak sekolah,” kata salah satu pengguna, sementara yang lain berkomentar, “Udah ya wapres gausa bagi-bagi *skincare* ke anak sekolah yang katanya biar ga jerawat. Makan sehat aja plis.”

Dosen Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin melihat aksi blusukan yang dilakukan Gibran tidak jauh berbeda dengan ayahnya yakni Jokowi. Dan inilah yang bisa dimainkan oleh Gibran dengan membangun kedekatan emosional dengan rakyat.

Ujang memandang tidak kemampuan Gibran untuk hadir di tengah-tengah kalangan akademisi seperti ceramah publik maupun



Ujang Komarudin



forum internasional, maka harus ditutupi dengan blusukan agar citranya terbangun dengan baik, yang pada ujungnya adalah bagaimana mendapatkan efek elektoral dari aksi blusukannya.

“Gibran gayanya ya seperti ayahnya blusukan. Memang kelebihannya di situ, Gibran mengkapitalisasinya dalam konteks menjalankan pemerintahan maupun membuat pencitraan.” kata Ujang, Rabu, 30 Oktober 2024.

Penilaian yang senada juga disampaikan oleh Koordinator Urban Poor Consortium (UPC) Gun Gun Muhammad bahwa apa yang dilakukan Gibran hanya semata-mata pencitraan untuk persiapan Pilpres 2029 nanti.

Dia mencontohkan misalnya program “Lapor Mas Wapres” yang digagas oleh Gibran hanyalah sebatas pencitraan dan politisasi. “Program ‘Lapor Mas Wapres’

itu menurut saya pencitraan saja, hanya politisasi. Kalau memang bener Gibran mau menyerap lebih banyak masalah masyarakat pengaduan lalu kemudian memang betul-betul ingin menyelesaikan harusnya cara bekerja adalah secara sistem,” ujar Gun Gun.

Menurutnya sebagai Wakil Presiden, Gibran seharusnya membangun sistem untuk mengetahui keluhan dari masyarakat. Bisa menggunakan birokrasi pemerintah daerah atau menggunakan birokrasi di kementerian.

“Dia pimpinan level nasional, seharusnya dia menggunakan birokrasi pemerintah daerah, menggunakan birokrasi kementerian untuk menyelesaikan itu, buka kanal-kanal sampai yang terdekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, aksi Gibran yang memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat korban banjir di Jakarta Timur juga menuai kritik

Adi Prayitno

yang pedas dari sejumlah kalangan. Seperti Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan bahwa bagi-bagi bansos bukan tugas wakil presiden, melainkan tugas dari menteri sosial. “Urusan bansos mestinya jadi urusan mensos, bukan urusan wapres,” tegas Adi pada Rabu, 4 Desember 2024.

Menurutnya Wapres memiliki tugas yang lebih besar daripada hanya menyalurkan bansos, misalnya mendatangkan investor ke Indonesia atau mengurus kelanjutan Ibu Kota Negara (IKN). “Wapres harus mengerjakan sesuatu yang besar. Mempercepat aparaturnegara pindah IKN yang merupakan warisan Jokowi, mendatangkan investor, bicara di forum-forum besar dengan gagasan besar, dan lain-lain,” ujarnya.

Adi menilai jika ini terus-terusan dilakukan oleh Gibran, maka dikhawatirkan Wapres akan mengambil alih tugas dari menteri sosial. “urusan teknis macam bansos itu urusan menteri. Agak lucu urusan teknis jadi urusan wapres juga. Kalau Cuma sesekali wapres ngasih bansos tak soal. Kalau terus terusan begitu mensos bisa banyak nganggur nanti,” ujarnya.

Peluang Gibran di Pilpres 2029

Kerja-kerja politik yang dibangun oleh Jokowi dibaca oleh publik adalah upaya menghantarkan putra pertamanya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden ke-9. Namun, apakah keberuntungan yang dialami oleh bapaknya akan terulang dialami oleh Gibran?

Dilihat dari sentimen publik pencitraan yang dilakukan Gibran justru bernada negatif. Gibran yang dipoles sebagai pemimpin muda yang akan memberikan warna dalam



politik nasional justru terbawa arus. Gibran tidak mampu hadir sebagai pemimpin yang memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan besar yang sedang dihadapi bangsa ini.

Seperti contoh dalam kasus pagar laut, Gibran tidak terdengar statmennya untuk permasalahan tersebut. Bahkan publik mencari-cari keberadaan Gibran.

Kasus terbaru soal pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Sritex juga menyeret nama Gibran. Pasalnya pada masa kampanye Gibran memberikan janji kepada pekerja di pabrik tersebut. Janji tersebut akhirnya menjadi bumerang untuk menyerang posisi dan pernonanya.

“Konteksnya bukan tentang siapapun presidennya. Yang dayang ke 8.000 pegawai Sritex dan u m b a r - umbar janji

Rocky Gerung

cuma dia doang,” tulis pengguna X. “Tanggung jawab lah,” sambungnya.

Sentimen negatif terhadap Gibran bisa berdampak pada elektabilitas Gibran untuk menuju Pilpres 2029. Ditambah lagi, Gibran bukanlah kader penting dari partai manapun sehingga peluang Gibran bisa semakin suram.

Keputusan Partai Gerindra mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2029 menjadi sinyal kuat bahwa peluang Gibran telah tertutup bagi Partai Gerindra. Untuk menjadi calon wakil presiden peluangnya juga terhalang oleh partai-partai yang terbagung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang telah menyatakan solid berjuang bersama Prabowo bahkan akan menghantarkan kesuksesan kembali pada Pilpres 2029.

Di antara partai-partai dalam barisan KIM pasti akan mengusung ketua umum atau kader terbaiknya untuk berdampingan dengan Prabowo. Sehingga mereka akan memperebutkan tiket sebagai calon wakil presiden. Sehingga akan sangat

sulit Gibran untuk mendapatkan tiket. Mengandalkan PSI itu tidak mungkin karena, partai yang diketuai oleh Kaesang Pangarep ini tidak mendapatkan kursi di DPR RI.

Melihat fenomena tersebut pengamat politik Rocky Gerung menduga langkah ini untuk membatasi ruang gerak Gibran Rakabuming Raka.

Roky membaca langkah Gerindra secara cepat mengusung kembali Prabowo di Pilpres 2029 adalah bagian strategi politik. Menurutnya, manuver dini Gerindra ibarat langkah bidak putih dalam permainan catur. Tujuannya menutup ruang bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tidak mudah melenggang sebagai Capres di 2029.

“Gerindra memainkan bidak putih duluan karena dikalkulasi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi soal presidential threshold 0 persen. Tanpa partai lain pun, Gerindra bisa melenggang sendiri di Pilpres 2029 dengan Prabowo sebagai calon,” ujar Rocky dalam kanal YouTube-nya, Jumat (14/2/2025).

Rocky menilai, keputusan ini mempersempit ruang Gibran untuk maju sebagai capres, kecuali ia mampu mencari partai lain yang bersedia mengusungnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS, Ahmad Heryawan menegaskan, PKS akan tetap berada dalam Koalisi Permanen untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir masa jabatan 2029. “Koalisi terikat dengan komitmen bersama. Kami akan berkoalisi sampai akhir,” ujarnya.

Apakah peluang Gibran masih terbuka di tengah partai politik yang setia berada di barisan Prabowo Subianto. Mampukah Jokowi terus mempertahankan dinasti politiknya?



TPPO DAN RIBUAN WARGA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN

Kasus tindak pidana perdagangan orang semakin marak terjadi. Tercatat, sejak tahun 2020 hingga tahun 2025 ada sebanyak 6.800 orang masyarakat Indonesia yang menjadi korban. Hingga Maret 2025, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat masih ada sebanyak 525 orang korban TPPO yang masih tertahan di Myanmar.

Praktik ilegal ini semakin marak

terjadi dengan korban yang rata-rata pengangguran. Di iming-imingi gaji tinggi, dan pekerjaan yang mumpuni, korban yang telah “putus” harapan menari gaji besar di Indonesia, membuat mereka tergiur untuk berangkat ke negara-negara yang notabene merupakan daerah konflik.

Myanmar dan Kamboja menjadi pelabuhan yang sangat ramai di datangi oleh para korban TPPO. Calo

di duga merupakan para pengusaha asal Indonesia yang membuka praktik *scam* dan judi *online* di Myanmar dan Kamboja.

Akses untuk mendapatkan korban memang terbuka lebar. Faktor yang sangat mencolok adalah tingginya angka pengangguran serta gaji yang pas-pasan. Peningkatan ekonomi menjadi alasan “polosnya” para korban berangkat ke negara-negara tujuan

mereka tersebut.

Hampir semua korban mengaku ditawari gaji tinggi untuk bekerja. Rata-rata pun telah memahami apa yang harus mereka lakukan setelah sampainya di tempat kerja tersebut. Akan tetapi, yang dibayangkan ternyata jauh dari apa yang terjadi.

Meskipun pekerjaan tidak jauh berbeda seperti yang dijanjikan, gaji pun sesuai dengan apa yang diharapkan, namun para korban TPPO ternyata ada juga yang mendapatkan penyiksaan saat bekerja.



Jadi Penipu Warga Sendiri

Sesampainya di Myanmar atau Kamboja, para korban TPPO ternyata bekerja sebagai penipu *scam* online. Alih-alih menjadi admin, mereka dipaksa sebagai marketing yang bertugas mendapatkan korban sebanyak-banyaknya.

Rerata, mereka yang menjadi korban scam tersebut adalah warga Indonesia serta Malaysia dan beberapa daerah lain di Asia.

Salah seorang korban inisial S, satu dari 17 warga Sulawesi Utara (Sulut) yang lari dari perusahaan tempat dia bekerja mengungkapkan, tugas mereka melakukan penipuan di media sosial.

“Kita dipaksa untuk menipu masyarakat di Facebook maupun Instagram dengan cara menawarkan investasi kripto dan tanam saham,” terang S.

Kegiatan para penipu ini marak disebut sebagai Ponzi. Dimana, mereka membuat aplikasi bodong tentang investasi, lalu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebagai deposito dan mereka mendapatkan tugas.

“Tugas yang ada biasanya nonton iklan, nonton video film, dari situ



mereka dapat uang masuk. Tapi setelah mereka terlena, aplikasi kami hentikan, sehingga uang mereka terperangkap di perusahaan,” terangnya.

Ia menuturkan, mereka para korban ini membuat sebanyak mungkin akun dan menyamar sebagai wanita cantik untuk memikat para korban.

Langkah awal mereka akan membuat para korban nyaman dan ujung-ujungnya meminta nomor WhatsApp.

Mereka melakukan pendekatan khusus dan menunjukkan bahwa kita juga berhasil dengan investasi kripto dan tanam saham.

“Setelah lanjut, buat pendekatan khusus sampai betul-betul para korban percaya dan saat itu mereka tertipu,” ungkapnya.

Kata dia, para korban banyak yang telah tertipu dan ujung-ujungnya rugi.

“Banyak korban tertipu dari aksi ini,” terangnya.

Ia yang tidak tahan bekerja untuk menipu orang lain akhirnya memutuskan melarikan diri.

“Saya tidak tahu pekerjaan seperti ini, jadi karena tidak tahan makanya lari dari perusahaan,” terang dia.

Keputusan lari dari perusahaan sangat berisiko sekali.

“Kalau ketangkap kita akan disiksa bahkan dijual,” pungkasnya

Modus Perdagangan Manusia di Indonesia

Perdagangan manusia di zaman modern dilakukan dengan sejumlah modus. Modus perdagangan orang yang dimaksud sangatlah beragam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi. Sebagian bahkan memalsukan dokumen resmi dengan dalih kegiatan legal, misalnya misi budaya.
2. Penempatan kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu tertentu sebagai cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi finansial, contohnya berupa kawin kontrak antara pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
4. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan, yang mana pihak perempuan tidak mengetahui kondisi dari calon suaminya.
5. Perekrutan anak-anak menjadi pekerja di jermal (bangunan tempat mencari ikan di daerah pantai) dengan upah yang minim dan kondisi kerja yang mengancam kesehatan, mental, dan moral.
6. Pengangkatan bayi tanpa proses yang benar.

Tukar Tambah Orang sebagai Pemain Pengganti

Berbagai cara para “calo” TPPO untuk mendapatkan mangsa. Pasalnya, selain mendapatkan komisi jika mendapatkan orang yang bersedia berangkat, terkadang mereka merupakan korban yang mencari



pengganti orang untuk bekerja menggantikan mereka disana.

Salah satu korban asal Kepulauan Riau yang saat ini masih berada di Myanmar mengaku bahwa modus menjanjikan gaji tinggi dan pekerjaan yang mudah di Myanmar dan Kamboja merupakan langkah untuk memperoleh sebanyak-banyaknya orang yang ingin berangkat.

Hal ini dilakukan agar para “calo” tersebut dapat dibebaskan oleh perusahaannya dan pulang ke Tanah

Air tanpa penyiksaan setelah orang baru datang menggantikan mereka.

“Kami disini seperti di jual. Jadi tidak boleh kembali jika tidak di tebus dengan uang atau di carikan pengganti agar kami bisa pulang ke kampung. Makanya, saya contohnya, meminta adik saya untuk berangkat saat nanti saya mau pulang,” tutur Nn, salah satu warga Kepulauan Riau yang turut menjadi korban TPPO.

Namun, tidak pelak, ternyata setelah pengganti datang ke Myanmar, calo



tersebut pun tidak diizinkan pulang.

“Ada perusahaan yang jahat, pengganti sudah datang, tapi yang membawa orang itu tidak boleh pulang. Kalau maksa, di penjara dan disiksa. Mulai dari tidak di kasi makan, hingga di setrum,” tutur NN.

NN mengaku dijanjikan bekerja selama 2 tahun. Setelah 2 tahun maka dia diperbolehkan pulang. Namun, meskipun pulang ke kampung halaman, NN mengaku bahwa adiknya tetap harus menggantikan dirinya di Myanmar.

“Begitu terus, setelah adik saya 2 tahun disana, maka saya lagi yang

berangkat atau mencari orang lain lagi untuk pengganti,” tutur NN.

Upaya Pencegahan Pemerintah di Tengah Himpitan Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan terbesar para korban TPPO rela jauh dari keluarga atau berangkat ke luar negeri untuk mengadu nasib dan memperoleh gaji yang lebih tinggi. Sementara, di Indonesia, pemerintah belum dapat menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan serta kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dirasakan

akan signifikan mengurangi korban TPPO, namun melihat kondisi saat ini, hal itu dirasa masih sangat jauh untuk di bayangkan.

Upaya pencegahan pemerintah Indonesia untuk mengurangi korban TPPO masih sekadar sosialisasi dan edukasi tanpa di dukung solusi kongkret bagaimana mengentaskan kemiskinan yang masih tinggi di negara ini.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dirasakan oleh banyak pihak masih hanya sekadar ilusi.



MAKAN BERGIZI GRATIS SEHATKAN ANAK, SAKITI INDONESIA

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh anak-anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi melalui program makan bergizi gratis (MBG). Komitmen tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media

usai menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia pada Kamis, 16 Januari 2025, di The Ritz Carlton, Jakarta.

“Yang jelas dari pemerintah pusat, kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini,” ucap Presiden.

Program pemerintah yang resmi

dimulai pada 6 Januari 2025 ini diharapkan dapat menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia. Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan program ini.

“Kemudian dari pemda (pemerintah daerah) juga ingin ikut serta, para



gubernur, para bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta boleh,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, sinergi antara seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan. Prabowo pun menekankan bahwa pelaksanaan program ini harus efisien dan tepat sasaran.

“Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran, dan tidak ada kebocoran,” lanjutnya.

Berjalannya MBG ini, berbagai “angin segar” disampaikan pemerintah. Mulai dari terpenuhinya makan bergizi bagi anak guna mengentaskan stunting. Hingga dengan tegas Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa program ini akan mengentaskan kemiskinan.

“Program MBG itu tidak semata akan menyiapkan Generasi Emas di 2045, tetapi bagaimana kemudian dengan adanya aliran uang ke desa-desa, sebesar Rp 6 miliar – Rp 7 miliar, itu akan menimbulkan dinamika ekonomi,” ujar

Agus Jabo dalam keterangan resmi, Rabu (5/2/2025).

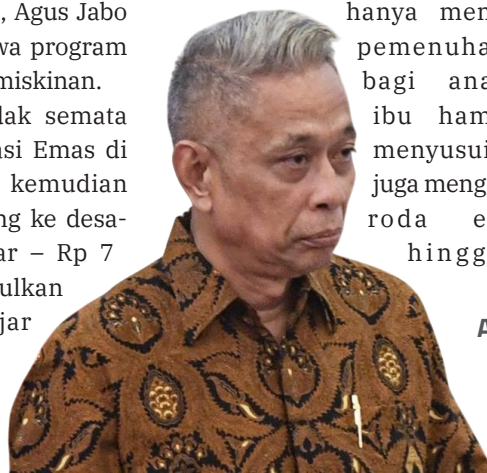
Agus Jabo menegaskan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Upaya percepatan dilakukan melalui program MBG serta pemberdayaan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Pak Presiden Prabowo ingin permasalahan kemiskinan di Indonesia itu secepatnya selesai,” katanya.

Menurutnya, pemberantasan kemiskinan bukan perkara mudah. Oleh karena itu, diperlukan program yang efektif seperti MBG, yang tidak

hanya memastikan pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil atau menyusui, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi hingga ke



Agus Jabo

pelosok desa yang dapat berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.

Senada dengan Agus, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun memuji program MBG yang merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Dadan menyebutkan program MBG merupakan investasi besar sumber daya manusia (SDM) menyambut Indonesia Emas 2045.

Dadan menuturkan bahwa Presiden menaruh perhatian penting pada percepatan program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.

“Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia termasuk ibu hamil, menyusui dan anak balita,” lanjutnya.

Selain itu, dukungan juga datang dari Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan pengaturan regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan program. Dadan pun berharap pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih cepat dengan penerima manfaat yang terus meningkat.

“Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta, nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta, dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi,” tandasnya.

Fakta MBG Hari Ini

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran memberikan dampak minor yang signifikan pada Indonesia hari ini. Belum lama MBG diterapkan, persoalan demi persoalan terjadi di lapangan.

Program yang diluncurkan dengan pagudana Rp71 triliun ini nyatanya tidak terlalu “bergizi” seperti yang disampaikan pemerintah.

Di hari pertama pelaksanaan MBG tidak merata, alias hanya beberapa provinsi yang ditunjuk yang dapat melaksanakannya.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi sebelumnya menargetkan program ini dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat mulai dari balita, pelajar hingga ibu menyusui.

Sementara itu, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah pun tidak memadai dengan jumlah sekolah yang menjadi sasaran kloter pertama MBG.

Beberapa fakta telah redaksi rangkum terkait penerapan MBG sejak tanggal 6 Januari 2025 :

1. Susu bukan menu wajib

Hasan menegaskan bahwa di dalam MBG susu tidaklah menjadi menu wajib.

“Susukan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya,” kata Hasan.

Hasan mengaku sempat berbincang dengan kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di lokasi yang dikunjunginya terkait penyediaan susu. Kepala SPPG ini, lanjutnya, akan menyediakan menu susu selama sepekan sekali. Baginya, terpenting saat ini porsi makanan yang



diterima dari program ini mencukupi kebutuhan gizinya.

“Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu *tuh* bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” kata dia.

2. Masakan hambar hingga ayam mentah

Melansir kantor berita BBC, di Nusa Tenggara Timur (NTT) ditemukan anak yang keracunan makan ayam yang diduga masih mentah dan berbau.

Masih mengutip BBC, guru juga menemukan nasi basi dari sekumpulan kotak yang mereka kumpulkan usai anak menyantap makanan. Bahkan para guru mengaku bahwa anak-anak merasa trauma karena sering mendapatkan daging mentah dan nasi basi di porsi makan MBG.

“Ada anak dari beberapa kelas yang

kasih kembali [makanannya] semua, tidak mau makan, trauma dengan makanan yang kemarin-kemarin basi,” kata Deciana, sebelum bilang ia telah melaporkan hal ini pada petugas yang mengantarkan makanan ke sekolah, mengutip [bbc.com](#).

3. Keracunan makanan

Pada Januari 2025 tercatat lebih dari 50 orang siswa keracunan makanan usai menyantap MBG. Nunukan Selatan, Kalimantan Utara menjadi saksi ada setidaknya 25 anak SD dan 30 anak SMA yang mengeluh sakit yang diduga keracunan makanan usai menyantap MBG.

Para murid SD dan SMA itu disebut mengalami mual dan diare setelah menyantap ayam kecap basi yang dimasak dapur yang sama.

“Kami, pihak sekolah, menduga menu pengantaran makan pagi yang tidak habis, dibagikan untuk menu



Dadan Hindayana

pengantaran siang. Karena memang ada lauk yang basi, ada juga yang masih bagus,” kata Hairuddin, kepala SD di Nunukan Selatan, mengutip *bbc.com*.

Di Jawa Tengah, setidaknya ada 40 siswa yang mengeluh mual dan pusing usai menyantap MBG.

Keracunan makanan ini berlanjut hingga bulan Februari dimana ada 8 siswa SD di Empat Lawang, Sumatera Selatan mengalami pusing dan muntah-muntah usai menyantap MBG.

4. Sajian MBG Belum Sesuai Standar

Merangkum dari portal media *bbc.com*, seorang pemeriksa gizi, Muhammad Shidqi, mengamati beberapa jenis sajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diunggah warganet di media sosial X dan Facebook.

Dari enam jenis sajian menu yang diamatinya, hanya satu yang menurutnya telah memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2019.

Di beleid itu disebutkan takaran isi piring anak usia Sekolah Dasar harus terpenuhi antara 500-700 kalori dan terkandung unsur karbohidrat, protein nabati dan hewani, lemak, dan buah dalam sekali makan.

Salah satu sajian menu yang dianggapnya memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi ketika melihat makan bergizi gratis di salah satu sekolah di Lombok Tengah. Makanan itu terdiri dari nasi, telur dadar, sayur tahu tumis, dan susu coklat.

“Ini menu yang tembus 645 kalori dan 17 protein. Sementara makanan yang lain hanya berkisar antara 400-500 kalori dan 9 gram protein,” tuturnya mengutip *bbc.com*.

Evaluasi MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) kembali

harus berkomentar tentang sejumlah kasus yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini diterpa isu makanan basi dan sejumlah kasus keracunan makanan pada sejumlah siswa.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, kasus makanan belum matang umumnya terjadi pada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang baru terbentuk. Dia mengklaim telah melakukan evaluasi terhadap para petugas SPPG tersebut dan diperintahkan untuk menyediakan menu MBG pada jumlah yang lebih kecil sehingga lebih fokus.

“Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi kami sudah instruksikan agar yang baru-baru memulai dari hal yang sedikit, yang kecil,” kata Dadan kepada awak media, di Halim Perdana Kusuma, Jumat (28/2/2025).

Menurut dia, sebuah SPPG biasanya ditargetkan untuk menyajikan menu MBG bagi 3.000 anak-anak. Pada SPPG yang mengalami masalah, kata dia, akan diminta menurunkan jumlah target penerima, kemudian secara bertahap baru menyuplai kepada 3.000 siswa.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilakukan dan juga melibatkan anak-anak beserta orang tua agar pelaksanaannya lebih maksimal.

“Pemerintah tidak perlu ragu untuk mengevaluasi kebijakan agar program MBG benar-benar tepat sasaran. Libatkan anak beserta orang tuanya dalam evaluasi,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengutip Antara.



Jasra menekankan bahwa isu *stunting* masih menjadi persoalan serius dalam lima tahun terakhir dimana target penurunan hingga 14 persen belum tercapai, sehingga evaluasi program MBG menjadi sangat penting.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, KPAI berkomitmen mengawasi pelaksanaan program tersebut. Dengan jumlah anak Indonesia mencapai 30,2 juta jiwa atau sepertiga dari total penduduk, kualitas generasi muda saat ini akan sangat menentukan masa depan bangsa.

Dia memaparkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan KPAI ke berbagai sekolah termasuk PAUD, SMP, SMA, Madrasah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ditemukan beberapa kendala dalam implementasi program MBG.

Menurut dia, KPAI menyayangkan kalau suara anak-anak belum sepenuhnya didengar dalam evaluasi



Iqbal Cheisa Wiguna

program ini, terutama di Jakarta Timur. Padahal, berdasarkan hasil survei Kementerian Kesehatan 2023, konsumsi sayur dan buah masih menjadi tantangan bagi anak-anak Indonesia.

Oleh karena itu KPAI berharap Pemerintah tidak ragu melakukan evaluasi dan terus penyempurnaan program MBG dengan mempertimbangkan masukan dari anak-anak beserta orang tua mereka agar manfaatnya semakin optimal yakni dalam menjamin anak bergizi seimbang.

“Temuan ini sudah kami sampaikan ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat menjadi bahan perbaikan ke depan,” katanya.

MBG Butuh Rp25 Triliun Perbulan

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebutkan pihaknya butuh dana Rp25 triliun per bulan untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima seluruh Indonesia.

Menurut Dadan hal tersebut jika dilakukan percepatan pada 2025.

“Kalau nanti ada percepatan maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan. Tapi nanti di mulai di bulan September, Oktober, November, dan Desember,” ujar Dadan di kantor Kemenko Pangan.

Dadan mengutarakan, saat ini untuk mendistribusikan Makan Bergizi Gratis bagi 3 juta penerima dibutuhkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan.

“Karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025. Tambahannya nanti akan 25 triliun per bulan,” tambah Dadan.

MBG dan Efisiensi yang “Sakiti” Indonesia

Presiden Prabowo melakukan langkah besar saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan. Efisiensi besar-besaran diumumkan oleh presiden guna menopang anggaran untuk program tersebut serta Danantara yang pun telah di resmikan oleh Presiden Prabowo bersama Mantan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini.

Tidak main-main, Prabowo menargetkan efisiensi sebanyak Rp. 750 Triliun untuk menambah modal kedua programnya tersebut.

Pemerintah mengklaim bahwa efisiensi tersebut lebih bermanfaat dibandingkan dengan belanja operasioan serta kegiatan seremonial.

Kendati demikian, klaim dari Pemerintah tersebut tidak dapat di terima oleh masyarakat. Berbagai aksi penolakan dilakukan kalangan masyarakat dan mahasiswa.

Ribuan mahasiswa serta aksi kamisan masyarakat di berbagai daerah mengkritik efisiensi dan program MBG yang di canangkan oleh

Presiden Prabowo.

Aksi “Indonesia Gelap” yang dilakukan di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Februari 2025 lalu mengkritik langkah yang di ambil oleh Prabowo, khususnya untuk bidang pendidikan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna menilai efisiensi anggaran pendidikan kurang tepat. Pasalnya, efisiensi itu akan berdampak pada 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang disinyalir akan putus kuliah karena keadaan ekonomi.

“Ini tentunya bisa mencekik teman-teman mahasiswa. Belum lagi KIP tahun 2025 yang tengah berjalan ini terancam tak dilanjutkan, kami pikir ini tidak tepat,” tutur Iqbal kepada awak media.

MBG turut menjadi perhatian mahasiswa dalam aksi tersebut. Bagaimana tidak, MBG berdampak serius pada sektor anggaran. Mahasiswa menilai, banyak anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan malah menjadi faktor pendukung program MBG tersebut.

Sementara itu, aksi Kamisan ke-31 yang di gelar di Patung Catur Muka, Denpasar, Bali pun mengkritik hal yang sama. Salah satu orator mengungkit tentang kemiskinan.

“Lingkaran setan kemiskinan struktural terus berputar tidak ada ujungnya,” tuturnya.

Humas Aksi Kamisan tersebut, Tomy Priatna berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan efisiensi dan program MBG.

Selanjutnya, aksi Jogja memanggil yang juga menyoroti program MBG yang dinilai didasari ambisi semata.

Realisasi dan Target Program MBG

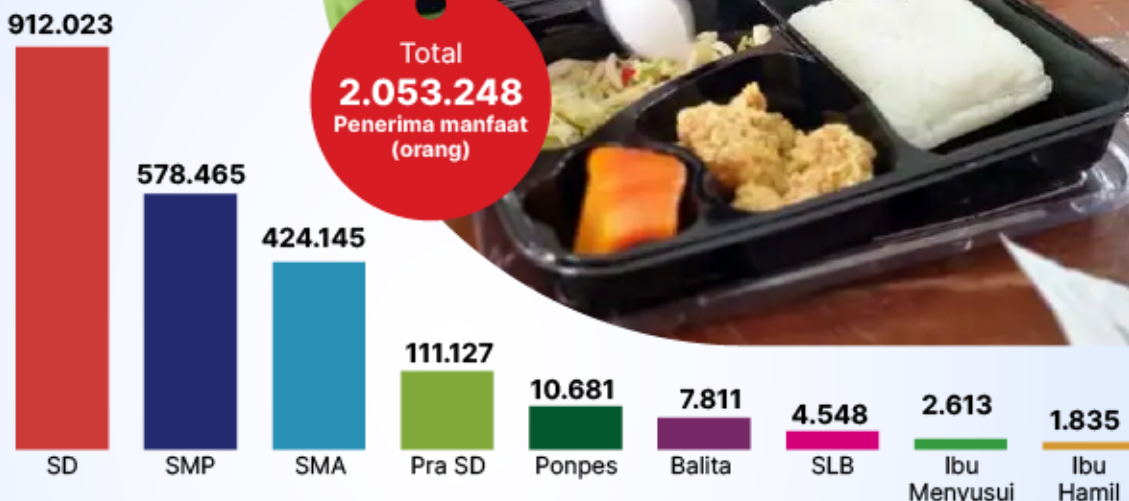
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di seluruh provinsi di Indonesia sejak pertama diluncurkan pada 6 Januari 2025. Berikut realisasi dan target program tersebut.



Total
2.053.248
Penerima manfaat
(orang)

Realisasi MBG

Data Kementerian Keuangan, per 12 Maret 2025



Anggaran
Rp**710,5**
miliar

Jumlah Dapur Umum
726
unit

Strategi Pemerintah Mencapai Target

- ✓ Mengaudit realisasi program secara berkala untuk memperbaiki kekurangan.
- ✓ Menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum.
- ✓ Melatih 30.000 sumber daya manusia agar terampil untuk ditugaskan di SPPG.
- ✓ Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang menjadi target program MBG dan berkolaborasi dengan pihak sekolah.
- ✓ Memastikan kebersihan dan kesegaran makanan serta bahan makanan yang disalurkan untuk mencegah gangguan kesehatan.

Target MBG 2025 (Data Badan Gizi Nasional, 17 Januari 2025)



Keterangan:
Penambahan anggaran akan menyerap dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Sampai 12 Maret, ini (MBG) telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang. Dan saat ini tercatat jumlah SPPG yang beroperasi 726, akan terus ditingkatkan sehingga bisa menjangkau Rp82,9 juta target penerima MBG.”



Suahasil Nazara
Wakil Menteri Keuangan



RAPOR PENDIDIKAN KOMITMEN WUJUDKAN PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui kebijakan berbasis data. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui Rapor Pendidikan, sebuah platform yang menyajikan hasil evaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh. Platform ini memberikan gambaran

kondisi pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan, serta telah terintegrasi dengan indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Dalam Forum Redaktur Pendidikan bersama media massa yang berlangsung di Plasa Insan Berprestasi,

Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (18/3), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024 yang merupakan bagian dari penghimpunan data pendidikan melalui berbagai mekanisme.

“Diharapkan dengan Rapor Pendidikan ini, kita dapat memiliki peta pendidikan, khususnya terkait mutu layanan pendidikan di berbagai

bidang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi kita dalam melakukan perbaikan pada masa-masa yang akan datang,” ujar Mendikdasmen.

Mendikdasmen juga mengatakan bahwa Rapor Pendidikan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi SPM Pendidikan, yang merupakan bagian dari rencana strategis pengembangan pendidikan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin, memaparkan bahwa Rapor Pendidikan merupakan sumber data utama dalam penjaminan mutu karena menampilkan kondisi layanan pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam penjaminan mutu ini terbagi menjadi 1) sistem penjaminan mutu internal melalui proses evaluasi dini; dan 2) sistem penjaminan mutu eksternal melalui penilaian berbagai pemangku kepentingan. “Muatan dari sistem penjaminan mutu ini adalah peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Rapor Pendidikan menyajikan data



Asesmen Nasional (AN) dan berbagai data pendidikan lainnya. Salah satu instrumennya adalah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur capaian murid dalam literasi dan numerasi. Berdasarkan data AN, terdapat peningkatan proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi selama tahun 2022 hingga 2024.

Proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi meningkat dari 59,49% pada tahun 2022 menjadi 68,05% pada tahun 2023, dan terus naik hingga 70,03% pada tahun 2024. Sementara itu, proporsi murid yang mencapai

kompetensi minimum numerasi juga menunjukkan peningkatan dari 45,24% pada tahun 2022 menjadi 62,45% pada tahun 2023, dan mencapai 67,94% pada tahun 2024. Kendati demikian, peningkatan ini belum merata di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Perbedaan capaian antar kabupaten/kota disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain masih adanya keterbatasan dalam akses dan jumlah, serta ketidakmerataan pendidik yang berkualitas di beberapa wilayah.

Selain peningkatan hasil belajar, Rapor Pendidikan juga mencatat adanya perbaikan dalam aspek kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, serta kepemimpinan instruksional kepala satuan pendidikan. Faktor-faktor ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan capaian belajar dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.

Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, terutama pada indikator karakter murid, iklim keamanan sekolah, dan iklim





kebinekaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah konkret dalam memperkuat pendidikan karakter serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik.

"Untuk itu, Kemendikdasmen mendorong seluruh pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai upaya bersama dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan

Toni Toharudin



di berbagai daerah di Indonesia. Seluruh komponen masyarakat bisa ikut bergotong-royong bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan demi terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua," pungkas Toni.

Tentang Rapor Pendidikan

Rapor pendidikan adalah salah satu alat evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian pembelajaran peserta didik, kualitas pembelajaran, serta kondisi pendidikan di setiap satuan

pendidikan. Rapor ini bertujuan untuk memberikan informasi yang obyektif dan menyeluruh kepada para pemangku kepentingan, termasuk guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat, agar dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan pendidikan secara tepat sasaran.

Melalui rapor pendidikan, pihak sekolah dan dinas pendidikan dapat melihat berbagai indikator yang mencakup hasil belajar siswa, seperti literasi dan numerasi, serta aspek pendukung pembelajaran lainnya, seperti kompetensi guru, lingkungan belajar, dan partisipasi siswa. Data yang disajikan dalam rapor ini dihimpun



dari berbagai sumber, seperti Asesmen Nasional, survei, dan data administrasi lainnya. Dengan demikian, rapor pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai alat refleksi dan perencanaan strategis bagi pengelola pendidikan.

Kelebihan rapor pendidikan ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan data yang jelas dan mudah dipahami. Misalnya, grafik dan tabel dalam rapor memungkinkan pengguna untuk melihat tren atau perbandingan antarindikator secara visual. Selain itu, adanya analisis mendalam juga membantu para pendidik dan pengelola sekolah untuk mengidentifikasi tantangan utama yang perlu diatasi guna meningkatkan mutu pendidikan.

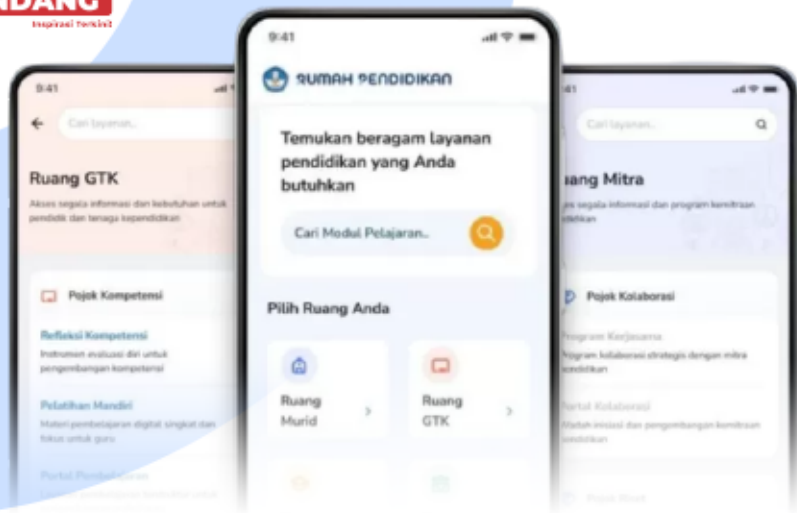
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berharap bahwa

rapor pendidikan ini dapat menjadi katalisator perubahan positif dalam dunia pendidikan. Misalnya, kepala sekolah dapat menggunakan rapor ini untuk menyusun program kerja yang lebih efektif, sementara guru dapat menggunakannya untuk merancang metode pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sisi lain, dinas pendidikan dapat menjadikannya sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data.

Dengan adanya rapor pendidikan, proses evaluasi pendidikan diharapkan tidak lagi sebatas pengumpulan data, tetapi benar-benar berorientasi pada tindakan perbaikan. Sebagai contoh, jika rapor menunjukkan bahwa hasil literasi siswa di suatu sekolah masih rendah, pihak sekolah dapat segera merancang intervensi yang berfokus

pada peningkatan keterampilan membaca. Hal ini menunjukkan bahwa rapor pendidikan tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga alat untuk mendorong kemajuan yang nyata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, rapor pendidikan menjadi cerminan dari upaya untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Ia bukan sekadar dokumen evaluasi, tetapi juga panduan untuk masa depan yang lebih baik, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat memanfaatkan rapor ini secara optimal untuk bersama-sama menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.



Mengenal Aplikasi Super Rumah Pendidikan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan aplikasi super Rumah Pendidikan, Selasa (21/1), sebagai upaya transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan.



Cara mengakses:

Buka laman rumah pendidikan.go.id.

atau

Unduh aplikasi Rumah Pendidikan melalui **Playstore**, bagi pengguna Android.

Tujuan pembuatan superapp Rumah Pendidikan

- ✓ Mengintegrasikan layanan digital pendidikan yang sebelumnya tersebar seperti Dapodik, PMM, SIPLah, Rumah Belajar dan lainnya menjadi satu pintu.
- ✓ Memudahkan siswa, guru dan tenaga kependidikan, orang tua, mitra, masyarakat mengakses layanan digital pendidikan secara cepat.



Rumah Pendidikan ini menjadi simbol layanan publik yang responsif akuntabel, melayani, adaptif dan harmonis. Ini langkah konkret menuju pendidikan berkualitas dan merata.

Abdul Mu'ti
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Fitur dan kegunaan

Ruang Murid

Memberikan akses pembelajaran mendalam, terutama matematika, sains dan teknologi.



Ruang GTK

Membantu guru dan tenaga kependidikan (GTK) meningkatkan kompetensi, kinerja dan kesejahteraan.



Ruang Sekolah

Membantu sekolah dalam perencanaan, pengambilan keputusan.



Ruang Bahasa

Memfasilitasi pelestarian Bahasa Indonesia dan pengembangan kemampuan bahasa nasional.



Ruang Orang Tua

Mendukung peran orang tua melalui pemantauan capaian siswa dan bantuan/bimbingan belajar siswa di rumah.



Ruang Pemerintah

Membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan berbasis data.



Ruang Mitra

Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk inovasi pendidikan.



Ruang Publik

Pelibatan masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam mengembangkan potensi siswa.





Selamat Memperingati Hari
Pendidikan Nasional

“Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.

TEKS PIDATO MENDIKDASMEN HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2025



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DALAM PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
2 MEI 2025

“PARTISIPASI SEMESTA WUJUDKAN PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA”

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wataala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekadar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan baik sebagai pribadi maupun warga negara.

Pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (*homo educandum*) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan.

Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur.

Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumberdana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat.

Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan Pembelajaran Mendalam (*deep learning*), pemberlakuan Test Kemampuan Akademik (TKA), serta pembelajaran Coding, dan Kecerdasan Artifisial (AI). Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolah raga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat, program Pagi Ceria yang meliputi Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH), menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak diluncurkan Album Kicau yang berisi lagu anak-anak.

Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

Semoga Tuhan meridai.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Jakarta, 2 Mei 2025

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Republik Indonesia,



Abdul Mu'ti

Makna Logo Hari Pendidikan Nasional 2025



Logo Hardiknas 2025 menggambarkan tiga sosok manusia yang menjulang ke atas dengan gerakan dinamis, melambangkan semangat, kolaborasi, dan keberagaman dalam dunia pendidikan. Tiga sosok ini juga mewakili tiga pilar pendidikan: peserta didik, pendidik, dan masyarakat. Bintang di atas sosok tengah, yang mengarah ke bintang emas, melambangkan cita-cita dan tujuan mulia pendidikan.

Elemen-elemen logo dan maknanya:

- **Tiga Sosok Manusia:**
 - o Warna merah, biru, dan abu-abu melambangkan keberagaman, kolaborasi, dan kebersamaan dalam pendidikan.
 - o Gerakan dinamis ke atas menggambarkan optimisme, kemajuan, dan daya juang dalam membangun pendidikan.
- **Bintang Emas:**
 - o Menyatakan cita-cita, harapan, dan tujuan luhur pendidikan: mencetak generasi unggul dan berkarakter.
- **Sosok Biru yang Mengarah ke Bintang:**
 - o Melambangkan fokus dan keteguhan dalam mencapai tujuan pendidikan.
- **Tulisan "HARDIKNAS 2025":**
 - o Didesain dengan font tebal berwarna hitam, memberi kesan tegas dan kuat.

Makna keseluruhan: Logo ini menyampaikan pesan bahwa pendidikan adalah upaya kolektif, inklusif, dan penuh semangat untuk mencapai ilmu pengetahuan, karakter, dan kemajuan bangsa.



Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua

Melalui tema “Partisipasi Semesta”, pemerintah ingin menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan semata, melainkan merupakan kerja kolaboratif seluruh elemen bangsa.

Peserta didik, pendidik, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, hingga pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, adil, dan merata.

Momentum Hardiknas 2025 ini mengingatkan kita bahwa tanpa partisipasi aktif dari semua pihak, cita-cita membangun generasi unggul tidak akan tercapai optimal.



UPACARA HARDIKNAS 2025

SEMANGAT KEBERSAMAAN DALAM KEBERAGAMAN

Suasana semarak dan penuh khidmat menyelimuti pelaksanaan Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang digelar di Sekolah Regina Pacis, Bogor, Jawa Barat. Acara ini menjadi salah satu peringatan Hardiknas yang paling

berkesan, dengan kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, yang bertindak sebagai pembina upacara.

Sejak pagi, halaman sekolah telah dipenuhi oleh para siswa, guru, dan jajaran Kemendikdasmen yang mengenakan pakaian adat

dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran mereka mencerminkan semangat keberagaman yang menjadi salah satu nilai utama dalam pendidikan nasional. Mendikdasmen sendiri mengenakan baju adat Pangsi khas Jawa Barat, sebuah simbol dari keterikatan budaya dengan pendidikan

yang inklusif dan merata.

Dalam pidatonya, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab bersama. "Usaha untuk mewujudkan tujuan dan fungsi pendidikan tersebut, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kami memerlukan partisipasi semesta untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua," ujarnya dengan penuh semangat.

Upacara ini juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh peserta mengenai perjalanan pendidikan nasional. Kepala SD Regina Pacis Bogor, Lousiana Cich, menyampaikan bahwa mengenakan pakaian adat dalam upacara ini bukan sekadar tradisi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya Indonesia. "Dengan mengenakan pakaian daerah, anak-

anak semakin mengenal kebudayaan, saling menghargai, dan memiliki rasa bangga akan kekayaan budaya daerah di Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, para siswa tampak antusias menyambut kehadiran Mendikdasmen dan berkesempatan berdialog langsung dengannya. "Kehadiran beliau sebagai pembina upacara menjadi semangat baru bagi seluruh siswa dan tenaga pendidik di sekolah kami," tambah Lousiana.

Upacara Hardiknas di Regina Pacis Bogor bukan hanya sekadar perayaan seremonial, tetapi juga menjadi momentum refleksi terhadap perjalanan pendidikan nasional. "Hardiknas juga menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan harus terus diperjuangkan agar semakin maju dan merata, sehingga menghasilkan generasi muda yang berakhlak dan berkarakter," kata Lousiana.

Dengan semangat Hari Pendidikan

Nasional 2025, Mendikdasmen mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong-royong mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. "Anak-anakku sekalian, kalian adalah harapan masa depan bangsa. Jadilah anak-anak Indonesia hebat," seru Abdul Mu'ti di akhir pidatonya.

Upacara ini meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta, terutama siswa yang merasa terinspirasi untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan. Semangat Hardiknas 2025 terus bergema, membawa harapan baru bagi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan berkualitas.

Kunjungi SDN 2 dan 3 Leuwibatu

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, melakukan kunjungan ke SDN 2 dan 3 Leuwibatu, Kabupaten Bogor, dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi sekolah serta memberikan motivasi kepada para siswa dan tenaga pendidik.

Sejak pagi, suasana di SDN 2 dan 3 Leuwibatu terasa berbeda. Para siswa tampak antusias menyambut kehadiran Mendikdasmen, yang datang dengan semangat untuk berdialog langsung dengan mereka. Setibanya di sekolah, Abdul Mu'ti disambut dengan tarian tradisional Sunda yang dibawakan oleh siswa kelas 5 dan 6. Para guru dan tenaga kependidikan juga turut hadir dalam acara penyambutan ini.

Dalam kunjungannya, Mendikdasmen menyempatkan diri untuk masuk ke beberapa kelas dan menyaksikan langsung proses belajar





mengajar. Salah satu kelas yang dikunjungi adalah kelas 6, yang saat itu sedang membahas materi tentang jaring-jaring makanan. Di papan pembelajaran, terpampang gambar burung hantu sebagai salah satu komponen dalam ekosistem tersebut. Dengan gaya akrab, Abdul Mu'ti mencoba memancing antusiasme murid dengan bertanya, "Ada yang bisa menirukan suara burung hantu?" Namun, suasana hening. Anak-anak tampak saling pandang, bingung menjawab pertanyaan sang Menteri. Momen itu pun dimanfaatkan Mendikdasmen untuk memberi motivasi. "Ketika Pak Guru menjelaskan tentang burung hantu, kalian harus bisa membayangkan seperti apa bentuk dan suaranya. Jangan takut bertanya. Belajar itu harus aktif dan menyenangkan," ujarnya.

Sebagai bagian dari program transformasi pendidikan, Mendikdasmen memperkenalkan teknologi *Smart Board*, sebuah papan interaktif yang digunakan untuk meningkatkan minat dan kualitas belajar siswa. Perangkat ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan materi

pembelajaran secara digital. "Nanti sekolah kalian akan dibantu oleh Presiden dengan alat ini, supaya belajar jadi lebih asyik dan menarik," jelasnya kepada para siswa.

Dalam kunjungannya, Abdul Mu'ti juga menyoroti kondisi fisik sekolah yang masih membutuhkan perbaikan. Atap plafon berlubang, dinding retak, dan lantai keramik yang sudah mulai rusak menjadi perhatian utama. Namun, meskipun kondisi sekolah cukup memprihatinkan, para siswa tetap menunjukkan semangat belajar yang tinggi. "Kalian beruntung hari ini bisa belajar dengan Pak Menteri," ujar Abdul Mu'ti sambil menunjuk atap plafon yang berlubang. Ia pun bercanda dengan siswa, "Ini namanya sekolah apa, ini kok ada lubang di atasnya, namanya sekolah Batman ya," yang langsung disambut tawa oleh para murid.

Selain berbicara tentang pendidikan, Mendikdasmen juga mengajak para siswa untuk peduli terhadap lingkungan. Ia bertanya kepada murid, "Kalau alam kita tidak rusak, maka hidup kita akan?" Beberapa siswa langsung menjawab, "Tenang, bahagia, aman, dan makmur." Abdul

Mu'ti pun menegaskan pentingnya menjaga alam, baik binatang maupun tumbuhan. "Jangan dirusak, supaya lingkungan kita tetap lestari," pesannya.

Ia juga menyampaikan pentingnya menghormati guru sebagai wujud syukur atas ilmu yang diberikan. "Dengan ilmu dari guru, kalian bisa jadi orang cerdas. Maka, hormatilah guru kalian," tuturnya kepada para siswa.

Mengakhiri kunjungannya, Mendikdasmen mengajak para siswa untuk terus semangat belajar dan menanamkan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yaitu:

1. Bangun pagi.
2. Beribadah.
3. Berolahraga.
4. Makan sehat dan bergizi.
5. Gemar belajar.
6. Bermasyarakat.
7. Tidur cepat.

Kunjungan ini meninggalkan kesan mendalam bagi para siswa dan tenaga pendidik di SDN 2 dan 3 Leuwibatu. Semangat Hardiknas 2025 terus bergema, membawa harapan baru bagi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan berkualitas.



PELUNCURAN PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)

Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di SD Negeri Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, pada 2 Mei 2025.

Acara ini sekaligus menjadi momen peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), sebuah inisiatif pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui digitalisasi dan revitalisasi sekolah.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo menyapa para siswa yang berbaris rapi di sepanjang jalan menuju sekolah. "Selamat pagi, anak-anak! Semangat belajar, ya!" ucapnya dengan senyum hangat, yang langsung disambut sorakan gembira dari para murid.

Presiden kemudian memasuki salah satu ruang kelas untuk menyaksikan demonstrasi penggunaan Smart Board, sebuah teknologi papan interaktif yang menjadi bagian dari program digitalisasi pembelajaran. Di dalam kelas, Presiden duduk bersama anak-

anak dan menyaksikan demonstrasi yang dipandu oleh Bapak Dumah, guru SD Negeri Cimahpar 5. "Terima kasih, Pak Guru. Belajar yang baik semuanya, ya," ujar Presiden sebelum meninggalkan ruang kelas.

Dalam laporannya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa PHTC bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas melalui revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran. "Mudah-mudahan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana serta dengan adanya smart classroom, anak-anak dapat belajar dengan lebih menyenangkan, lebih bersemangat, sehingga mereka dapat menjadi generasi Indonesia yang hebat," ucapnya.

Program ini juga didukung oleh platform pembelajaran digital 'Ruang Murid', yang menghadirkan materi belajar dalam bentuk video dan permainan edukatif. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp16,9 triliun untuk revitalisasi 11.440 satuan pendidikan,

serta tambahan Rp2 triliun untuk program digitalisasi. "Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk memprioritaskan pendidikan, tidak hanya mencerdaskan bangsa, tetapi juga mengangkat bangsa dalam posisi dan harkat martabat yang tinggi, serta untuk mengentaskan kemiskinan dengan pendidikan sebagai formulanya," tutup Mendikdasmen.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas melalui revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran. "Mudah-mudahan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana serta dengan adanya smart classroom, anak-anak dapat belajar dengan lebih menyenangkan, lebih bersemangat, sehingga mereka dapat menjadi generasi Indonesia yang hebat," ucapnya.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp16,9 triliun untuk revitalisasi 11.440 satuan pendidikan, serta tambahan Rp2 triliun untuk program digitalisasi. "Ini menunjukkan komitmen pemerintah

untuk memprioritaskan pendidikan, tidak hanya mencerdaskan bangsa, tetapi juga mengangkat bangsa dalam posisi dan harkat martabat yang tinggi, serta untuk mengentaskan kemiskinan dengan pendidikan sebagai formulanya,” tutup Prabowo dalam pidatonya.

Kunjungan ini menjadi momentum

penting dalam mendorong pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama bagi kemajuan bangsa. “Anak-anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan terbaik. Dengan pendidikan yang bermutu, kita bisa membangun masa depan yang

lebih cerah,” katanya dalam pidato penutupnya.

Dengan peluncuran PHTC, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Empat Fokus Utama PHTC

1 Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

- ✔ Pemerintah mengalokasikan Rp16,9 triliun untuk revitalisasi 11.440 satuan pendidikan.
- ✔ Fokus utama adalah memperbaiki sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
- ✔ Renovasi dilakukan dengan skema swakelola mandiri, melibatkan komunitas sekolah dan masyarakat setempat.

2 Digitalisasi Pembelajaran

- ✔ Pemerintah akan memasang layar televisi digital di seluruh sekolah di Indonesia untuk menunjang pembelajaran berbasis digital.
- ✔ Platform pembelajaran digital ‘Ruang Murid’ akan digunakan untuk menghadirkan materi belajar dalam bentuk video dan permainan edukatif.
- ✔ Targetnya, seluruh sekolah sudah terpasang layar digital pada pertengahan tahun 2026.

3 Bantuan Pendidikan bagi Guru yang Belum Berkualifikasi S1/D4

- ✔ Pemerintah menyiapkan dukungan bagi 31.000 dosen, serta bantuan bagi guru-guru yang sedang menempuh jenjang S1 atau D4.
- ✔ Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan memastikan standar pendidikan yang lebih tinggi.

4 Insentif bagi Guru Non-ASN

- ✔ Pemerintah memberikan bantuan langsung bagi guru honorer yang belum bersertifikasi.
- ✔ Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memastikan kualitas pengajaran yang lebih baik.

JALAN SEHAT HARDIKNAS 2025, WADAH KOMUNIKASI EFEKTIF INSAN PENDIDIKAN GALANG KOLABORASI

Memperingati Bulan Pendidikan dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan Jalan Sehat Hardiknas 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh 2.500 peserta dari kalangan dinas pendidikan, guru, tenaga kependidikan, siswa, pejabat dan pegawai Kemendikdasmen serta kementerian terkait lainnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, membuka langsung dan melepas ribuan peserta Jalan Sehat Hardiknas 2025 di Halaman Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (18/5). Tak ketinggalan, ia pun turut berbaur bersama seluruh peserta mengikuti jalan sehat.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen mengatakan bahwa Hardiknas menjadi momentum penting dalam meningkatkan kolaborasi guna mewujudkan manusia yang berkarakter. "Ini adalah momen penting untuk kembali merenungkan tujuan utama pendidikan kita, yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya," ucap Menteri Mu'ti.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa partisipasi semesta sangat



dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Seluruh pihak harus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta bersama-sama menghadapi tantangan, menyelesaikan permasalahan dan rintangan dalam dunia pendidikan.

"Kita perlu berkomitmen untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia, kita harus optimistis jika tidak ada masalah yang tidak bisa kita lalui.

Tetapi itu semua bisa diselesaikan apabila kita semua berkolaborasi, bekerja sama, bergandeng tangan, gotong royong, dan bahu-membahu mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua," tegasnya.

Mendikdasmen juga mengimbau, agar insan pendidikan meneladani semangat Ki Hadjar Dewantara yang percaya bahwa pendidikan harus mampu mengembangkan potensi, membentuk karakter, dan menjadikan

manusia dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya.

Ditambahkan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTK PG), Nunuk Suryani, Jalan Sehat merupakan salah satu upaya penting bersama-sama untuk meneguhkan dan memperkuat tekad serta komitmen dalam memajukan pendidikan nasional.

Keterlibatan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Jalan Sehat Hardiknas 2025

Jalan Sehat Hardiknas 2025 turut dimeriahkan dengan keterlibatan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini menurut Menteri Mu`ti menambah suasana kebersamaan antarseluruh peserta. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah dalam

menyatukan semangat dan langkah segenap insan pendidikan dalam memeriahkan Bulan Hardiknas yang sejalan dengan visi Kemendikdasmen.

"Ada beberapa anak-anak berkebutuhan khusus yang ikut bergabung di acara Jalan Sehat, salah satunya juga Azam yang tadi menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat," ungkap Mu`ti.

Dirjen GTK PG, Nunuk Suryani juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra Kemendikdasmen yang terlibat dalam kegiatan ini."Saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, termasuk para mitra strategis yakni BTN, Bank Mandiri, BNI, dan BRI atas komitmen nyatanya dalam mendukung dunia pendidikan di Indonesia," tuturnya.

Pada kesempatan ini, salah satu peserta yakni Kepala SMAN 35 Jakarta, Nenny Suryani, menyambut baik penyelenggaraan program Jalan Sehat Hardiknas 2025. "Kami bersyukur dengan adanya program ini, membuat anak-anak Indonesia semakin sehat, semangat bangun pagi untuk menciptakan generasi anak muda untuk masa depan yang cerah," ucap Nenny.

Menariknya, salah satu peserta yakni Intan, murid SMPN 38 Jakarta, menyampaikan Jika Jalan Sehat Hardiknas 2025 memberikan motivasi anak-anak Indonesia agar melakukan olahraga sejak dini. "Acara ini mendorong anak-anak seperti saya yang senang rebahan dan selalu bermain gawai untuk dapat melakukan olahraga dimulai dengan jalan sehat untuk menjaga kesehatan anak Indonesia," ungkap Intan.

Intan menambahkan bahwa acara jalan sehat ini, selain menjaga kesehatan juga dapat bersilaturahmi dengan rekan-rekan dari sekolah lain. "Suasananya sangat seru, selain menjaga kesehatan, kami juga berkesempatan menambah banyak teman dari sekolah lain dan bertemu dengan masyarakat sekitar," tambahnya.

Komentar senada juga diutarakan oleh Ara dan Bilqis. Keduanya adalah murid SMAN 35 Jakarta. Kata mereka, kegiatan semacam ini sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan hidup sehat dan memberikan waktu bagi anak seumuran mereka untuk melakukan interaksi sosial yang bermanfaat. "Dengan begini, kita bisa saling berdiskusi ceria serta menambah kebersamaan dengan rekan-rekan, guru, dan peserta lainnya," ungkap Ara yang diamini Bilqis.





MALAM TASYAKURAN HARDIKNAS 2025:

APRESIASI BAGI PENGGERAK PENDIDIKAN INDONESIA

Suasana penuh kehangatan dan semangat kolaborasi menyelimuti Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta. Acara ini menjadi ajang apresiasi bagi individu dan institusi yang telah berkontribusi dalam

memajukan pendidikan di Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. "Mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari komitmen kami untuk bersama-sama dengan

semua kalangan, saling berpartisipasi, bekerjasama, dan mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua," ujarnya dengan penuh semangat.

127 Penghargaan untuk Para Penggerak Pendidikan

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi nyata, Kemendikdasmen memberikan



127 penghargaan kepada berbagai pihak yang dianggap berjasa dalam memajukan pendidikan Indonesia. Para penerima penghargaan terdiri dari:

- Tenaga pendidik dan kependidikan yang inovatif dan berdedikasi tinggi.
- Pemerintah daerah yang aktif mendukung kebijakan pendidikan inklusif dan berkeadilan.
- Mitra pembangunan, baik dari sektor swasta maupun organisasi non-pemerintah.
- Media dan jurnalis yang konsisten mengangkat isu pendidikan secara konstruktif.
- Tokoh pendidikan nasional yang memberikan inspirasi dan arah bagi

perubahan positif.

Salah satu penghargaan bergengsi diberikan kepada Prof. Dr-Ing Wardiman Djojonegoro, yang dianugerahi Penghargaan untuk Pengabdian Sepanjang Hayat Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 2025. Dalam pidatonya, ia menyampaikan rasa syukur dan harapan agar pendidikan Indonesia terus berkembang. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kita harus terus berinovasi agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan terbaik,” katanya.

Selain itu, INOVASI - DFAT menerima penghargaan sebagai Mitra Pembangunan Pendidikan Dasar dan

Menengah, sementara Detik.com, Tribunnews.com, Harian Kompas, Jawa Pos, dan I News dinobatkan sebagai media terproduktif dalam pemberitaan pendidikan dasar dan menengah.

Semangat Gotong Royong dalam Pendidikan

Malam Tasyakuran ini menjadi refleksi bahwa kemajuan pendidikan bukan hanya hasil dari kerja pemerintah, melainkan buah dari partisipasi semua pihak yang peduli terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Dalam pidatonya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan bahwa pendidikan Indonesia ke depan membutuhkan sinergi dari semua elemen bangsa untuk menciptakan:

- Ekosistem pendidikan yang inklusif, di mana setiap anak memiliki kesempatan belajar tanpa diskriminasi.
- Sistem yang berkeadilan, memastikan distribusi sumber daya dan akses yang merata di seluruh pelosok negeri.
- Kebijakan berkelanjutan, yang mampu menjawab tantangan zaman dan perkembangan teknologi.

Acara ini ditutup dengan doa bersama dan harapan agar pendidikan Indonesia semakin maju. “Mari kita terus bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong-royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Abdul Mu’ti dalam pidato penutupnya.

Dengan semangat Hardiknas 2025, Malam Tasyakuran ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan merata bagi seluruh anak Indonesia.



KONSOLIDASI NASIONAL PENDIDIKAN 2025: **MENATA MASA DEPAN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN**

Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 adalah sebuah pertemuan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai upaya menyelaraskan visi Pendidikan

Bermutu untuk Semua. Acara ini berlangsung di Depok, Jawa Barat, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, guru, dan organisasi pendidikan.

Pidato Menteri Pendidikan Dasar

dan Menengah, Abdul Mu'ti, dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 menyoroti berbagai aspek penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam menciptakan

sumber daya manusia unggul menuju *Indonesia Emas 2045*.

Mu'ti membuka pidatonya dengan menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. "Kita tidak hanya ingin mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global," ujarnya.

Salah satu poin utama yang ia bahas adalah redistribusi guru ASN ke sekolah swasta dan daerah terpencil. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan tenaga pendidik dan memastikan bahwa semua sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki guru berkualitas. "Kita harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan dari guru yang kompeten, tanpa memandang status sekolahnya," tegasnya.

Mu'ti juga membahas transformasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang lebih transparan dan berkeadilan. Ia menekankan perlunya sistem yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi atau sosial. "Pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena sistem yang tidak berpihak pada mereka," katanya.

Dalam pidatonya, ia menyoroti pentingnya penguatan karakter siswa melalui program *7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat*. Program ini bertujuan untuk membentuk siswa yang disiplin, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat. "Kita ingin membangun generasi yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi



juga memiliki karakter yang kuat dan siap menjadi pemimpin masa depan," jelasnya.

Mu'ti juga memperkenalkan pendekatan deep learning, yaitu metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis pemecahan masalah. Ia menekankan bahwa pendidikan harus mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. "Kita harus mengubah paradigma pendidikan dari sekadar hafalan menjadi pembelajaran yang mendorong eksplorasi dan inovasi," ujarnya.

Salah satu inovasi yang ia paparkan adalah pengenalan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Menurutnya, AI dan coding akan menjadi keterampilan penting bagi generasi mendatang dalam menghadapi era digital. "Kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi.



Justru kita harus mempersiapkan anak-anak kita agar mereka menjadi bagian dari revolusi digital," katanya.

Mu'ti juga memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai sistem evaluasi baru yang lebih komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa. Ia menekankan bahwa sistem ini akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan yang lebih objektif. "Evaluasi pendidikan harus lebih dari sekadar ujian standar. Kita harus memastikan bahwa setiap siswa benar-benar memahami materi yang mereka pelajari," jelasnya.

Dalam pidatonya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi semua anak Indonesia. "Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha, dan semua pihak yang peduli terhadap



Hetifah Sjaifudian

masa depan bangsa,” pungkasnya.

Pidato ini menjadi salah satu bagian penting dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kerangka kerja bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Menko PMK Ajak Semua Prioritaskan Pendidikan

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, secara resmi membuka Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Depok, pada 29 April 2025. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Pratikno mengawali pidatonya dengan menyoroti data komparatif dunia yang menunjukkan bahwa negara-negara maju bukanlah negara yang kaya sumber daya alamnya,

tetapi negara yang kuat dari sumber daya manusianya. “Kalau kita melihat dari data komparatif dunia, negara-negara yang maju justru bukan negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi negara yang kuat dari sumber daya manusianya. Kuncinya adalah pendidikan,” ucapnya. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dan bahwa investasi dalam pendidikan akan memberikan dampak jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Pratikno juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan, yaitu memastikan anak-anak bertalenta hebat dapat bersaing secara global, sekaligus menjangkau anak-anak yang masih jauh dari akses pendidikan yang layak. “Mari sama-sama kita tempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Kualitas pendidikan, aksesibilitas pendidikan adalah kunci utama,” lanjutnya. Ia menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menko PMK juga menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya transformasi pendidikan. Ia mengibaratkan konsolidasi ini seperti perjalanan kereta api, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berperan sebagai lokomotif yang harus memastikan semua gerbong bergerak maju bersama. “Bapak/Ibu ayo kita satukan dan konsolidasikan ini seperti kereta api. Pak Mendikdasmen adalah lokomotifnya yang akan melihat ke belakang, jangan sampai ada gerbong yang tertinggal. Selain itu, menjadi tugas Mendikdasmen membangun kekuatan dan daya tarik yang besar, melihat jauh ke depan, untuk menarik semua gerbong maju bersama-sama mencapai tujuan,” urai Pratikno.

Selain itu, Pratikno juga menekankan bahwa pendidikan memiliki dua dimensi yang saling terkait. Dimensi pertama adalah konservatif, yang menjaga dan mewariskan nilai-nilai mulia bangsa Indonesia. Dimensi kedua adalah progresif, di mana pendidikan harus terus bergerak maju untuk menjawab tantangan secara optimistis berbekal kemampuan yang dimiliki. “Pendidikan memiliki dua dimensi yang saling terkait. Pertama adalah dimensi konservatif yang menjaga dan mewariskan nilai-nilai mulia bangsa Indonesia. Kedua adalah dimensi progresif di mana kita harus terus bergerak maju untuk menjawab tantangan secara optimistis berbekal kemampuan yang kita miliki,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga mengajak pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pembangunan pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang bermutu dan merata akan tercapai jika pemerintah daerah turut aktif mendukung dan mengawal implementasi program-program pendidikan di wilayah masing-masing. “Pendidikan yang bermutu dan merata akan tercapai jika Pemda juga turut aktif mendukung dan mengawal implementasi program-program di wilayah masing-masing,” pesannya.

Transformasi Pendidikan Indonesia: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat

Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR RI, dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan menegaskan bahwa pendidikan yang bermutu harus melibatkan seluruh elemen bangsa. “Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha, dan semua pihak yang peduli terhadap



Atip Latipulhayat

masa depan bangsa,” ujarnya dalam sesi diskusi utama.

Hetifah menyoroti pentingnya kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Ia menyampaikan bahwa setiap anak Indonesia harus mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. “Kita harus memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Ini adalah hak dasar yang harus kita perjuangkan bersama,” katanya dengan penuh semangat.

Hetifah juga membahas tantangan dalam tata kelola guru dan status kepegawaian. Ia menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas terkait redistribusi guru ASN ke sekolah swasta dan daerah terpencil. “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kita harus memastikan mereka mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa

DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar guru yang telah lama mengabdikan mendapatkan sertifikasi dan tunjangan yang layak.

Dalam sesi diskusi, Hetifah mendukung percepatan sertifikasi guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru yang telah aktif mengajar sebelum tahun 2023/2024. “Kami di DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar guru yang telah lama mengabdikan mendapatkan sertifikasi dan tunjangan yang layak,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dalam kurikulum nasional. “Pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Kita ingin mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan memiliki nilai-nilai kebangsaan,” jelasnya.

Dengan terselenggaranya Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025, diharapkan pendidikan di Indonesia semakin maju dan mampu menjawab tantangan global. “Mari kita tempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Kualitas pendidikan dan aksesibilitasnya adalah kunci utama,” pungkash Hetifah Sjaifudian.

Mewujudkan Pendidikan Bermutu, Inklusif, dan Berkeadilan

Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, memainkan peran penting dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025. Dalam acara ini, ia menekankan pentingnya partisipasi semesta dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan.

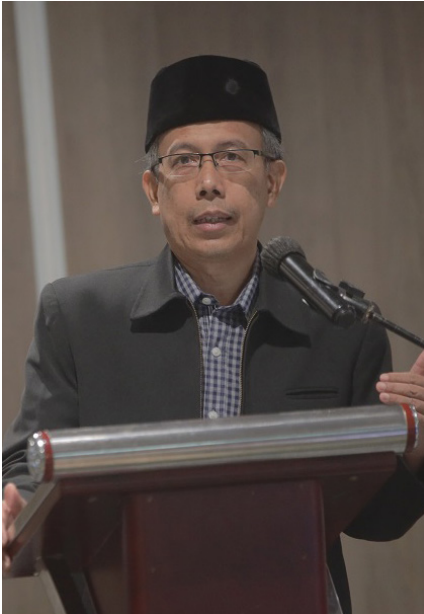
Saat membuka Pameran Pendidikan, Atip menyampaikan bahwa momentum ini bukan hanya sekadar ajang untuk menampilkan

inovasi pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. “Upaya pameran ini harus menghadirkan inovasi dengan memperluas pemerataan akses serta memastikan keadaan bagi seluruh murid tanpa terkecuali,” ucapnya. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan pameran ini diharapkan dapat membangun ruang kolaborasi yang semakin luas serta menciptakan jejaring yang kuat antar unit kerja dalam memperkuat layanan pendidikan dasar dan menengah.

Atip menyoroti bahwa pendidikan adalah fondasi utama bagi masa depan bangsa. Ia menekankan bahwa tantangan pendidikan di masa depan semakin kompleks, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. “Dinamika sosial dalam masyarakat hingga tuntutan dunia kerja global akan menuntut kita untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan membangun karakter murid yang tangguh,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa pendidikan harus mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif.

Selain itu, Atip membahas pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas pendidikan, dan sektor swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak bisa dicapai hanya oleh satu pihak, tetapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa. “Kita harus memperkuat sinergi, mempercepat transformasi, dan meneguhkan komitmen kita dalam menghadirkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” katanya.

Atip juga menyoroti kebijakan strategis Kemendikdasmen, termasuk



Amich Alhumami

redistribusi guru ASN, penguatan kurikulum berbasis teknologi, serta percepatan sertifikasi guru melalui Program PPG bagi Guru Tertentu. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemerataan tenaga pendidik dan meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia.

Pendidikan Berkualitas Masa Depan Indonesia

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, turut berperan dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025, yang berlangsung di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Depok, pada 28–30 April 2025. Dalam acara ini, ia menyampaikan pemaparan mengenai strategi pembangunan pendidikan dalam Rencana Strategis Kemendikdasmen 2025–2029 serta kebijakan pemerataan kesempatan

pendidikan.

Amich Alhumami menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Ia menyoroti bahwa pendidikan yang berkualitas harus berorientasi pada kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. “Kita tidak bisa lagi melihat pendidikan sebagai sesuatu yang statis. Pendidikan harus terus berkembang, menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.

Salah satu poin utama yang ia bahas adalah Wajib Belajar 13 Tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang cukup hingga jenjang menengah atas. “Kita ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Ini adalah investasi jangka panjang

bagi masa depan bangsa,” katanya.

Amich juga membahas pemerataan kesempatan pendidikan, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengalami kesenjangan akses pendidikan. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mendukung distribusi sumber daya pendidikan secara lebih merata. “Kita harus memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Tidak boleh ada ketimpangan yang menghambat anak-anak kita untuk berkembang,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak bisa dicapai hanya oleh satu pihak, tetapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa. “Kita harus memperkuat sinergi, mempercepat transformasi, dan meneguhkan komitmen kita dalam menghadirkan pendidikan yang lebih baik untuk semua,” katanya.

Optimalisasi Anggaran Pendidikan

Diah Dwi Utami, selaku Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memberikan pemaparan mengenai alokasi anggaran pendidikan untuk tahun 2025 serta strategi pendanaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Diah Dwi Utami menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus dikelola secara efektif dan tepat sasaran agar dapat memberikan dampak maksimal bagi peningkatan mutu pendidikan. “Kita tidak hanya berbicara soal jumlah anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut digunakan



Diah Dwi Utami

secara optimal untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan,” ujarnya dalam sesi diskusi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, serta penguatan infrastruktur pendidikan.

Salah satu fokus utama dalam pemaparannya adalah percepatan sertifikasi guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu. Menurutnya, program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional. “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kita harus memastikan mereka mendapatkan pelatihan dan sertifikasi yang memadai agar dapat memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa,” katanya.

Selain itu, Diah Dwi Utami juga membahas strategi pendanaan untuk pemerataan kesempatan pendidikan, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengalami kesenjangan akses pendidikan. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mendukung distribusi sumber daya pendidikan secara lebih merata. “Kita harus memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Tidak boleh ada ketimpangan yang menghambat anak-anak kita untuk berkembang,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak bisa dicapai hanya oleh satu pihak, tetapi harus melibatkan

seluruh elemen bangsa. “Kita harus memperkuat sinergi, mempercepat transformasi, dan meneguhkan komitmen kita dalam menghadirkan pendidikan yang lebih baik untuk semua,” katanya.

Redistribusi Guru dan Reformasi Pendidikan Nasional

Komjen Pol (Purn.) Drs. Purwadi Arianto, M.Si., selaku Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB), turut berperan dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025. Dalam acara ini, ia menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dalam sektor pendidikan, terutama dalam hal status kepegawaian guru, redistribusi tenaga pendidik, serta peningkatan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN.

Purwadi Arianto menegaskan bahwa pendidikan adalah salah satu sektor yang paling membutuhkan reformasi birokrasi yang efektif. Ia menyampaikan bahwa pemerintah

berkomitmen untuk memberikan kepastian bagi tenaga pendidik, terutama dalam hal status kepegawaian dan kesejahteraan mereka. “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kita harus memastikan mereka mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak, serta kepastian dalam status kepegawaian mereka,” ujarnya.

Salah satu isu utama yang ia bahas adalah redistribusi guru ASN ke sekolah swasta dan daerah terpencil. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan tenaga pendidik dan memastikan bahwa semua sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki guru berkualitas. “Kita tidak bisa membiarkan sekolah-sekolah di daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik. Pemerataan guru adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional,” tegasnya.

Purwadi juga menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru yang telah aktif



Purwadi Arianto

mengajar sebelum tahun 2023/2024. Ia menekankan bahwa sertifikasi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga sebagai bentuk peningkatan kompetensi guru agar mereka dapat memberikan pendidikan yang lebih berkualitas kepada siswa. “Kita ingin memastikan bahwa setiap guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional, sehingga mereka dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia juga membahas reformasi birokrasi dalam pengelolaan tenaga pendidik, termasuk penyederhanaan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan. Ia menegaskan bahwa beban administratif yang berlebihan sering kali menghambat efektivitas pengajaran, sehingga perlu ada kebijakan yang lebih fleksibel dan efisien. “Guru harus lebih banyak fokus pada pengajaran, bukan pada urusan administrasi yang berbelit-belit. Kita harus menyederhanakan sistem agar mereka bisa lebih produktif dalam mendidik siswa,” jelasnya.

Selain itu, Purwadi Arianto menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas pendidikan sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berorientasi pada masa depan. “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua anak Indonesia,” pungkasnya.

Mewujudkan Pendidikan Merata

Dr. Paudah, M.Si, selaku Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri, turut



Paudah

berperan dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 dengan menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam acara ini, ia menekankan bahwa koordinasi yang baik antara berbagai tingkat pemerintahan sangat krusial dalam memastikan kebijakan pendidikan dapat diterapkan secara efektif dan merata di seluruh Indonesia.

Dr. Paudah menegaskan bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa standar pelayanan minimal di bidang pendidikan dapat tercapai. “Kita harus memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Tidak boleh ada ketimpangan yang menghambat anak-anak kita untuk berkembang,” ujarnya.

Dr. Paudah juga membahas strategi peningkatan kualitas pendidikan

melalui kebijakan desentralisasi, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam mengelola sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing daerah agar dapat memberikan dampak yang maksimal. “Pendidikan bukan hanya soal kurikulum nasional, tetapi juga bagaimana kita menyesuaikan kebijakan dengan kondisi daerah agar lebih efektif,” katanya.

Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berorientasi pada masa depan. “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua anak Indonesia,” pungkasnya.

PAMERAN KONSOLIDASI NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 2025

Pameran Pendidikan dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 merupakan bagian dari rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Acara ini berlangsung di Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Depok, Jawa Barat, dari 28 hingga 30 April 2025.

Dalam pembukaan pameran, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyampaikan bahwa momentum pameran pendidikan ini bukan hanya sekadar ajang untuk memperlihatkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa pendidikan adalah fondasi untuk masa depan bangsa. “Upaya pameran ini harus menghadirkan inovasi dengan memperluas pemerataan akses serta memastikan keadaan bagi seluruh murid tanpa terkecuali,” ucapnya.

Pameran ini menampilkan berbagai capaian program, inovasi, dan praktik baik dari seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikdasmen. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa tujuan utama pameran ini adalah untuk meningkatkan sinergi antar-unit dalam



memperkuat layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu, merata, dan berkeadilan. “Selain menampilkan capaian, pameran ini juga memperluas inspirasi dan kolaborasi untuk mendukung transformasi pendidikan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Pameran ini melibatkan berbagai unit utama di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM), Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pelatihan Guru (Ditjen GTK & PG), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Ditjen Diksi PKLK), Badan Standar,

Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa).

Selain menampilkan inovasi pendidikan, pameran ini juga menjadi ajang bagi peserta Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah untuk berbagi pengalaman, memperluas jejaring, serta memperkuat komitmen dalam membangun pendidikan dasar dan menengah yang lebih unggul, adaptif, dan berkelanjutan. Harapannya, informasi dan inspirasi yang diperoleh dari pameran ini dapat diimplementasikan di daerah masing-masing untuk mendukung transformasi pendidikan nasional.

DELAPAN REKOMENDASI HASIL KONSOLNAS DIKDASMEN 2025

Selama tiga hari berlangsungnya forum, delapan komisi yang mewakili berbagai daerah dan lembaga pendidikan secara intensif membahas isu-isu strategis di bidang pendidikan dasar dan menengah. Dari diskusi tersebut, forum menghasilkan delapan rekomendasi utama yang diserahkan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti. Dalam pernyataannya, Menteri Mu'ti menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kolektif yang ditunjukkan para peserta Konsolnas dan berkomitmen untuk membahas lebih lanjut rekomendasi yang telah disampaikan guna memastikan implementasi yang tepat sasaran, selaras, dan berkelanjutan.

Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian utama dalam forum ini adalah pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil yang masih kekurangan satuan pendidikan. Emy Rosana Saleh, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara, mengungkapkan bahwa masih terdapat kecamatan yang belum memiliki sekolah dasar atau menengah, sehingga anak-anak di wilayah tersebut kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Ia menegaskan bahwa masalah ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama

untuk belajar.

Selain akses pendidikan, isu lain yang juga menjadi perhatian adalah transparansi dalam penerimaan peserta didik baru. Maryam dari Dinas Pendidikan Serdang Bedagai menyarankan agar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dikunci sesuai dengan daya tampung saat pengumuman pendaftaran siswa baru, guna menghindari ketidakseimbangan dalam distribusi siswa di sekolah negeri. Ia menekankan bahwa penerimaan siswa harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan, serta perlu adanya kerja sama dengan sekolah swasta terakreditasi untuk menampung kelebihan siswa di daerah tertentu.

Dalam bidang tata kelola pendidikan, Taufiq Mursad dari Dinas Pendidikan Gowa menegaskan pentingnya penggunaan Dapodik yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagai dasar utama dalam perencanaan pembangunan dan revitalisasi sekolah. Dengan data yang akurat, kebijakan pendidikan dapat dirancang secara lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Rekomendasi lain yang muncul dalam Konsolnas adalah pemanfaatan rapor pendidikan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Katman dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

NTB menjelaskan bahwa daerahnya telah memanfaatkan rapor pendidikan sebagai instrumen untuk memetakan kesenjangan dalam capaian belajar siswa dan merancang kebijakan intervensi yang lebih terarah. Ia menekankan bahwa penggunaan data berbasis rapor pendidikan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan pendidikan mereka.

Peningkatan kompetensi guru juga menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian dalam Konsolnas ini. Usman dari Dinas Pendidikan Buol menyoroti pentingnya pelatihan guru yang berkualitas dan berkelanjutan melalui kerja sama dengan SEAMEO, Asosiasi Guru Matematika Indonesia, serta komunitas guru di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas guru sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah berjalan secara optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pendidikan di era digital, Pujiyanto dari Dinas Pendidikan Sorong mengusulkan agar pendidikan jarak jauh (PJJ) menjadi kebijakan nasional pada tahun 2026. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan PJJ harus dilakukan secara terstruktur dan interaktif, serta didukung oleh tenaga



pengajar yang memiliki kompetensi di bidang teknologi pendidikan.

Seiring dengan perkembangan sosial dan budaya, Sutarmo dari Dinas Pendidikan Surakarta menekankan perlunya penguatan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional. Ia menyampaikan bahwa pendidikan karakter harus didukung oleh regulasi daerah yang jelas serta melibatkan empat pilar utama, yaitu satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media.

Terakhir, dalam hal literasi bahasa dan sastra, Herawati dari Balai Bahasa Jawa Barat mendorong agar aspek ini diperkuat dalam Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan. Ia juga menekankan perlunya pelibatan

Balai Bahasa dalam distribusi buku bacaan bermutu agar siswa memiliki akses terhadap bahan literasi yang berkualitas.

Konsolidasi Nasional Pendidikan 2025 ini menjadi pijakan awal bagi penyusunan kebijakan pendidikan jangka menengah periode 2025–2029 dengan visi kolektif #PendidikanBermutuUntukSemua.

Menteri Abdul Mu'ti dalam pernyataan penutupnya menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh forum akan dipertimbangkan dengan serius oleh kementerian agar dapat diwujudkan dalam kebijakan yang berkelanjutan. Ia juga menyampaikan harapannya agar seluruh pemangku kepentingan tetap

berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

Forum ini menunjukkan bahwa komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia harus terus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor dan pendekatan berbasis data. Dengan semangat gotong royong dan visi yang jelas, Konsolnas Dikdasmen 2025 menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan dapat menjawab tantangan global di masa depan.

KORUPSI PERTAMINA, DUGAAN PENGOPLOSAN MINYAK OLEH “ORANG-ORANG SENANG”



Rugikan Negara Rp193,7 Triliun

Keluhan masyarakat, terutama para pemilik kendaraan tentang kualitas bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina yang dianggap jelek menjadi awal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina terbuka. Keluhan ini berasal dari warga di Papua dan Palembang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar mengungkapkan bahwa ternyata keluhan tersebut telah mendapatkan respon secara luas oleh masyarakat.

“Inikan pernah mendapatkan respon luas dari masyarakat bahwa mengapa kandungan terhadap Pertamina dinilai kok begitu jelek,” kata Harli mengutip program Sapa Indonesia Malam di Youtube Kompas.

Dengan adanya temuan tersebut, Harli mengaku bahwa pihak Kejagung langsung bergerak melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Harli mengaku bahwa keluhan masyarakat tersebut memang berbanding lurus dengan temuan terkait adanya kenaikan Pertamina hingga subsidi pemerintah yang besar dan dirasa tidak perlu diberikan.

“Ada temuan bahwa karena ada sindikasi yang dilakukan para tersangka, akhirnya negara harus mengemban beban kompensasi dan subsidi yang begitu besar,” jelasnya.

Permen ESDM dan Produksi Minyak Bumi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomo42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam

negeri. Artinya pemenuhan kebutuhan minyak mentah dalam negeri harus dipasok dari dalam negeri, begitu pula dengan kontraktornya yang harus berasal dari dalam negeri.

Namun, tiga tersangka Riva, Sani dan Agus justru melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang.

Hal ini membuat produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Pengkondisian tersebut juga pada akhirnya membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor.

Kemudian, dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang PT Pertamina Patra Niaga diperoleh fakta adanya perbuatan jahat antara subholding Pertamina dengan broker.

Para tersangka mengincar keuntungan dengan memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum.

Terkait hal tersebut, penyidik akhirnya menetapkan beberapa tersangka sebagai berikut:

- Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
- Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
- Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
- Yoki Firnandi selaku pejabat PT Pertamina International Shipping

- Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa
- Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim
- Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
- Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
- Edward Corne selaku VP trading operation PT Pertamina Patra Niaga
- Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar menuturkan selain Riva, Sabi dan Agus yang memegang peran awal, adapula modus dimana mereka melakukan kongkalikong bersama para broker, yaitu Riza, Dimas dan Gading terkait kegiatan ekspor minyak dari KKKS.

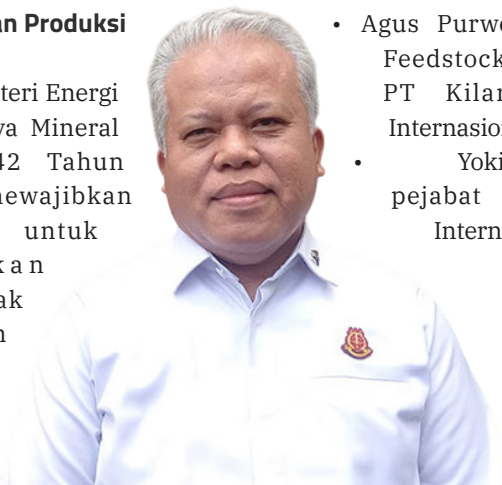
Kongkalikong ini berupa pengaturan harga yang diputuskan dengan melanggar peraturan demi kepentingan pribadi masing-masing.

“Seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan,” jelas Qohar.

Kemudian sederet pelanggaran hukum terus dilakukan ketika Riva, Sani dan Agus memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang.

Selanjutnya, Dimas dan Gading melakukan komunikasi ke Agus untuk memperoleh harga tinggi meski secara syarat belum terpenuhi.

Riva pun melakukan pelanggaran dimana justru membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 90 meski yang dibutuhkan adalah RON 92.



Harli Siregar

Tidak Cuma itu, Yoki pun melakukan *mark up* kontrak dalam pengiriman minyak impor. Kegiatan yang dilakukan Yoki tersebut pada akhirnya membuat negara menanggung biaya fee mencapai 13-15 persen. Namun yang memperoleh keuntungan justru adalah Riza.

Sejumlah tersangka diduga sengaja mengarahkan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara melanggar hukum.

Alhasil, Qohar mengatakan dari rangkaian perbuatan para tersangka ini membuat adanya gejolak harga BBM di masyarakat lantaran terjadi kenaikan.

Pertamina Bantah Dugaan Pengoplosan

Adanya kasus korupsi yang melibatkan para petinggi Pertamina ini, membuat berbagai dugaan liar bermain di tengah masyarakat. Yang paling viral adalah adanya tindakan pengoplosan minyak jenis Pertalite di ubah menjadi Pertamax.

Terkait hal ini, pihak Pertamina memberikan bantahan. Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina, Fajar Djoko Santso membantah adanya tuduhan pengoplosan BBM jenis RON 90 menjadi RON 92.

Fajar menegaskan bahwa Pertamax yang dijual di SPBU telah sesuai spesifikasi RON 92.

“Jadi kalau untuk kualitas BBM, kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen

Abdul Qohar



Migas,” buka Fajar.

“RON 92 itu artinya Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite,” tegasnya.

Dia juga mengatakan bahwa BBM yang beredar di pasaran telah melewati penelitian dan pengujian dari lembaga sertifikasi produk migas, LEMIGAS.

“Jadi di Kejaksaan kalau boleh saya ulang, lebih mempermasalahkan tentang pembelian RON 90-92, bukan adanya oplosan sehingga mungkin narasi yang keluar, yang tersebar, sehingga disinformasi di situ,” tuturnya.

Kerugian Negara yang Disebabkan “Orang-orang Senang”

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa dugaan korupsi Pertamina telah menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Namun menurut Center of Economic

and Law Studies (Celios) kerugian di tingkat konsumen juga tidak kalah mengejutkan.

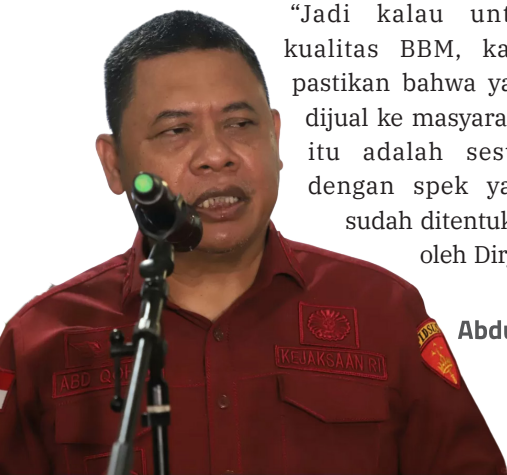
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda menyoroti potensi consumer loss, dimana masyarakat membayar lebih mahal untuk BBM RON 92 yang sebenarnya adalah RON 90. Celios memperkirakan kerugian yang dialami konsumen bisa mencapai Rp47 miliar per hari akibat perbedaan harga kedua jenis minyak tersebut dipasaran.

“Jika dihitung pertahun Rp17,4 triliun,” tuturnya.

Nailul turut mengomentari Pemerintah yang terus saja memproklamirkan

kerugian negara sementara melupakan kerugian yang turut dirasakan oleh masyarakat.

Fajar Djoko Santso



Kasus Korupsi Sulap Pertalite Jadi Pertamax

Pelaku & Dampak	Kasus, Trik Sulap, dan Kerugian
	<p><i>Kasus:</i> Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.</p>
<p><i>Dampak ke Masyarakat:</i> Kepercayaan publik terhadap Pertamina menurun dan beralih ke SPBU Swasta.</p> 	<p><i>Dugaan Trik Sulap Bim Salabim:</i></p>  <p>1L Pertamax + 1L Pertalite = 2L Pertamax</p> <p><i>Kerugian:</i> Rp193,7 Triliun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerugian ekspor minyak mentah: Rp35 triliun • Kerugian impor minyak mentah melalui broker: Rp2,7 triliun • Kerugian impor BBM melalui broker: Rp9 triliun • Kerugian kompensasi 2023: Rp126 triliun • Kerugian subsidi 2023: Rp21 triliun

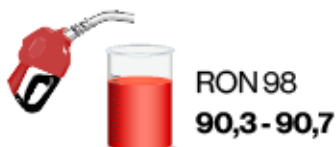
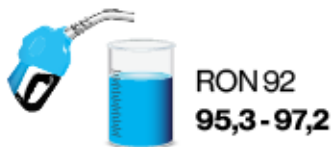
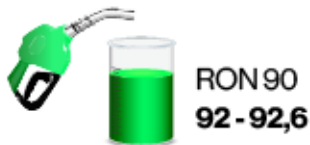
Pemerintah Pastikan BBM sesuai Spesifikasi

Pemerintah memastikan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sesuai spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, berdasarkan pengujian yang dilakukan pada akhir Februari 2025.

Hasil pengujian sampel

Seluruh sampel BBM memiliki nilai RON dalam rentang batasan mutu yang dipersyaratkan.

Rentang dipersyaratkan:



Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
1 Maret 2025

Lokasi pengambilan sampel

Depo Pertamina Plumpang dan 33 SPBU di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan.

Jenis sampel

Bensin dengan angka oktan (RON) 90, 92, 95 dan 98

Waktu pengambilan sampel

27 Februari 2025

Metode pengujian

- Pengambilan sampel dengan metode ASTM D4057 (praktik standar untuk pengujian BBM)
- Pengujian standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar.
- Pemantauan untuk memastikan bahan bakar sesuai spesifikasi.

Parameter uji utama

RON yang menunjukkan kualitas bensin, massa jenis, kandungan sulfur, tekanan uap dan distilasi.

Langkah pemerintah memastikan BBM sesuai spesifikasi



Mengambil dan mengecek sampel bahan bakar secara berkala untuk memastikan kualitas.

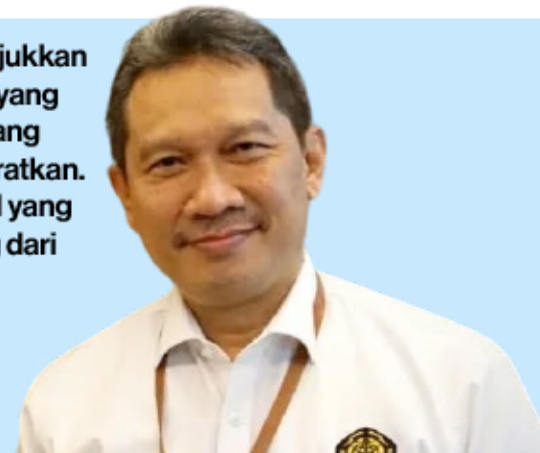


Berkoordinasi dengan Pertamina dan penyedia BBM lainnya untuk menjaga kualitas BBM.



Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa seluruh sampel BBM yang diperiksa berada dalam rentang batasan mutu yang dipersyaratkan. Nilai RON menunjukkan hasil yang stabil dan tidak menyimpang dari spesifikasi yang berlaku.

Mustafid Gunawan
Kepala Lemigas



SUARA GERAKAN ADILI JOKOWI MENGGEMA

Publik menuntut Presiden RI ke-7 Joko Widodo diadili atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Suara rakyat pun menggema di seluruh wilayah Indonesia.

Joko Widodo telah mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Menjadi pemimpin Indonesia selama 10 tahun, Joko Widodo meninggalkan kesan negatif bagi publik yang memiliki sikap kritis terhadap pemerintah.

Di akhir-akhir masa jabatannya catatan hitam pun ditorehkan, Jokowi diduga telah menyalahgunakan kekuasaan untuk memuluskan anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden RI pada Pilpres 2024 dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengubah syarat pencalonan Capres/ Cawapres. Publik pun menduga Jokowi pada saat itu melakukan “cawe-cawe”, alhasil menghantarkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pada Pilpres 2024.

Peyalahgunaan kekuasaan yang telah dilakukan oleh presiden ke-7 RI ini menghantarkan Jokowi sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisir dan korupsi berdasarkan penilaian dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Berdasarkan penilaian ini Jokowi,



Presiden Indonesia 2014-2024 menempati urutan ketiga di bawah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dan William Ruto. Tiga tokoh lain yang masuk daftar adalah Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, dan pengusaha asal India, Gautam Adini.

Meskipun penilaian dari OCCRP menuai pro dan kontra, tapi ini menjadi kabar buruk bagi Indonesia, pasalnya baru pertama kali dalam sejarah mantan Presiden Indonesia masuk daftar tokoh korup OCCRP, konsorsium jurnalis investigasi berdedikasi yang kerap mengungkapkan kejahatan terorganisasi dan korupsi di seluruh dunia.

Vandalisme bertuliskan “Adili Jokowi”

Selama 10 tahun berkuasa, publik menilai Jokowi menoreh catatan buruk untuk negeri ini. Dan

penilaian publik makin diperkuat oleh OCCRP. Kekecewaan publik yang memiliki sikap kritis terhadap Jokowi diekspresikan melalui aksi vandalisme yang bertuliskan “Adili Jokowi”. Dan aksi vandalisme tersebut tidak hanya di satu kota, tapi secara serempak aksi tersebut terjadi di sejumlah kota seperti Jakarta, Surabaya dan Malang.

Tidak hanya aksi vandalisme, gerakan aksi unjuk rasa pun bergema di sejumlah wilayah. Gerakan yang dilakukan sejumlah aliansi masyarakat menuntut agar penegak hukum mengadili Jokowi dan keluarga. Seperti unjuk rasa yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam (FPI) di Jakarta yang menuntut agar aparat penegak hukum segera mengadili Jokowi dan mendesak menindak akun Fufufafa yang ditengarai terkait dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gelombang aksi unjuk rasa juga menggema di kota Surakarta/ Solo oleh kelompok masyarakat yang mena-



makan diri “Gerakan Wong Solo Adili Jokowi” pada Jumat 14 Februari 2025. Dalam aksi demonstrasi ini, peserta membawa bendera mengenakan ikat kepala, serta mengusung poster bertuliskan “Adili Jokowi”.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Ahmad Farid Assegaf, menyampaikan tuntutan agar Presiden RI ke-7 itu segera diadili atas kejahatannya yang telah menyalanggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

“Aksi kami memiliki satu tujuan, yaitu meminta Jokowi ditangkap dan diadili. Karena kami menganggap kesalahannya sudah fatal, merusak demokrasi, merusak konstitusi, bahkan telah merampas negeri ini,” ujar Farid dalam orasinya.

Gelombang aksi demonstrasi juga menggema di Kota Bandung, Jawa Barat. Aliansi masyarakat yang menamakan dirinya Masyarakat Tertindas Jawa Barat (Martin Jabar) berunjuk rasa di depan kantor Polda Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2025. Masa membentangkan spanduk tuntutan seperti “Adili Jokowi”, “Tangkap dan Adili Jokowi”.

Di mobil komando, seorang orator

bernama Irwan membakar semangat para pengunjuk rasa. Menurutnya, rezim Jokowi banyak melakukan kerusakan, dari korupsi hingga kerusakan lingkungan. Salah satunya kasus pagar laut di Bekasi dan Tangerang, Banten. “Kami di sini menuntut keadilan. Aparat kepolisian harus berani menegakan hukum tanpa pandang bulu, siapa pun pelakunya!” tegasnya.

Menanggapi kemunculan coretan ‘Adili Jokowi’ dan aksi demonstrasi di berbagai daerah, Joko Widodo menyatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk ekspresi masyarakat. Maka itu, dia menghargai apa yang mereka suarakan karena itu adalah bagian dari hak demokrasi warga negara.

“Ya itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi,” kata Jokowi di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat 7 Februari 2025.

Saat ditanya apakah dirinya merasa terganggu dengan coretan yang bersifat provokatif, Jokowi hanya diam sejenak dan mengulangi jawaban yang sama. “Ya, itu kan cara mengungkapkan ekspresi,” ujarnya.

Jokowi menduga peristiwa

ini adalah operasi politik yang direncanakan oleh pihak tertentu untuk menurunkan reputasinya. Meski begitu, ia menganggap hal tersebut sebagai wujud hidupnya demokrasi di Indonesia.

Berbedadengan Jokowi, menanggapi aksi vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ aparat setempat bergerak cepat melakukan pembersihan seperti dilakukan di Kota Surabaya. Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengerahkan petugas untuk membersihkan coretan tersebut begitu laporan diterima.

“Kami kerahkan personel dari Satpol PP kota dan kecamatan. Ada tim yang menyisir titik lokasi dan ada juga tim yang melakukan pengecatan,” ujar Fikser pada Jumat 7 Februari 2025,

Vandalisme ini ditemukan di berbagai tempat, termasuk tembok dan seng penutup bangunan di Kecamatan Wonocolo, Wonokromo, Jambangan, Gayungan, Gubeng, Sawahan, Tandes, Genteng, dan Tegalsari.

“Dari hasil laporan personel, kami temukan lebih kurang di 24 titik lokasi dari sembilan kecamatan. Paling banyak di Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Genteng,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa langkah pengecatan ulang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan estetika kota. “Ini sebagai bentuk upaya kami sebagai warga Kota Surabaya untuk menjaga keindahan serta kenyamanan, sehingga kami lakukan pengecatan ulang, mengembalikan tembok kembali bersih,” lanjutnya.

KPK Bergeming

Rakyat berharap gelombang aksi yang menuntut Jokowi dan keluarganya diadili berujung pada proses penegakan hukum yang seadil-

adilnya. Namun, gerakan tersebut tidak mendapatkan respon dari aparat penegak hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini diharapkan sebagai lembaga yang tegas dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga bergeming meskipun telah ada laporan dugaan korupsi yang telah dilakukan oleh Jokowi dan keluarga.

Desakan agar KPK mengusut Jokowi dan keluarganya juga disuarakan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Namun, permintaan Hasto dijawab seolah hanya normatif, yakni KPK meminta agar Hasto segera membuat laporan resmi.

Seperti disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu KPK tidak bisa menindak lanjut apa yang disampaikan Hasto. Karena KPK bekerja berdasarkan aduan resmi dari masyarakat. “Pak HK akan melaporkan Pak Jokowi. Kita tunggu saja. Kita tunggu itu pelaporannya,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sejatinya bisa menjemput bola dengan memeriksa Hasto. Namun, sikap itu melewati prosedur yang berlaku, karena aduan dibuat secara lisan usai Hasto ditahan.

“Apakah akan jemput bola? Ya silahkan. Kalau misalkan kita jemput bola dan nanti disana juga tidak siap, karena laporan itu tidak hanya laporan dalam berbentuk lisan saja. Harus dilengkapi dengan dokumen-dokumennya,” ucap Asep.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh KPK, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai KPK selama ini tidak berani mengusut kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan Keluarga.

Dia mengungkapkan bahwa



pelaporan terkait dugaan korupsi yang telah dilakukan Jokowi sudah sejak lama yakni sejak Jokowi menjabat sebagai Walikota Solo hingga menjadi Presiden ke-7.

Arbi menjelaskan sudah ada laporan dari warga Solo terkait dugaan korupsi Jokowi ketika menjabat sebagai Walikota Solo. Pada pada 2012, warga Solo telah melapor ke KPK tentang kasus dugaan korupsi dana pendidikan dan penjualan Hotel Muliawan yang merupakan aset Pemkot Solo. Namun, katanya kasus-kasus yang dilaporkan tersebut tidak diusut oleh KPK hingga saat ini.

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta kasus dugaan korupsi yang menjerat Jokowi pun sudah dilaporkan oleh masyarakat kepada KPK. Kasus-kasus tersebut di antaranya Pergub soal 17 Pulau Reklamasi, Kasus Bus Transjakarta, dan lain-lain juga tidak diusut oleh KPK. Padahal, kata Muslim Arbi, semua laporan yang masuk ke KPK itu sudah disertai dengan bukti yang lengkap.

“Belakangan laporan soal dugaan gratifikasi Gibran dan Kaesang yang dilaporkan Ubedillah Badrun, laporan tentang kasus Bobby Nasution soal Blok Medan, ekspor ilegal Nikel 5,3 juta ton, belakangan laporan yang dilakukan Abraham Samad dan kawan-kawan

soal PSN PIK 2. Juga laporan TPUA soal ijazah palsu yang menjadi dasar korupsi rezim Jokowi, penggunaan private jet Kaesang Pangarep, dan sebagainya tidak pernah diproses oleh KPK sampai saat ini,” jelasnya.

Banyaknya laporan masyarakat terkait kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya merupakan jalan bagi KPK untuk mengusutnya. Sehingga KPK seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam memprosesnya.

Dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam mengatakan yang menjadi masalah saat ini KPK terlihat hanya diam dan tidak serius menindaklanjuti laporan tersebut.

“Tentu perkara mudah bagi KPK untuk mengusut korupsi di lingkungan Jokowi, jika ada kemauan bukan tidak mungkin akan terkuak kasus-kasus besar yang melibatkan Jokowi atau keluarganya,” kata Anam di Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

Dikatakan Anam, meskipun dalam sejarah belum pernah mengungkap korupsi di lingkaran Presiden, terakhir adalah Soeharto meskipun akhirnya tidak dilanjutkan karena kesehatan yang bersangkutan.

“Kita lihat saja apakah KPK berani, tentu ini adalah sejarah bagi KPK jika yang bersangkutan berani untuk

mengungkap kasus korupsi Jokowi,” kata dia.

Menurutnya, KPK akan dicatat oleh sejarah sebagai satu-satunya lembaga yang berani untuk mengungkap keluarga Presiden. Jika hal tersebut dilakukan, maka KPK akan diapresiasi oleh publik.

“Pintu telah terbuka, karena Jokowi tidak lagi menjabat, terlebih yang bersangkutan telah membuka diri untuk diperiksa, tinggal kemauan KPK untuk merealisasikannya,” pungkasnya.

Harapan ada di Presiden Prabowo

Bergemangnya aparat penegak hukum dan KPK dalam mengusut dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarga menjadi masalah besar dalam upaya mewujudkan keadilan hukum di Indonesia. Maka, masyarakat berharap besar kepada Presiden Prabowo untuk mewujudkan keadilan tersebut.

Maka itu, masyarakat dan para penggiat demokrasi berharap agar Prabowo memutus rantai hubungan dengan Jokowi. Hal itu penting untuk membuat pemerintahan sekarang bebas dari pengaruh dan stigma masa lalu. Dengan demikian, bisa diharapkan Prabowo bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat banyak.

Seperti disampaikan oleh Pengamat Politik dan Ekonomi dari UI-Watch Hasril Hasan, gelombang unjuk rasa dan vandalisme yang bertuliskan “Adili Jokowi” di sejumlah kota merupakan bentuk sinyal sekaligus harapan kepada Presiden Prabowo untuk bertindak menegakan keadilan di Indonesia.

Seruan kepada Prabowo itu disampi oleh banyak kalangan yang melihat bahwa akan berbahaya jika Prabowo membiarkan dirinya masih berada dalam bayang-bayang Jokowi. Tidak kurang, para purnawirawan TNI

menyatakan hal itu. Dalam pertemuan di Jakarta, Ahad lalu, Jubir para purnawirawan Mayjen Purn Sunarko, mantan Danjen Kopassus, menyatakan mereka akan mendukung Prabowo.

Sekitar 1.000 purnawirawan dari tiga matra berpangkat dari kolonel sampai Jenderal akan menyatakan kebulatan tekad mendukung Prabowo. “Dukungan itu diberikan jika dia tidak lagi berada di bayang-bayang Jokowi, tidak memberikan akses kekuasaan kepada Gibran dan meresafel para menteri yang merupakan antek-antek Jokowi,” kata Sunarko waktu itu.

Tetapi, tambah Hasril, itu tentunya tidak mudah dan lancar berlangsung segera. Ada beberapa indikasi Prabowo tidak bisa lepas dari pengaruh Jokowi. Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad, inisiatif meminta Gibran menjadi Wakil Presiden berawal dari Prabowo.

“Dia sampai lima kali meminta ke Jokowi sebelum disetujui. Begitu disetujui maka UU Pilpres yang menyatakan Presiden/Wakil Presiden harus berusia 40 tahun diubah di MK sehingga Gibran yang baru berumur 36 tahun bisa masuk persyaratan. Persetujuan Jokowi itu tentunya dengan berbagai jaminan dari Prabowo,” kata alumni Fakultas Ekonomi UI tahun 1967 itu.

Menurutnya kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak terlepas dari bantuan Jokowi. Dia yang sudah dua kali gagal sebagai Capres melihat bahwa kemungkinan menang harus lewat ulah dan akal bulus Jokowi. Dengan gelontor Bansos yang masif dan permainan di KPU barulah bisa dia menang. Makanya, akan sangat sulit untuk mengharap Prabowo berpaling dari Jokowi.

Dia menduga Prabowo telah disandera oleh Jokowi. Hal itu dapat

terbaca dalam beberapa kesempatan Prabowo tidak henti-hentinya memuji Jokowi sebagai sosok yang berjasa sehingga menghantarkan dia sebagai pemenang pada Pilpres 2024.

“Jika dilihat pernyataan Prabowo di Mukhtar Muslimat NU di Surabaya, Senin, di mana menyatakan bahwa Jokowi adalah guru politiknya maka akan semakin terang dia tidak mungkin lepas dari mentornya itu. Apalagi dia menyatakan bahwa ada orang yang bermaksud memisahkannya dari gurunya dan itu, katanya, tidak mungkin,” kata mantan salah satu direktur di perusahaan minyak itu.

Melihat sikap Prabowo maka harapan masyarakat memperjuangkan keadilan hukum dengan mengadili Jokowi dan keluarganya akan sulit terwujud. Prabowo pun tidak mungkin akan menendang Gibran dari posisi Wapres walaupun tidak punya reputasi dan prestasi apapun. Dan jika ada pergantian menteri pun Prabowo tidak akan menyingkirkan orang-orang yang sangat dekat dengan Jokowi.

“Rasanya Tito, Sigit Listyo, Hasanuddin, Bahlil, Sri Mulyani akan aman. Mungkin yang tidak tertolong asal Budi Arie dan lain-lain yang memang tidak menunjukkan kinerja dan terindikasi korupsi yang saat kuat. Tetapi kita lihat saja. Apakah Prabowo akan mengebrak seperti yang dikoarkoarkannya atau hanya omon-omon seperti biasanya,” kata mantan direktur Tupperware, produsen alat-alat rumah tangga itu.

Walaupun demikian gerakan masyarakat sipil yang menuntut Jokowi ditangkap dan diadil tidak boleh berhenti atas fakta-fakta itu. Jika gerakan itu membesar tentunya Prabowo tidak punya pilihan selain melakukan kehendak rakyat. “Harapan masih ada walaupun kita tidak optimis,” tegasnya.



PARPOL ANTRI TIKET CAWAPRES DI PILPRES 2029

Partai Politik mulai menentukan sikap menghadapi Pilpres 2029. Apakah mengikuti arus dengan berkoalisi mendukung Prabowo sebagai Capres, atau berani melawan arus mengusung kader terbaiknya bertarung melawan Prabowo?

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 masih lama, namun Partai Gerindra secara tiba-tiba memutuskan mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang diselenggarakan secara mendadak di Komplek Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 13 Februari 2025.

Tidak hanya menunjuk Prabowo sebagai Capres 2029, dalam kongres yang diikuti oleh pengurus daerah hingga pusat ini juga memutuskan Prabowo sebagai Ketua Umum dan Ketua Pembina Partai Gerindra untuk periode 2025-2030.

Pengajuan Capres jauh dari gelaran Pilpres 2029 itu tak pelak

menuai sorotan. Pasalnya jalannya pemerintahan Prabowo belum genap empat bulan. Ditambah lagi, gelaran Pilpres juga masih lama atau masih empat tahun lagi.

Selain itu, jika dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya, pengajuan Capres oleh Partai Gerindra ini bisa dibilang paling dini. Kebanyakan Parpol cenderung memutuskan capres-cawapres yang diusung justru mendekati hari-H pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah ini menjadi bagian dari strategi Parpol untuk melihat lawan sebelum mengajukan calon.

Deklarasi dini yang dilakukan Partai Gerindra ini dianggap menjadi strategi untuk mengunci peluang bagi figur-figur lain baik yang berasal dari kader Parpol ataupun figur di luar Parpol seperti Anies Rasid Baswedan yang masih berpotensi menjadi lawan yang sangat diperhitungkan pada Pilpres 2029 mendatang.

KIM tetap solid

Pasca Partai Gerindra memutuskan mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai Capres di Pilpres 2029 dinamika politik nasional terlihat stabil. Paslanya, sejumlah ketua umum Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) terlihat mengikuti arus politik yang sedang dimainkan oleh Partai Gerindra.

Terkesan Parpol yang terbangun dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) terbaca dengan jelas tidak berani melawan arus yakni memunculkan figur-figur baik yang berasal dari kader ataupun non kader.

Misalnya pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono yang secara tegas tetap bersama-sama dengan Partai Gerindra mengawal



pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 mendatang serta mengawal kesuksesan Prabowo pada Pilpres 2029.

Bahkan, katanya KIM bisa dibangun menjadi koalisi permanen yang berarti bahwa mereka akan selalu solid mengawal dan mendukung Presiden Prabowo. "Mengapa solid? Karena Bapak Presiden langsung, Pak Prabowo sendiri yang memimpin koalisi ini," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 18 Februari 2025.

Dia menegaskan bahwa koalisi permanen tersebut bukan hanya gimmick belaka. Ia menjelaskan bahwa Prabowo selalu terbuka untuk melakukan diskusi dengan koalisi. "Bisa dilihat itu bukan gimmick ya, bukan hanya gimmick, tapi pertemuan demi pertemuan, terbuka maupun tertutup, formal maupun informal dilakukan, dan menghadirkan pemikiran, menghadirkan gagasan, mendengarkan masukan, dan ini salah satu indikasi koalisi yang sehat," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menegaskan bahwa koalisi yang ada saat ini memberikan jalan terbentuknya kekuatan politik yang solid.

"Bukan hanya yang penting kita membela apa pun itu yang menjadi kebijakan, tetapi lebih menjadi sebuah rumah bersama yang terbuka dan saling memberikan dukungan, support, masukan, bahkan kritik," katanya.



Respon yang senada juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia tegas akan bersama dengan Presiden Prabowo. Dan Golkar juga siap mensukseskan Prabowo di Pilpres 2029.

“Kado spesialnya kita dukung sampai akhir. Bila perlu lanjut lagi. Bukan hanya saya, DPP Partai Golkar juga. Jadi DPP Partai Golkar sudah memutuskan dalam Munas untuk bersama-sama dengan presiden dan partai koalisi lain dalam mengawal, menjaga, dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Sabtu, 15 Februari 2025.

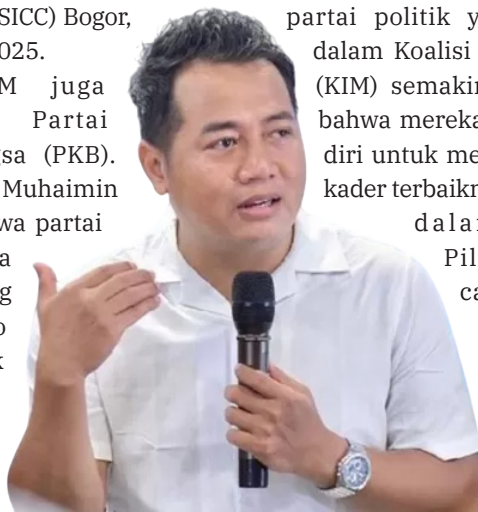
Kesolidan KIM juga ditunjukkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar tegas bahwa partai yang dipimpinnya siap mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk

kembali maju menjadi Capres pada Pilpres 2029. Dia pun tegas sikap partainya akan mendukung Prabowo menuntaskan pemerintahannya hingga 2029.

“Kami memberikan kesempatan Pak Prabowo sesuai dengan periode yang memungkinkan, kalau perlu (selama) 10 tahun,” ujar Muhaimin saat ditemui di acara puncak hari ulang tahun Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Februari 2025.

Berebut tiket Cawapres 2029

Mencermati respon yang disampaikan oleh para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) semakin mempertegas bahwa mereka telah menutup diri untuk mengusung kader-kader terbaiknya berkompetisi dalam gelaran Pilpres sebagai calon presiden.



Adi Prayitno

Sehingga secara langsung mereka akan berebut untuk mendapatkan tiket sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Keputusan KIM solid bersama Prabowo hingga 2029 serta mendukung Prabowo untuk kembali maju secara langsung juga akan semakin mempersempit peluang Gibran Rakabuming Raka untuk kembali dipasangkan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029. Lantas, siapa yang paling berpeluang untuk menjadi pendamping Prabowo? Pertanyaan tersebut saat ini sulit untuk dijawab. Sebab, melihat peta politik saat ini masih kabur.

Pastinya, masing-masing ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju masih memiliki peluang yang sama. Sehingga, mereka akan berebut untuk mendapatkan tiket tersebut.

Meskipun nanti di tengah jalan arah politik berubah, namun setidaknya keputusan saat ini menggambarkan peta dukungan bagi Prabowo Subianto di Pilpres 2029.

Menurut pengamat politik Adi Prayitno dukungan partai politik sejak dini terhadap Prabowo Subianto di Pilpres 2029 tidak hanya mempersempit peluang partai politik mengusung Capres lainnya, namun



ini sangat menguntungkan bagi Partai Gerindra dan Prabowo itu sendiri.

Memang, saat ini Prabowo Subianto berpeluang paling besar memenangkan Pilpres 2029. Dilihat dari kalkulasi, Ketua Umum Partai Gerindra itu secara popularitas dan elektabilitas masih sulit tertandingi. Hal inilah yang menjadi alasan sehingga para ketua partai memutuskan untuk mengikuti arus politik yang sedang dimainkan oleh Partai Gerindra.

Menurut Adi, dengan demikian maka dalam kontestasi Pilpres nanti mereka hanya antri agar dipinang menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto. "Partai-partai saat ini bisa jadi hanya berfokus pada strategi bertahan, bukan melawan," ujarnya lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 16 Februari 2025.

Sehingga, jika ini benar-benar terjadi maka dinamika demokrasi pada Pilpres 2029 tidak begitu keras. Sebab partai-partai terlihat tidak berani melawan arus yakni berani untuk mencon-

ba mencari tokoh alternatif yang siap bertarung melawan Prabowo Subianto.

Namun, dia berharap mendekati Pilpres 2029 nanti akan ada kejutan-kejutan yang tidak pernah kita prediksi. "Kita sering kali melihat politik kita itu penuh kejutan. Bisa saja di 2029 ada partai yang berani menantang langsung Prabowo," ujarnya.

Pertanyaannya kini, apakah akan muncul figur-figur baru yang bisa menjadi rival kuat Prabowo? Ataukah partai-partai hanya berebut tiket sebagai Cawapres Prabowo? Semua masih menjadi teka-teki.

"Siapa tahu misalnya ada partai politik entah itu di koalisi KIM Plus ataupun non KIM berani menantang untuk melawan Prabowo Subianto di pertandingan Pilpres 2029," katanya.

Menurut dengan dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), semua partai politik yang lolos ke parlemen memiliki peluang yang sama untuk mengusung calon mereka sendiri. Maka itu, dia

mendorong partai-partai besar untuk mencalonkan kader terbaik mereka di Pilpres 2029.

Namun, realitas politik sering kali tidak semudah teori. Adi melihat, ada kekhawatiran bahwa partai-partai justru ragu atau bahkan tidak percaya diri untuk menantang Prabowo.

"Partai politik itu nggak punya nyali mungkin, mereka itu sudah underestimate duluan menghadapi Prabowo Subianto, mungkin juga mereka sudah mengkalkulasi, sudah merasa kalah duluan jika harus menghadapi Prabowo," kata Adi.

Meskipun demikian, dinamika politik lima tahun ke depan masih penuh kejutan. Jika partai-partai berani mengambil risiko dan mengusung figur baru, Pilpres 2029 bisa menjadi ajang kompetisi yang lebih kompetitif.

Menurut Adi jika partai politik berani mengusung calon presiden sendiri cenderung mendapatkan keuntungan elektoral dalam pemilihan legislatif (Pileg). Dia menjelaskan fenomena ini dikenal sebagai *cocktail effect*, di mana partai yang mengusung calon presiden dapat mendongkrak perolehan suara mereka di parlemen.

"Secara teori dan praktik politik, partai yang punya jagoan di pilpres pastinya pilegnya itu akan naik," jelasnya.

Saat ini publik menunggu apakah setelah Prabowo Subianto menyatakan akan kembali maju dalam Pilpres 2029 ada partai lain yang berani memunculkan kader mereka sendiri untuk bersaing. Kalau tidak ada yang berani, Adi mengatakan lebih baik partai politik dibubarkan.

"Enggak ada gunanya ada partai kalau dalam pemilu mereka tidak berani mengusung kadernya sendiri," tegasnya.

JOKOWI DAN PRABOWO SULIT DIPISAHKAN

Presiden Prabowo Subianto sulit untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Pekikan 'Hidup Jokowi' mempertebal hubungan mereka masih sangat kuat dan sulit dipisahkan.

Di tengah tuntutan publik yang menggema untuk mengadili Jokowi dan keluarga atas dugaan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Presiden Prabowo Subianto justru seakan memberi sinyal akan memberikan 'perlindungan' kepada Jokowi.

Tuntutan elemen masyarakat dan aksi unjuk rasa Mahasiswa di sejumlah daerah seakan-akan menutup mata pemerintah yang saat ini di bawah kendali Presiden Prabowo. Bukan merespon tuntutan massa tersebut, Prabowo justru mempertontonkan kemesraannya dengan Jokowi.

Pamer kemesraan tersebut sangat jelas terlihat dipertontonkan pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra. Prabowo dan seluruh kader Partai Gerindra yang hadir pada perayaan tersebut memuji-muji Jokowi dengan nyanyian ucapan terima kasih kepada Presiden ke-7 RI itu.

Prabowo awalnya memuji atas keberhasilan Jokowi memimpin republik ini selama dua periode. Menurut Prabowo keberhasilan pemerintahan saat ini berkat dari

kinerja Jokowi di pemerintahan yang lalu.

"Dan saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi," ucap Prabowo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.

Pada saat itulah Ketua Umum Partai Gerindra ini meneriakkan kata "Hidup Jokowi" berkali-kali. Pekikan tersebut disambut oleh seluruh kader partai dengan nyanyian "'terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih Bapak Jokowi". "Hidup Jokowi" tegas Prabowo diikuti lantunan lagu dari para kadernya.

Beberapa saat setelahnya, Prabowo melanjutkan pidato. Ia meminta semua pihak untuk menghormati orang-orang yang telah berjasa dan berbuat baik selama ini. Prabowo pun mengajak masyarakat Indonesia untuk

menghormati para pemimpin terdahulu.

"Itu tradisi kita, itu adat kita, cari kebaikan bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden, semua wapres punya jasa, punya kebaikan, tidak perlu kita ragukan itu," kata Prabowo.

"Apakah mereka punya kekurangan? Punya kekurangan. Apa mereka punya kesalahan? Punya



kesalahan. Tapi mereka telah berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia,” sambungnya.

Pidato yang disampaikan Presiden Prabowo seakan-akan mematahkan harapan dalam penegakan hukum untuk mengadili Jokowi dan keluarga seperti yang disuarakan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat di sejumlah daerah.

Kuatnya Pengaruh Jokowi

Pekikian “Hidup Jokowi” oleh Prabowo mempertegas bahwa hubungan keduanya sangat sulit untuk dipisahkan. Bahkan, publik menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto adalah perwujudan keinginan Jokowi yang gagal menambah menambah masa jabatannya menjadi presiden tiga periode.

Penilaian publik sangat beralasan, pasalnya kabinet pemerintahan Presiden Prabowo diisi oleh para menteri di era Jokowi. Selain itu kabinet Presiden Prabowo juga banyak diisi oleh orang-orang yang dianggap loyal dan dekat dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sehingga publik menilai Kabinet Prabowo tapi rasa Jokowi.

Tidak tanggung-tanggung dari 55 menteri ditemukan sebanyak 24 nama berasal dari Kabinet Indonesia Maju Pimpinan Jokowi. Sehingga jika dipresentasikan hampir 43,64 persen pembantu Prabowo adalah titipan Jokowi.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Majalah *Tempo* intervensi Jokowi dalam penyusunan kabinet di Pemerintahan Presiden Prabowo sangat kuat. Jokowi secara pribadi langsung menitipkan 7 nama yaitu Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Pratikno, Tito Karnavian, Budi Arie Setiadi, Listyo Sigit Prabowo dan Raja Juli Antoni.



Kuatnya pengaruh Jokowi juga dapat dilihat dari sikap Presiden Prabowo yang tidak berani melakukan *reshuffle* terhadap menteri-menteri titipan Jokowi yang tidak memiliki performa baik dan bermasalah dalam menjalankan tugas menjadi pembantu presiden.

Dalam *reshuffle* perdananya publik terkejut Presiden Prabowo hanya mengganti satu menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro yang diganti oleh Brian Yuliarto. Padahal publik menilai menteri titipan Jokowi juga layak untuk di-*reshuffle*.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Center of Economic and Law Studies atau Celios yang bertajuk “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran” memberikan rekomendasi salah satunya terkait lima menteri yang dinilai berkinerja buruk dan layak untuk diganti. Mereka adalah Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Desa Yandri Susanto. Dari

kelima nama tersebut tiga nama yang dianggap sebagai orang titipan Jokowi yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Berdasarkan hasil kajian Celios ini masyarakat kecewa dengan kinerja Budi Arie karena Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi di era pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf itu dalam 100 hari kerjanya dianggap tidak memiliki terobosan dalam pengelolaan koperasi. Sehingga publik memberikan skor minus 61 poin.

Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berada di posisi tiga mendapat nilai minus 41 poin. Responden menilai kinerja Bahlil buruk dan layak diganti karena dianggap gagal memberikan arah yang jelas untuk transisi energi, yang justru berpotensi memperburuk krisis lingkungan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat nilai minus 36 poin. Dia berada di urutan keempat menteri berkinerja buruk dan layak diganti. Mayoritas responden dalam studi Celios mengkritik kinerja Raja

Juli karena dinilai gagal menjawab persoalan deforestasi dan kerusakan ekosistem.

Berbeda dengan penilaian publik, Prabowo justru memberikan pujian kepada seluruh menteri di Kabinet Merah Putih telah bekerja dengan baik. Bahkan pujian tersebut secara khusus ditujukan kepada para menternya yang sebelumnya menjabat sebagai menteri di era Presiden Joko Widodo.

Prabowo mengatakan tidak ada alasan melakukan *reshuffle* kepada para menternya. Dia menyebut para menteri yang pernah bekerja di Kabinet Jokowi memiliki kinerja yang bagus, dibuktikan dengan banyaknya program kerja yang ia resmikan sejak awal tahun ini.

“Menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga kalau sudah timnya bagus ya kenapa harus diganti gitu loh boleh nggak,” katanya saat memberikan pidato di acara peluncuran bank emas di Menara Gade, Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025.

Prabowo menganalogikan menteri seperti sebuah tim, di mana manager boleh berganti, tetapi tim yang baik harus terus dipertahankan. “Manager boleh ganti kalau pemainnya masih baik kita pakai terus ya untuk kemenangan bangsa Indonesia,” kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa para menteri era Jokowi dapat terus bekerja jika mereka mampu beradaptasi dengan kepemimpinannya. “Kalau timnya pemainnya masih bagus ya pakai terus asal kuat gitu kan begitu hehe Kalau nggak kuat ya boleh mundur gitu kan Tapi kayaknya masih kuat nih,” ujarnya sambil tersenyum.

Terjebak Politik Balas Budi

Kemenangan Prabowo Subianto



dalam Pilpres 2024 lalu tidak terlepas dari peran Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI. Publik menduga Jokowi melakukan cawe-cawe untuk memuluskan menghantarkan kemenangan bagi pasangan Prabowo-Gibran.

Jasa Jokowi yang besar itu, sehingga Prabowo terjebak dalam politik balas budi. Sehingga Prabowo pun tidak mudah untuk menentukan kebijakannya, msilanya melakukan kocok ulang kabinetnya meskipun dia telah memberi ultimatum kepada jajaran di Kabinet Merah Putih.

Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, berpendapat Prabowo sudah terjebak dalam politik

balas jasa dengan membentuk kabinet yang gemuk. “Sehingga *reshuffle* itu akan sulit dilakukan, bahkan jika secara terbuka ada menteri yang tidak perform sekali pun,” ujar Dedi di Jakarta Sabtu, 8 Februari 2025.

Meski sudah melewati 100 hari kerja, Prabowo disebut belum mandiri sepenuhnya untuk menavigasi roda pemerintahan. Menurut Dedi, Kabinet Merah Putih terkesan pecah antara kubu Prabowo dan presiden sebelumnya, Joko Widodo, melalui

Wakil Presiden saat ini Gibran Rakabuming Raka, yang notabene merupakan putra sulung Jokowi. Maka dari itu, Dedi menyebut bahwa *reshuffle* kabinet masih menunggu restu dari Jokowi.

Padahal, ia berpendapat bahwa evaluasi para

Dedi Kurnia Syah



menteri merupakan hal mendesak yang perlu dilakukan Presiden Prabowo. Sebab, sudah cukup banyak kondisi tidak konsolidatif yang terjadi antara Prabowo dan para menterinya. Dia mencontohkan, misalnya menteri dari titipan Jokowi yakni Bahlil. Sebagai menteri ESDM dia membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan perintah Prabowo dalam hal eliji 3 kilogram bersubsidi. Keputusan Bahlil soal distribusi gas melon berujung kekisruhan.

Selain itu menteri titipan Jokowi, yakni Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono yang sangat jelas bertentangan dengan perintah Presiden Prabowo dalam masalah pagar laut yang menyedot perhatian masyarakat.

“Menteri KKP (Sakti Wahyu Trenggono) yang berseberangan dengan Presiden soal pagar laut, hingga Menteri PU (Pekerjaan Umum) yang terkesan tidak memahami peta jalan pembangunan dan terancam gagal lanjutkan IKN,” katanya.

Penunjukan Jokowi sebagai penasehat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantaa) sebagai penasehat semakin mempertebal Prabowo sedang menunjukkan politik balas budi. Meskipun penasehat juga diisi oleh mantan presiden yang lain yakni Susilo Bambang Yudhoyo (SBY).

Istana mengatakan penunjukan para mantan presiden sebagai panasehat bertujuan untuk memastikan lembaga ini dikawal oleh tokoh-tokoh berintegritas yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan bangsa.

Menjadi Benalu

Prabowo Subianto, yang kini sedang dalam puncak kekuasaan, memperlihatkan pola hubungan politik dan pribadi yang sarat dengan balas budi. Loyalitasnya kepada Joko Widodo tampaknya lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat yang menuntut keadilan.

Padahal jika melihat lebih jernih Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo ini menyisahkan kerak kotor di pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Jokowi dianggap menjadi benalu bagi pemerintah baru saat ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari bahwa kebijakan yang dibuat Jokowi selama memimpin kemarin membuat pemerintahan Prabowo kalang kabut. “Peran Presiden Jokowi di dalam pemerintahan hari ini yang membuat pemerintah harus menanggung derita dari akibat berbagai kebijakan Presiden Jokowi, meskipun tak bisa dihindari seharusnya Pak Prabowo harus bisa melepas diri dari cengkraman Pak Jokowi,” ujarnya dalam Podcast di YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

Dia merinci kebijakan-kebijakan Jokowi yang menjadi beban pemerintahan Presiden Prabowo., yaitu kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibuat Jokowi menjadi biang masalah dari kekisruhan saat ini. Kebijakan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai gagal namun menghabiskan banyak anggaran.

Meskipun telah menghabiskan dana yang sangat fantastik Jokowi dinilai gagal membangun IKN. Dan kegagalan ini juga berimbas

kepada pemerintahan Prabowo sehingga memaksa melakukan efisiensi anggaran karena negara mengalami defisit anggaran.

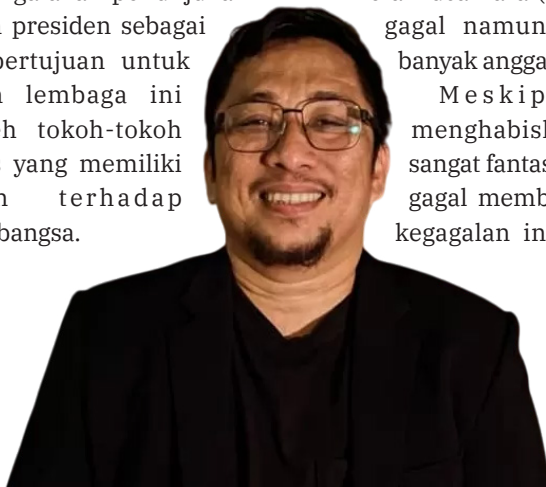
“Suasana itu sudah kita lihat bahwa peranan Pak Jokowi itu sangat luar biasa, dan menimbulkan efek dimana-mana. Misalnya segala proyek PSN, berapa banyak biaya IKN,” ujar Feri.

Feri melihat tidak melihat keberhasilan apa-apa dari proyek yang menelan anggaran negara triliunan rupiah. “Kemarin kita bisa melihat bandara terendam banjir, tidak ada perkembangan signifikan terhadap rencana-rencana itu, sehingga mencekik anggaran kita,” imbuhnya.

Atas dasar inilah, Feri mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo sedang mengalami musibah dan menjadi saran serang oleh masyarakat. Dia menduga saat ini Prabowo sedang kebingungan bagaimana mengatasi persoalan negara di awal kepemimpinannya. Terlebih, tekanan balas budi kepada Jokowi juga menjadi momok bagi Prabowo.

Sebab itulah, Feri tak heran Prabowo membentuk kabinet gemuk yang berisi orang-orang Jokowi. “Bagi saya, inilah yang menjadi musibah bagi pemerintahan kali ini. Mereka juga tertekan dengan situasi, situasinya antara lain juga berkaitan dengan Pak Jokowi, misalnya harus membentuk kabinet gemuk seperti saat ini yang 50 persen orang Pak Jokowi dipindahkan ke orang Pak Prabowo,” ucap Feri.

Menurut Feri, langkah Prabowo yang membentuk kabinet gemuk juga menambah beban keuangan negara yang sudah habis dibabat oleh Jokowi untuk proyek IKN. Sehingga, wajar jika saat ini banyak masyarakat yang merasa kecewa terhadap Prabowo yang tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman Jokowi.



Feri Amsari



INOVASI KEMENHUB TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN

Di bawah kepemimpinan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah meluncurkan berbagai inovasi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi di Indonesia. Salah satu fokus utama adalah persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2025, yang menjadi ujian penting bagi sektor transportasi nasional.

Transformasi Digital di Sektor Transportasi

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya transformasi digital di sektor transportasi. Hal ini untuk meningkatkan pengalaman dan kenyamanan pengguna transportasi umum.

“Inovasi pembayaran nirsentuh menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi

umum yang lebih efisien. Kementerian Perhubungan mendukung penuh transformasi digital pada sektor transportasi, salah satunya dengan diluncurkannya pembayaran berbasis digital seperti QRIS Tap,” kata Dudy Purwagandhi saat menghadiri Peluncuran QRIS Tanpa Pindai (QRIS Tap), di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Menurut Dudy, penerapan Qris Tap di MRT memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa perlu memindai kode QR secara manual. Pengguna hanya cukup mendekatkan perangkat pembayaran ke mesin pemindai dan pengguna langsung dapat mengakses transportasi umum dengan mudah.

“Selain itu, inovasi ini juga mendorong inklusi keuangan serta percepatan digitalisasi di sektor



transportasi dan pembayaran. Digitalisasi pembayaran di transportasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap transportasi publik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Dudy mengimbau seluruh operator transportasi publik untuk segera mengadopsi sistem QRIS Tap. Ini sebagai salah satu upaya berkelanjutan dalam mewujudkan transportasi publik yang lebih modern.

“Penerapan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan layanan transportasi di berbagai daerah. Dengan tetap menjunjung tinggi aspek keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat,” kata Dudy lagi.

Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa perlu memindai kode QR secara manual, cukup dengan mendekatkan perangkat pembayaran ke mesin pemindai. Inovasi ini diharapkan menjadi katalis bagi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Kemenhub juga mendukung pengembangan startup di sektor

transportasi melalui pembentukan Transhub Community. “Kami ingin *startup* transportasi tidak hanya berorientasi pada kapital aset, tetapi juga pada pelayanan yang mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” jelas Dudy. Komunitas ini menjadi wadah bagi akademisi, pelaku startup, dan investor untuk berbagi ilmu dan mencetuskan ide-ide baru yang konstruktif.

Kolaborasi Lintas Sektoral

Kemenhub bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan sumber daya dalam meningkatkan layanan angkutan umum. “Pemerintah pusat tidak bisa sendiri dalam menyelesaikan masalah ini. Harus bersama-sama dengan pemerintah daerah dengan sumber daya yang mereka miliki,” ujar Wakil Menteri Perhubungan Suntuana.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Dudy Purwagandhi untuk membawa

perubahan positif dalam sektor transportasi Indonesia. Dengan berbagai inovasi yang telah diluncurkan, diharapkan masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan efisien selama periode Lebaran dan seterusnya.

Lebaran 2025

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mempersiapkan berbagai inovasi untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, (5/2/2025), menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis telah diambil untuk memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan lancar selama periode Lebaran. Dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang diadakan di Jakarta, Dudy menjelaskan bahwa Kemenhub telah menyiapkan rencana operasi di semua moda transportasi, termasuk darat,

Suntuana





laut, udara, dan perkeretaapian. “Kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat Lebaran. Semua moda transportasi telah kami siapkan dengan matang,” ujar Dudy.

Di sektor transportasi darat, Kemenhub fokus pada kesiapan prasarana jalan dan angkutan umum, serta manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Dudy juga menekankan pentingnya ramp-check terhadap ribuan armada transportasi

untuk memastikan kelayakan operasional. “Keselamatan adalah prioritas utama kami. Semua armada harus melalui uji kelaikan sebelum digunakan,” tegasnya. Hingga 8 Maret 2025, telah dilakukan *ramp-check* terhadap lebih dari 60 persen armada bus, kapal, pesawat, dan kereta api.

Untuk transportasi laut, Kemenhub menerapkan *delaying system* menuju pelabuhan-pelabuhan utama seperti Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. “Kami telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pelabuhan-pelabuhan ini dapat beroperasi dengan optimal selama masa mudik,” kata Dudy. Selain itu, *buffer zone* yang sebelumnya diterapkan pada angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 juga akan diimplementasikan kembali untuk mengurai kemacetan di akses menuju pelabuhan penyeberangan.

Di sektor udara, Kemenhub telah menyusun rencana integrasi aksesibilitas bandar udara serta pengaturan kapasitas slot bandara untuk menghindari penumpukan penumpang. “Kami ingin memastikan

bahwa masyarakat dapat melakukan perjalanan udara dengan nyaman tanpa harus menghadapi antrean panjang di bandara,” jelasnya. Optimalisasi Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta juga dilakukan untuk mencegah penumpukan di Terminal 3.

Sementara itu, di sektor perkeretaapian, Kemenhub melanjutkan pengoperasian *direct train* rute Jakarta-Semarang dan Jakarta-Yogyakarta untuk menambah opsi perjalanan bagi masyarakat. “Kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang paling diminati selama Lebaran. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna kereta api,” ujar Dudy. Pengoperasian Stasiun Karawang untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga menjadi salah satu langkah strategis yang diambil.

Selain itu, Kemenhub mengusulkan agar program mudik gratis dilanjutkan pada angkutan Lebaran 2025. Dudy menilai bahwa program ini perlu dikoordinir dengan baik agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. “Kami ingin memastikan bahwa program mudik gratis ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya. Kebijakan penurunan harga tiket pesawat juga diusulkan untuk diterapkan kembali, seperti yang dilakukan pada periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya.

Dengan berbagai inovasi ini, Kemenhub menunjukkan komitmennya untuk memberikan layanan transportasi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia selama periode Lebaran. Langkah-langkah yang diambil mencerminkan dedikasi Kemenhub dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan efisien.



Mudrik Ceria Penuh Makna

INTERNASIONAL

KEBANGKITAN INDUSTRI ANIMASI TIONGKOK



Masyarakat dunia tidak perlu lagi mengenal raksasa animasi Amerika, seperti Disney dan Pixar, atau anime Jepang dan keahlian mereka dalam bidang ini. Sekarang, setelah *Ne Zha 2* (2025) memecahkan rekor dengan koleksi box office yang luar biasa, inilah saatnya bagi animasi Tiongkok atau donghua untuk menunjukkan potensinya yang belum pernah tersentuh sebelumnya. Bagaimanapun juga, daftar film animasi Tiongkok terbaik ini mencakup permata-permata yang layak untuk dijelajahi.

Untuk itu, penting untuk melihat kembali warisan film animasi Tiongkok. Akarnya berasal ketika animasi Tiongkok sebagian besar digunakan dalam iklan. Secara bertahap, animasi ini masuk ke dalam film pendek, gambar stop-motion, kartun, dan kemudian film panjang. *Princess Iron Fan*

(1941) tidak hanya dianggap sebagai film animasi berdurasi penuh pertama di Tiongkok, tetapi juga merupakan film animasi pertama di seluruh Asia.

Puncaknya terjadi pada tahun 2015 dengan dirilisnya film *Monkey King: Hero is Back* karya Tian Xiaopeng. Film-film berikutnya seperti *Big Fish & Begonia* (2016), *Ne Zha* (2019), *Legend of Deification* (2020) dan *Deep Sea* pada tahun 2023, semakin memantapkan kebangkitan film animasi Tiongkok.

Semuanya menawarkan sudut pandang yang unik tentang budaya Tiongkok, masyarakatnya, dan kecenderungan mereka terhadap mitologi dan fantasi. Meskipun kita telah melihat beberapa film animasi Tiongkok yang populer dan terkenal dalam satu abad terakhir, beberapa di antaranya layak mendapat perhatian khusus karena catatan tonggak sejarah, kerajinan yang mengesankan, dan cerita yang mereka gambarkan.

Dalam hal ini, *Ne Zha 2*, sekuel dari *Ne Zha* yang dirilis pada tahun 2025, adalah contoh yang luar biasa. Menurut laporan CNN pada 14 Februari, film ini merupakan “film terlaris di dunia sepanjang masa dalam satu pasar, dengan penjualan tiket sebesar \$1,4 miliar di Tiongkok sejak dirilis pada 29 Januari.” Dengan ini, film ini menggeser *Star Wars: Episode VII - The Force Awakens* (2015), yang mengumpulkan USD 936 juta di Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 2015.

Selain itu, film animasi Tiongkok ini menandai film non-Hollywood pertama yang menempati posisi di antara 20 film terlaris global sepanjang masa. Pada tanggal 25 Februari, Deadline mencatat pendapatan *Ne Zha 2* mencapai lebih



Princess Iron Fan (1941)



Ne Zha (2019)

dari USD 1,89 miliar, menggeser film animasi terlaris global lainnya *Inside Out 2* (2014) yang mengumpulkan sekitar USD 1,6 miliar.

Film ini telah melewati angka USD 2 miliar dan menjadi film dengan pendapatan tertinggi kelima sepanjang masa, mengungguli film-film seperti *Star Wars: Episode VII - The Force Awakens* dan film Marvel, *Avengers: Infinity War* (2018).

Demikian pula, pada tahun 2023, *Chang An* adalah kisah sukses besar lainnya. Film ini dianggap sebagai film animasi tersukses kedua di Tiongkok di box office domestik setelah *Ne Zha*, sebelum *Ne Zha 2* dirilis.

Faktor Keberhasilan Ne Zha 2

Keberhasilan besar *Ne Zha 2* dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Film ini mengadaptasi mitologi Tiongkok klasik dengan sentuhan modern. Cerita yang kaya akan nilai budaya dan pesan mendalam



Legend of Deification (2020)



Deep Sea (2023)

menarik perhatian penonton dari berbagai generasi.

2. Dengan anggaran produksi sekitar \$80 juta, *Ne Zha 2* menawarkan animasi canggih yang menciptakan pengalaman sinematik luar biasa. Teknologi mutakhir digunakan untuk memperkuat elemen visual sehingga mampu menyentuh emosi penonton.
3. Peluncuran film ini bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek, salah satu momen paling penting di Tiongkok. Liburan ini memberikan kesempatan bagi banyak keluarga untuk menyaksikan film bersama.
4. *Ne Zha 2* tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga simbol kebanggaan nasional. Film ini memperkenalkan mitologi dan tradisi Tiongkok kepada dunia, menjadikannya bagian dari kebangkitan identitas budaya Tiongkok di panggung internasional.

Pesan di Balik Kesuksesan

Kesuksesan *Ne Zha 2* tidak hanya membuktikan keunggulan animasi Tiongkok, tetapi juga menandakan kebangkitan industri film Tiongkok secara keseluruhan. Film ini menjadi pengingat bahwa cerita lokal yang autentik dapat diterima oleh penonton global jika dikemas dengan kreatif dan profesional.

Ne Zha 2 adalah bukti bahwa Tiongkok mampu menciptakan karya animasi yang tidak hanya dapat bersaing dengan produksi Hollywood, tetapi juga mendefinisikan ulang masa depan industri animasi dunia.



DONALD TRUMP DAN SEGALA KONTROVERSINYA

Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2025 tidak hanya membawa gebrakan kebijakan baru, tetapi juga memicu sejumlah kontroversi yang mengundang reaksi keras dari dalam negeri maupun internasional. Periode kedua kepresidenan Trump diwarnai oleh kebijakan-kebijakan yang

dianggap kontroversial, pendekatan yang tidak konvensional, dan gaya kepemimpinan yang polarisasi.

Kebijakan-kebijakannya yang kontroversial, gaya kepemimpinan yang polarisasi, dan pendekatan yang tidak konvensional terus memicu perdebatan dan kritik dari berbagai pihak.

Meskipun Trump mendapat

dukungan kuat dari basis pemilihnya, kebijakan-kebijakannya juga menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan di tingkat global. Dampak dari kepresidenan Trump yang kedua akan terus dirasakan dalam tahun-tahun mendatang, baik dalam hal politik, ekonomi, maupun keamanan global.

Sanksi pada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)

Trump menandatangani perintah yang mengesahkan sanksi ekonomi terhadap ICC. Ia menuduh badan tersebut 'secara tidak tepat menargetkan' AS dan sekutunya, seperti Israel.

Secara rinci, Trump telah menjadi

kritikus vokal ICC dan mengatakan pengadilan telah “menyalahgunakan kekuasaannya” dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang.

“Perilaku jahat ini pada gilirannya mengancam akan melanggar kedaulatan AS dan merusak keamanan nasional yang penting serta pekerjaan kebijakan luar negeri pemerintah AS dan sekutu-sekutu kami, termasuk Israel,” kata Trump.

Mengakhiri kontribusi AS di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR) dan UNRWA

Trump berencana menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR) dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina PBB, UNRWA. Hal ini terjadi setelah pertemuan Trump dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, awal bulan ini

Mengutip Reuters, langkah ini diumumkan langsung oleh seorang pejabat Gedung Putih. Manuver ini sejalan dengan paham Netanyahu, yang telah lama mengkritik UNRWA dengan menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya ‘terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel’.

“Dewan Hak Asasi Manusia secara agresif mempromosikan anti-Semitisme yang ekstrem. Pada saat yang sama, UNRWA telah lama

kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan yang independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok badan kemanusiaan,” ucap Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon.

Selama masa jabatan pertama Trump, dari tahun 2017-2021, ia juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA dengan mempertanyakan nilai dari organisasi itu. Ia saat itu mengatakan bahwa Palestina perlu setuju untuk memperbaiki perundingan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi.

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 negara karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berkantor pusat di Jenewa tersebut. Namun, di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS sempat terpilih kembali dan menjabat untuk masa jabatan 2022-2024.

Pada masa Biden, AS adalah donor terbesar UNRWA dengan menyediakan US\$ 300 juta (Rp 4,9 triliun) - US\$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) per tahun. Namun Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza.

Kongres AS kemudian secara resmi menengguhkan kontribusi ke UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA memberikan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan

warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

Perang Dagang

Trump telah mengobarkan perang dagang terbaru terhadap sejumlah negara. Barang dari Kanada dan Meksiko ‘digebuk’ tarif 25%, yang belakangan ditunda selama sebulan karena ada kesepakatan negosiasi terlebih dahulu.

Lain nasib dengan China, yang tetap dikenakan tambahan tarif 10% yang kembali memanas hubungan kedua negara.

Trump juga mengenakan tarif baru sebesar 25% pada impor baja dan aluminium. Dalam sebuah pernyataan, Trump menyebut tarif ini akan diterapkan ke semua negara.

“Dan sangat sederhana, jika mereka menagih kita, kita menagih mereka,” kata Trump tentang rencana tarif timbal balik tersebut.

Sumber impor baja AS terbesar adalah Kanada, Brasil, dan Meksiko, diikuti oleh Korea Selatan dan Vietnam, menurut data pemerintah dan American Iron and Steel Institute.

Dengan selisih yang besar, Kanada merupakan pemasok logam aluminium primer terbesar ke AS. Logam Negeri Maple pun mencakup 79% dari total impor AS dalam 11 bulan pertama tahun 2024.

Meninggalkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

Trump menandatangani perintah agar AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurutnya, organisasi itu menipu AS selama pandemi Covid-19.

“Kesehatan Dunia menipu kita, semua orang menipu Amerika Serikat. Itu tidak akan terjadi lagi,” kata Trump



Danny Danon

saat penandatanganan. Ia menuduh WHO salah menangani pandemi Covid-19 dan krisis kesehatan internasional lainnya.

Dalam perintah ini, nantinya AS akan meninggalkan WHO dalam waktu 12 bulan dan menghentikan semua kontribusi finansial untuk pekerjaannya. AS merupakan penyokong finansial terbesar bagi badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengganti Nama Teluk Meksiko

Trump memerintahkan Teluk Meksiko untuk diganti namanya menjadi ‘Teluk Amerika’. Ia juga akan mengganti nama Gunung Denali di Alaska menjadi Gunung McKinley.

“Presiden Trump membawa akal sehat ke dalam pemerintahan dan memperbarui pilar-pilar Peradaban Amerika,” tulis sebagian isi perintah eksekutif tersebut.

Mendeklarasikan Keadaan Darurat Perbatasan Nasional

Trump menandatangani perintah di Gedung Putih yang menyatakan keadaan darurat di perbatasan Selatan AS, bersama dengan beberapa kebijakan terkait imigrasi lainnya.

“Semua masuknya imigran ilegal akan segera dihentikan, dan kami akan memulai proses pemulangan jutaan imigran kriminal ke tempat asal mereka,” kata Trump dalam pidato pelantikannya.

Tindakan eksekutif tersebut membuka jalan untuk mengirim pasukan AS ke perbatasan Selatan dan menepati janji kampanye untuk menerapkan kebijakan imigrasi garis keras.

Sementara itu, komunitas imigran di seluruh AS bersiap untuk janji Trump yang akan melaksanakan “program



deportasi terbesar dalam sejarah Amerika”. Program ini pun sudah mulai dijalankan, dengan Trump telah mengembalikan sejumlah imigran ke negara asal seperti India.

Menarik Diri dari Perjanjian Iklim Paris

Trump mengeluarkan tindakan eksekutif yang menarik AS dari perjanjian Paris 2015. Penarikan ini disertai surat yang memberi tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang keputusan tersebut.

“Saya segera menarik diri dari penipuan Perjanjian Iklim Paris yang tidak adil dan sepihak,” kata Trump saat rapat umum di Capital One Arena. Dalam pidato pelantikannya, Trump mengatakan ia akan menggunakan tindakan eksekutif untuk “mengakhiri Green New Deal”.

Pada tahun 2017, Trump keluar dari perjanjian Paris. Setelah menjabat pada tahun 2021, Biden bergabung kembali. Perintah hari Senin tersebut merupakan pemenuhan janji kampanye Trump untuk menarik diri dari perjanjian global tahun 2015 dengan tujuan menghindari dampak

terburuk dari krisis iklim.

Keluar dari perjanjian Paris merupakan bagian dari upaya Trump yang lebih luas untuk mencabut perlindungan dan kebijakan iklim. Trump telah menggambarkan upaya Biden untuk mengembangkan sektor energi bersih AS sebagai “penipuan baru yang ramah lingkungan”.

Mau Caplok Gaza

Presiden juga Trump mengatakan kembali rencananya untuk mencaplok wilayah Gaza. Pencaplokan ini akan dilakukan setelah pertempuran antara Israel dan milisi penguasa wilayah itu, Hamas, berakhir.

Ia mengklaim pengambilalihan oleh AS akan benar-benar membuat warga memiliki “kesempatan untuk bahagia, aman, dan bebas”. Ditegaskannya bahwa AS, akan bekerja sama dengan tim-tim pembangunan yang hebat dari seluruh dunia, untuk perlahan memulai pembangunan Gaza.

“Akan menjadi salah satu pembangunan terbesar dan paling spektakuler dari jenisnya di Bumi. Tidak diperlukan tentara AS! Stabilitas untuk wilayah tersebut akan berkuasa!!!,” tambahnya.

Trump sebenarnya telah mengumumkan usulannya mencaplok Gaza Selasa lalu, dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, pemimpin asing pertama yang menemuinya di Gedung Putih sejak pelantikannya. Ia juga menyerukan relokasi warga Gaza ke negara lain dan sesumbar akan membangunnya kembali menjadi “Rivera Timur Tengah”.

Sementara itu, Trump juga menegaskan rencana ini akhirnya akan mendapatkan persetujuan dari dua negara Arab di wilayah itu, Mesir dan Yordania. Namun hingga saat ini,

baik Kairo maupun Amman masih menolak rencana tersebut.

Lumpuhkan Ekonomi Iran

Trump telah memberlakukan putaran sanksi pertama terhadap Iran, Kamis (6/2/2025). Ini merupakan tekanan pertama Trump setelah kembali ke Gedung Putih dengan tekad untuk melancarkan kebijakan ‘tekanan maksimum’ pada Negeri Persia itu.

Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa sanksi ini ditujukan pada “jaringan minyak” Iran. Tindakan tersebut menargetkan perusahaan, kapal, dan individu yang berafiliasi dengan perusahaan yang telah dikenai sanksi oleh Washington, serta berbagai yuridiksi, seperti China, India, dan Uni Emirat Arab.

“Rezim Iran tetap fokus pada pemanfaatan pendapatan minyaknya untuk mendanai pengembangan program nuklirnya, untuk memproduksi rudal balistik yang mematikan dan kendaraan udara tak berawak, dan untuk mendukung kelompok proksi teroris regionalnya,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.

“AS berkomitmen untuk secara agresif menargetkan setiap upaya Iran untuk mendapatkan pendanaan bagi kegiatan jahat ini.”

Meninjau keanggotaan AS di Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO)

Trump memerintahkan peninjauan ulang terhadap keanggotaan AS di badan kebudayaan PBB, UNESCO. Ia mengatakan hal ini merupakan bentuk sikapnya yang memandang PBB sebagai lembaga yang tidak bekerja dengan efektif.

“Badan ini memiliki potensi besar



dan berdasarkan potensi tersebut, kami akan terus mendukungnya, tetapi mereka harus bertindak bersama-sama,” kata Trump kepada wartawan. “Sejujurnya, badan ini tidak dikelola dengan baik dan mereka tidak melakukan tugasnya.”

“Banyak konflik yang sedang kita tangani seharusnya diselesaikan, atau setidaknya kita harus mendapat bantuan untuk menyelesaikannya. Kita tampaknya tidak pernah mendapat bantuan. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama PBB.”

Pada masa jabatan pertamanya, Trump sempat mengeluarkan AS dari keanggotaan UNESCO karena bias anti Israel. Diketahui, UNESCO memasukan sejumlah tempat yang diklaim Israel menjadi milik Palestina, yang juga merupakan anggota lembaga yang berpusat di Paris itu.

Kemudian, pada masa administrasi Biden, AS kembali menjadi anggota UNESCO setelah secara resmi menerima konstitusi lembaga itu pada 10 Juli 2023.

Tutup USAID hingga Pecat Staf

Trump menutup United States Agency for International Development (USAID) dan ribuan staf badan ini terancam dipecat.

Sejumlah sumber mengatakan pemerintahan Trump hanya akan mempekerjakan 294 staf USAID. Angka ini termasuk 12 staf di biro Afrika dan delapan di Asia, demikian dikutip Reuters, Jumat (7/2).

USAID mempekerjakan lebih dari 10.000 orang di seluruh dunia. Sekitar dua pertiga berada di luar Amerika Serikat.

Salah satu sumber juga mengatakan beberapa staf mulai menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam rilis resmi, USAID juga menyatakan per 7 Februari semua personel yang direkrut badan ini di seluruh dunia dalam masa cuti administratif kecuali personel yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting.



TARIF DONALD TRUMP:

STRATEGI EKONOMI ATAU BENCANA PERDAGANGAN?

Pada awal April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif yang disebut sebagai “Liberation Day” atau “Hari Pembebasan”. Kebijakan ini menetapkan tarif impor terhadap hampir semua negara mitra dagang AS, dengan tujuan meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Trump menyatakan, “Ini adalah

deklarasi kemerdekaan ekonomi kita. Pekerjaan dan pabrik akan kembali bermunculan di negara kita, dan Anda sudah melihatnya terjadi”.

Tarif yang diberlakukan bervariasi, mulai dari 10% untuk sebagian besar barang impor hingga 30% untuk produk dari China, serta 25% untuk barang dari Meksiko dan Kanada. Selain itu, beberapa negara dikenakan tarif timbal balik yang lebih tinggi, seperti Kamboja dengan 49%, Laos

48%, dan Vietnam 46%. Trump berargumen bahwa kebijakan ini akan mendorong konsumen AS untuk membeli lebih banyak produk dalam negeri dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak impor.

Namun, kebijakan ini segera menghadapi tantangan hukum. Pengadilan Perdagangan Internasional AS (CIT) memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dengan menerapkan tarif secara luas

tanpa persetujuan Kongres. Panel tiga hakim menyatakan, “Penerapan tersebut tidak diperbolehkan, bukan karena tidak bijaksana atau tidak efektif, tetapi karena hukum federal tidak mengizinkannya”. Akibatnya, tarif tinggi terhadap produk dari China, Meksiko, dan Kanada dibatalkan, meskipun tarif terhadap mobil, baja, dan aluminium tetap berlaku karena didasarkan pada undang-undang yang berbeda.

Keputusan pengadilan ini memicu perdebatan sengit di Washington. Trump mengkritik putusan tersebut melalui media sosial, menyebutnya sebagai “sangat salah dan sangat politis”. Sementara itu, penasihat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, menyebut keputusan pengadilan sebagai “tantangan yang akan kami hadapi dengan penuh keyakinan”. Pemerintah Trump segera mengajukan banding, dan pengadilan banding federal mengizinkan tarif tetap berlaku sementara proses hukum berlangsung.

Dampak kebijakan tarif ini terasa di berbagai sektor ekonomi. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperingatkan bahwa perang tarif ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global, dengan AS sebagai negara yang paling terdampak. Selain itu, beberapa negara yang terkena tarif tinggi mulai mengurangi ekspor mereka ke AS, menyebabkan lonjakan harga barang impor dan ketidakpastian bagi pelaku bisnis⁶. Data dari Trivago menunjukkan bahwa jumlah wisatawan dari Kanada, Meksiko, dan Jepang yang berkunjung ke AS menurun drastis setelah kebijakan tarif diberlakukan.

Di tengah tekanan hukum dan ekonomi, pemerintahan Trump mulai mempertimbangkan kompromi. Laporan terbaru menyebutkan



bahwa Gedung Putih sedang menjajaki kemungkinan diskon tarif sebesar 15% selama 150 hari sebagai langkah sementara. Seorang pejabat Kementerian Perdagangan AS menyatakan, “Ini adalah langkah taktis untuk mempertahankan posisi negosiasi dan kebijakan ekonomi tanpa melanggar putusan hukum”.

Dampak Kebijakan Tarif Trump

Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump memiliki dampak ekonomi yang luas, baik bagi Amerika Serikat maupun bagi negara-negara mitra dagangnya. Berikut beberapa efek utama dari kebijakan tersebut:

Gangguan Perdagangan Global Tarif tinggi yang dikenakan terhadap berbagai negara menyebabkan ketegangan dalam hubungan dagang.



Negara-negara seperti China, Meksiko, dan Kanada mengalami penurunan ekspor ke AS karena harga barang mereka menjadi lebih mahal. Hal ini memicu respons berupa tarif balasan dari beberapa negara, yang semakin memperburuk situasi perdagangan internasional.

Ketidakpastian bagi Pelaku Bisnis Perubahan tarif yang tiba-tiba membuat banyak perusahaan

kesulitan dalam perencanaan produksi dan rantai pasok. Banyak bisnis harus mencari alternatif sumber bahan baku atau pasar baru untuk menjual produk mereka, yang meningkatkan biaya operasional dan mengurangi keuntungan.

Dampak terhadap Konsumen AS Dengan meningkatnya harga barang impor, konsumen Amerika Serikat menghadapi kenaikan harga untuk

berbagai produk, termasuk elektronik, otomotif, dan bahan makanan. Hal ini berpotensi mengurangi daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik.

Reaksi Pasar Keuangan Keputusan pengadilan yang membatalkan sebagian tarif Trump menyebabkan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama lainnya. Indeks pasar saham juga mengalami lonjakan setelah keputusan tersebut diumumkan, menunjukkan bahwa investor melihat pembatalan tarif sebagai langkah positif bagi stabilitas ekonomi.

Dampak terhadap Indonesia Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak kebijakan tarif Trump, dengan tarif impor sebesar 32% yang dikenakan terhadap produk ekspor utama seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Hal ini mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS dan berpotensi menyebabkan penurunan ekspor serta ancaman pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya.

Strategi Mitigasi Beberapa negara, termasuk Indonesia, mulai mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif ini. Pemerintah Indonesia, misalnya, sedang mempertimbangkan deregulasi impor dan ekspor untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Selain itu, negara-negara ASEAN juga berupaya mencari strategi bersama untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh tarif Trump.

Secara keseluruhan, kebijakan tarif Trump telah menciptakan ketidakpastian ekonomi yang signifikan, baik bagi AS maupun bagi mitra dagangnya.

Respons Dunia

Kebijakan tarif yang diterapkan oleh



Presiden Donald Trump telah memicu berbagai reaksi dari negara-negara di seluruh dunia. Beberapa negara memilih untuk melakukan negosiasi, sementara yang lain mengambil langkah tegas dengan menerapkan tarif balasan.

China bereaksi paling keras terhadap tarif yang dikenakan AS. Pemerintah China menyebut kebijakan ini sebagai pelanggaran aturan perdagangan internasional dan memperingatkan bahwa tindakan Trump dapat memicu perang dagang berskala global. Sebagai tanggapan, Beijing memberlakukan tarif balasan sebesar 34% terhadap produk pertanian AS.

Uni Eropa juga mengusulkan tarif balasan terhadap sejumlah produk yang diimpor dari AS. Para pemimpin Eropa menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum dan diplomasi untuk

mengurangi dampak kebijakan tarif Trump.

Jepang menyebut tarif 24–25% terhadap kendaraan dan suku cadang sebagai “krisis nasional”. Pemerintah Jepang mendesak Washington untuk membatalkan kebijakan sepihak ini dan menyatakan kesiapan untuk membuka ruang negosiasi. Menteri Perdagangan Jepang bahkan menuding langkah tersebut melanggar perjanjian di bawah WTO.

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, memperingatkan bahwa tarif baru Trump akan mengubah sistem perdagangan global secara fundamental. Kanada juga mempertimbangkan langkah-langkah hukum untuk menanggapi kebijakan ini.

Pemerintah Indonesia merespons kebijakan tarif Trump dengan mendorong diversifikasi pasar ekspor.

Indonesia berupaya memperluas kemitraan dagang dengan negara-negara di Afrika dan Asia Timur untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Selain itu, pemerintah juga mempercepat reformasi dan strategi perluasan pasar ekspor sebagai langkah mitigasi.

Secara keseluruhan, kebijakan tarif Trump telah menimbulkan ketegangan dalam perdagangan global. Negara-negara yang terdampak berusaha mencari solusi melalui negosiasi, diplomasi, atau tindakan balasan untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka. Dengan meningkatnya ketidakpastian, dunia kini menunggu bagaimana kebijakan ini akan berkembang dalam beberapa bulan ke depan.

SELAMAT DATANG, PATRICK KLUIVERT!

Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda, kini memulai babak baru dalam kariernya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Penunjukan ini menjadi salah satu langkah strategis Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk meningkatkan performa Timnas Garuda, terutama dalam menghadapi tantangan besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman luas sebagai pemain dan pelatih, Kluivert diharapkan membawa perubahan signifikan dalam sepak bola Indonesia.

Patrick Kluivert adalah salah satu nama besar dalam dunia sepak bola. Sebagai pemain, ia dikenal sebagai striker tajam yang pernah memperkuat klub-klub besar Eropa seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, dan Newcastle United. Di level internasional, ia menjadi

andalan Timnas Belanda dengan mencetak 40 gol dalam 79 penampilan. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2008, Kluivert memulai karier kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih di AZ Alkmaar dan NEC Nijmegen. Ia juga pernah menjadi asisten Louis van Gaal di Piala Dunia 2014, melatih Timnas Curaçao, dan menjabat sebagai direktur olahraga Paris Saint-Germain.

Pengalaman ini menjadikan Kluivert sebagai sosok yang sangat berpengalaman, baik di level klub maupun internasional. Sebelum menerima tawaran dari PSSI, ia sempat melatih Adana Demirspor di Turki. Dengan latar belakang ini, PSSI berharap Kluivert dapat membawa pendekatan profesional dan strategi modern ke Timnas Indonesia.

Sebagai pelatih baru, Kluivert menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satunya adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah target ambisius yang belum pernah dicapai sebelumnya. Selain itu, ia juga harus membangun kembali kepercayaan publik setelah hasil buruk Timnas di Piala AFF 2024, yang menyebabkan pemecatan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong.

Kluivert juga harus menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak, termasuk media dan penggemar. Mantan pelatih Timnas Malaysia, Ong Kim Swee, menyebut bahwa Kluivert berada dalam tekanan besar karena



ekspektasi tinggi yang dibebankan padanya. Selain itu, ia harus segera beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia yang memiliki karakteristik unik.

Untuk mencapai targetnya, Kluyvert telah membentuk tim kepelatihan yang solid. Ia didampingi oleh tiga asisten pelatih asal Belanda, yaitu Alex Pastoor, Denny Landzaat, dan Gerald Vanenburg. Selain itu, ia juga melibatkan pelatih lokal seperti Sofie Imam Faizal sebagai asisten pelatih fisik. Tim ini diharapkan dapat memberikan pendekatan yang lebih profesional dan terstruktur dalam pengembangan pemain³.

Kluyvert juga menekankan pentingnya analisis data dan teknologi dalam sepak bola modern. Ia telah menunjuk Jordy Kluitenberg sebagai analis video untuk membantu menganalisis permainan lawan dan meningkatkan strategi tim. Selain itu, ia juga fokus pada pengembangan fisik dan mental pemain, dengan melibatkan pelatih fisik seperti Quentin Jacoba dan fisioterapis dari Belanda².

Debut Kluyvert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium. Kemudian, Timnas akan menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua laga ini merupakan bagian dari ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C zona Asia.

Untuk persiapan, Kluyvert telah memanggil sejumlah pemain diaspora Indonesia yang berkariir di luar negeri. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas skuad dan memberikan pengalaman internasional yang lebih luas kepada tim. Selain itu, ia juga fokus pada pengembangan pemain muda, dengan harapan dapat menciptakan regenerasi yang berkelanjutan dalam sepak bola Indonesia.

Penunjukan Kluyvert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia disambut dengan antusias oleh banyak pihak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pemilihan Kluyvert didasarkan pada pengalamannya yang luas dan kemampuannya dalam mengembangkan pemain muda. Selain itu, kehadiran pelatih lokal dalam tim kepelatihan juga diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi dan memberikan



kontribusi positif bagi pengembangan sepak bola Indonesia.

Namun, perjalanan Kluyvert tidak akan mudah. Ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu membawa perubahan nyata dalam waktu yang relatif singkat. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan penggemar, Kluyvert memiliki peluang besar untuk menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.

Patrick Kluyvert adalah sosok yang tepat untuk memimpin Timnas Indonesia menuju era baru. Dengan pengalaman dan pendekatan profesionalnya, ia diharapkan dapat membawa Timnas Garuda ke level yang lebih tinggi. Meskipun tantangan yang dihadapinya sangat besar, dukungan dari berbagai pihak memberikan harapan bahwa Kluyvert dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kini, semua mata tertuju pada debutnya melawan Australia dan Bahrain, yang akan menjadi ujian pertama bagi pelatih asal Belanda ini.

Harapan PSSI

PSSI secara resmi mengumumkan penunjukan Patrick Kluyvert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada Januari 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan, “Kami percaya pengalaman dan visi Patrick



Kluivert akan membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026.”

Dalam pernyataan resminya, PSSI menegaskan bahwa Kluivert akan didukung oleh tim kepelatihan yang terdiri dari asisten pelatih asal Belanda dan pelatih lokal. “Kami ingin memastikan bahwa kolaborasi antara pelatih asing dan lokal dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan sepak bola Indonesia,” ujar



Arya Sinulingga, anggota Komite Eksekutif PSSI.

Patrick Kluivert sendiri menyampaikan antusiasnya dalam memimpin Timnas Indonesia. “Saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Saya yakin dengan potensi besar yang dimiliki para pemain Indonesia,” katanya saat diperkenalkan kepada publik.

Debut Kluivert akan dimulai dengan pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium, diikuti oleh laga melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. “Kami berharap hasil positif dari pertandingan ini dapat menjadi awal yang baik bagi era baru Timnas Indonesia,” tambah Erick Thohir.

Prabowo dan Piala Dunia

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk mendukung sepak bola Indonesia dan membawa Timnas ke Piala Dunia. Dalam peresmian 17 stadion berstandar internasional di Sidoarjo, Jawa Timur, ia menyatakan, “Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita.”

Prabowo juga menyoroti bahwa keberhasilan sepak bola tidak hanya bergantung pada kekayaan suatu negara. “Banyak negara miskin, negara-negara di Afrika, mereka bisa masuk ke Piala Dunia. Mereka enggak punya lapangan sebegus ini. Mereka jauh lebih miskin dari kita, tetapi semangatnya tak mau kalah,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur olahraga, seperti stadion dan lapangan sepak bola di sekolah-sekolah, untuk mendukung pengembangan sepak bola nasional. “Yang penting kehendak dulu, keinginan dulu. Berani dulu. Nanti langkahnya akan tercapai,” tambahnya.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk PSSI, yang juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia melalui berbagai program, seperti naturalisasi pemain dan pengembangan pemain muda. Dengan tekad dan dukungan ini, Prabowo berharap Indonesia dapat mencetak sejarah baru di dunia sepak bola.

Patrick Kluivert Pelatih Timnas Garuda

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) berencana menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong yang diberhentikan pada Senin (6/1), Mantan pemain timnas Belanda itu akan melatih Skuad Garuda selama dua tahun.

Patrick Stephan Kluivert

Kelahiran


Amsterdam,
Belanda, 1 Juli 1976


Usia


48 tahun


Karir klub

 **Ajax Amsterdam**
(1994-1997)

 **AC Milan**
(1997-1998)

 **Barcelona**
(1998-2004)

 **Newcastle United**
(2004-2005)

 **Valencia**
(2005-2006)

 **PSV Eindhoven**
(2006-2007)

 **LOSC Lille**
(2007-2008)

Prestasi


 **Liga Champions**
bersama Ajax Amsterdam
(1994/1995)


 **Trofi La Liga**
bersama Barcelona
(1998/1999)


 **Trofi Eredivisie**
bersama Ajax Amsterdam
(1994/1995 dan 1996/1996)

 **Trofi Eredivisie**
bersama PSV Eindhoven
(2006/2007)

Karir kepelatihan

 **Jong Twente** (2011-2012)

 **Timnas Curacao** (2015-2016 dan 2021)

 **Adana Demirspor, Turki** (2023)

Fakta menarik Patrick Kluivert

Dinobatkan sebagai salah satu legenda sepak bola Belanda.

Merupakan pencetak gol terbanyak ke-4 dalam sejarah timnas Belanda dengan torehan 40 gol dari 79 pertandingan.

Pada tahun 1995 di usia 19 tahun meraih gelar Dutch Football Talent of the Year.

“

Salah satu kandidat adalah Patrick Kluivert. Nanti akan tiba di Indonesia pada 11 Januari 2025, dan pada 12 Januari akan ada wawancara dengan media.

Erick Thohir Ketua Umum PSSI



KORUPSI? SIAPA TAKUT!

Oleh: Amir Fiqi,
penulis adalah pemerhati sosial dan politik, pendidik di SMA
Muhammadiyah 04 Kota Tangerang, Banten.

Berbicara soal kasus korupsi di Indonesia sudah masuk pada level sangat mengkhawatirkan. Ibarat penyakit kanker sudah masuk ke tahap stadium empat. Jika tidak keinginan yang sungguh-sungguh memberantasnya maka Indonesia akan menjadi negeri surganya para koruptor.

Bahkan, korupsi sudah menjadi budaya di bangsa ini. Praktik perilaku korup tidak hanya di kalangan pejabat negara, bahkan rakyat kecil pun memandang perilaku korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Aksi suap menyuap marak terjadi di semua level. Bahkan ada ungkapan yang sering kita dengar “Ada fulus segala urusan mulus”. Ungkapan itu

menggambarkan korupsi telah mendarah daging di negeri ini.

Kasus korupsi terjadi hampir di setiap rezim yang berkuasa di negeri ini. Dari rezim Sukarno sampai saat ini di rezim pemerintahan Presiden Prabowo. Dan jika melihat perilaku korup para pejabat ini telah menerabas batas kemanusiaan. Di tengah kondisi rakyat yang mengalami kesulitan untuk bertahan hidup, para pejabat di negeri tanpa rasa malu berjamaah merampok uang negara. Dan angkanya sangat fantastik tidak lagi miliaran tapi hingga triliunan rupiah.

Kasus korupsi terbaru di Pertamina yang membuat publik geram saat Kejaksaan Agung merilis potensi kerugian negara dari kasus

korupsi Pertamina mencapai Rp193,7 triliun. Di media sosial, beredar meme klasemen liga korupsi di Indonesia, yang menempatkan korupsi Pertamina di papan kedua setelah PT Timah. Kejaksaan menyebut, potensi kerugian itu berdasarkan taksiran tahun 2023. Jika pola korupsi berlangsung selama 2018-2023, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp968,5 triliun, hampir 1 kuadriliun.

Publik marah karena membayangkan uang sebanyak itu masuk ke kantong pribadi para pejabat Pertamina dan mitra usahanya. Mereka menikmati duit haram itu dengan cara merugikan konsumen yang membeli BBM dengan kualitas 'oplos.'

Sederet kasus korupsi yang angkanya mencapai triliunan rupiah adalah kasus korupsi di PT Timah Rp300 triliun, BLBI Rp138 triliun, Duta Palma Rp78 triliun, PT TPPI Rp37 triliun, PT Asabri Rp22 triliun, PT Jiwasraya Rp17 triliun, Kemensos Rp17 triliun, Garuda Indonesia Rp9 triliun, BTS Kominfo Rp8 triliun, dan Bank Century Rp7 triliun.

Jika sebut satu per satu masih sangat banyak kasus korupsi di Indonesia baik yang menjerat para pejabat yang duduk di lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Sungguh, masif korupsi di negeri ini, jadi apa yang pernah diungkapkan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2018 bahwa Indonesia Bubar bukan sekadar kata-kata, tapi bisa saja terjadi karena para pejabat di negeri menjadikan korupsi sebagai budaya.

Indonesia Bangkrut

Korupsi yang terjadi ugal-ugalan di republik ini akan membawa bangsa ini pada kehancuran. Kehancuran tersebut diawali dengan kebangkrutan, dan yang paling tragis dan tentunya tidak menjadi harapan kita, bangsa ini hanya tinggal dalam catatan sejarah.

Sebagai anak bangsa pastinya memiliki harapan yang besar Indonesia akan terus ada. Bahkan jika boleh meminta kepada Tuhan Republik Indonesia tetap berdiri kokoh hingga satu hari sebelum dunia ini kiamat.

Jika kita menoleh ke sejarah bangsa ini, kehancuran suatu negara atau organisasi disebabkan karena korupsi. Misalnya, kongsi

dagang yang dimiliki Belanda, VOC yang berdiri pada tahun 1602 awalnya adalah kongsi dagang yang besar namun karena karakusan para pejabatnya dan perilaku korupnya membawa VOC pada kebangkrutan, dan akhirnya kongsi dagang tersebut bubar pada tahun 1799.

Seperti yang ditulis dalam catatan Thomas B Ataladjar dalam buku "Toko Merah Saksi Kejayaan Batavia Lama di Tepian Muara Ciliwung" yang dikutip Kompas.com, Thomas menggambarkan bagaimana tingginya gaji dan gaya hidup yang hidon dilakukan oleh para pejabat VOC. Seperti Gubernur Jenderal VOC legendaris, Jan Pieterszoon Coen, tercatat menerima gaji 700 gulden/bulan ditambah "uang meja" sebesar 1.000 gulden selama setahun. Itu di periode jabatan pertama. Saat dia kembali diangkat, gajinya mengalami peningkatan menjadi 1.200 gulden/bulan plus "uang meja" 200 gulden/bulan serta makanan dari persediaan makanan milik VOC. Persediaan makanan itu misalnya, anggur, bir Belanda, daging babi dan sapi, mentega, beras, dll. Tentu saja gaji gubernur jenderal setelah Coen semakin tinggi seiring dengan makin makmurnya VOC. Penghasilan tambahan di luar gaji juga lebih banyak.

Tingginya gaji yang didapatkan ternyata tidak membuat mereka puas. Jika tak ada penghasilan tambahan (baca: korupsi) maka sang gubernur jenderal tak mungkin bisa menyimpan banyak. Singkatnya, hidup susah.

Kejatuhan VOC tak lain akibat sifat rakus para petingginya hingga korupsi merajalela dan tak tertahankan. Jual beli jabatan empuk dan basah kepada sahabat dan kerabat dekat biasa dilakukan sang gubernur VOC. Bayangkan, untuk sebuah jabatan, calon pejabat harus setor kontan 50.000 gulden ditambah 7.000 ringgit/bulan. Alhasil, ketika seseorang mendapat jabatan maka ia berusaha untuk mendapat jumlah dua kali lipat dari yang sudah ia keluarkan.

Caranya? Penyelewengan dan pemerasan. Untuk jabatan kepala, bisa memberi 50.00 gulden/tahun ke gubernur sebagai balas jasa. Pemegang hak pungut pajak Tionghoa, khususnya pajak judi, turut menyumbang kekayaan ke gubernur jenderal. Demikian pula tukang lelang di Batavia



yang jadi penyumbang isi kocek sang gubernur VOC.

Membaca mentalitas petinggi VOC sekian abad lalu, sepertinya sudah tak asing lagi pada keadaan yang sesungguhnya di masa Indonesia saat ini. Pejabatnya hidup hidon dan rakus. Meskipun sudah mendapatkan gaji yang tinggi pejabat di negara ini masih melakukan korupsi.

Kita juga bisa mengambil contoh yang lain bagaimana korupsi menjadi ancaman besar bagi bangsa ini. Banyak negara yang runtuh akibat tindak pidana korupsi yang terjadi secara masif, sistematis dan terorganisir.

Kebangkrutan Sri Lanka disebabkan oleh ketidaksanggupan negara itu dalam membayar utang negara yang sudah jatuh tempo hingga lebih dari Rp700 triliun. Ketidaksanggupan tersebut berawal dari faktor domestik, salah satunya adalah salah urus/mismanagement selama bertahun-tahun dan korupsi yang semakin menggila di negeri Ceylon itu.

Mismanajemen dan korupsi membawa Sri Lanka pada krisis yang luar biasa yakni krisis pangan dan energi. Pemandangan antrian bahan bakar minyak (BBM) sering dijumpai di semua daerah.

Hal yang sama juga dialami oleh Zimbabwe, negara yang pernah menjadi lumbung pangan di Afrika ini mengalami kebangkrutan, salah satu penyebabnya adalah korupsi yang merajalela di negara itu.

Tentunya masih banyak contoh, namun apa yang penulis sebutkan setidaknya menjadi bahan renungan kita bahwa korupsi merupakan ancaman yang sangat membahayakan bagi negeri ini. Maka itu, tindak pidana korupsi sudah seharusnya sudah menjadi musuh bersama bagi bangsa ini. Kalau ini terus dibiarkan, apa yang pernah dikatakan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2018 itu bisa saja terbukti yakni Indonesia Bubar pada tahun 2030.

Sudah saatnya, jangan omon-omon

Menggilanya kasus korupsi di Indonesia tidak akan selesai jika tidak ada dibarengi dengan kemauan politik atau political will yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Prabowo pernah memberikan sinyal komitmennya dalam memberantas korupsi di Indonesia dengan menyatakan siap mengejar koruptor hingga ke wilayah yang paling terpencil di dunia demi menegakan keadilan dan memastikan tidak ada tempat yang aman bagi para koruptor di Indonesia.

“Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu saat memberikan sambutan penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra pada Sabtu, 31 Agustus 2024.

Pernyataan itu bukan pertama kali Prabowo sampaikan. Pada 2019 saat dia mencalonkan diri sebagai calon presiden. Prabowo menyampaikan hal sama di acara “Stadium General Renaisans Indonesia” di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. “Saya akan mencari bukti. Dan saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Bahkan ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar” tegasnya dalam pidatonya yang diunggah di kanal resmi Gerindra TV pada

Jumat, 8 Maret 2019.

Dalam pidato tersebut, Prabowo menyoroti betapa kronisnya kondisi bangsa ini akibat praktik korupsi yang merajalela di berbagai lapisan pemerintahan. “Negara ini sudah sakit. Korupsi sudah luar biasa buruknya. Setiap lapisan korupsi. Betul tidak?” ujarnya.

Prabowo juga pernah mengulangi komitmen ini dalam acara buka puasa bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 25 Maret 2024.

Prabowo kembali menegaskan pemerintahannya tidak akan berkompromi dengan korupsi. “Kami akan menutup semua kebocoran, kita berusaha meminimalkan korupsi, dan saya ingatkan pemerintahan yang saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi,” ucapnya.

Saat ini Prabowo telah mendapatkan mandat dari rakyat yakni sebagai Presiden ke-8 RI. Sudah saatnya dia menjalankan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau tidak komitmen yang pernah dia sampaikan dengan berapi-api hanya “omon-omon” belaka.

Atau apa yang dia ucapkan saat kampanye itu hanya untuk menjaring dukungan dengan membranding dirinya sebagai sosok yang tepat untuk menyelamatkan Indonesia dari korupsi yang semakin menggila di Indonesia.

Harapan rakyat saat ini untuk membersihkan korupsi di Indonesia ada di tangan Presiden Prabowo. Semoga dengan kekuasaannya yang besar itu dia memiliki political will yang kuat dengan membuat peraturan-peraturan yang bisa memberikan efek jera bagi para koruptor.

ApayangbisdilakukanPrabowosebagai bentuk komitmen membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi. Menurut The Asian Post Research, Prabowo bisa melakukan empat langkah yaitu, pertama, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk mengembalikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintahan Jokowi nyata-nyata telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK dilakukan

pada 2019 yang telah mencederai rasa keadilan publik karena menguntungkan koruptor, mafia peradilan, oligarki, dan pebisnis yang tidak patriotik. Jokowi pernah berjanji akan mengeluarkan Perppu namun ingkar janji sampai lengser dari kursi presiden.

Dua, mengeluarkan Perppu yang mewajibkan semua pegawai pemerintah dari lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif, untuk mengisi Laporan Harya Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara benar dan bisa diperiksa bukti kewajarannya kemudian bisa disita hartanya apabila tidak bisa dibuktikan kewajarannya. Perppu bisa menjadi jalan keluar untuk merevolusi mental para penyelenggara negara yang tidak dikenai sanksi hukum serta belum ada undang-undang (UU) Pembuktian Terbalik.

Tiga, membuat peraturan melalui menteri keuangan yang mewajibkan audit tahunan semua perusahaan yang berpotensi melakukan transfer pricing diaudit oleh auditor eksternal untuk mendapatkan status “wajar tanpa syarat”. Hal itu akan menutup kebocoran penerimaan negara sehingga neraca transaksi berjalan dan APBN akan positif, cadangan devisa meningkat, dan stabilitas nilai tukar terjaga dengan baik.

Empat, membuat Keputusan Presiden (Keppres) yang mewajibkan semua kementerian dan badan negara termasuk lembaga pemerintahan daerah melakukan perencanaan dan anggaran yang dikonsolidasikan di bawah lembaga perencanaan dan anggaran pusat, kemudian dimonitor secara ketat baik jadwal maupun pengeluaran-pengeluaran biayanya.

Empat tindakan tersebut akan membangun keyakinan publik bahwa Presiden Prabowo akan mampu mewujudkan ambisinya dengan menghilangkan penyakit utama yang diidap oleh perekonomian yaitu korupsi.

Masyaakat menanti keberanian Presiden Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika komitmen itu tidak dijalankan maka Indonesia akan tetap menjadi surga bagi para koruptor. Sehingga, di republik ini para pejabatnya tidak takut melakukan korupsi, Korupsi Siapa Takut?

FILM

FILM ANIMASI “JUMBO”: TONGGAK BARU INDUSTRI ANIMASI INDONESIA

“Jumbo” adalah film animasi Indonesia yang disutradarai oleh Ryan Adriandhy dan diproduksi oleh Visinema Studios. Film ini dirancang untuk menjadi salah satu karya animasi terbaik Indonesia, dengan ambisi besar untuk bersaing di pasar global.

“Jumbo” mengisahkan perjalanan seorang

anak laki-laki bernama Don, yang sering diremehkan karena tubuhnya yang besar. Don bertekad membuktikan dirinya dengan mengikuti pertunjukan bakat, di mana ia ingin menampilkan sandiwara panggung yang terinspirasi dari buku cerita peninggalan orang tuanya. Namun, buku tersebut dicuri oleh seorang perundung, dan Don



Joko Anwar

bertemu dengan Meri, seorang anak dari dunia lain yang membutuhkan bantuannya untuk menemukan orang tuanya. Petualangan ini mengajarkan Don tentang keberanian, persahabatan, dan penerimaan diri.

Film ini melibatkan lebih dari 400 kreator animasi Indonesia dan membutuhkan waktu lima tahun untuk diselesaikan. Ryan Adriandhy, yang juga seorang komika, menyatakan, “Kami ingin menghadirkan petualangan yang bukan hanya seru, tapi juga menyentuh hati. Jumbo adalah tentang keberanian, impian, dan persahabatan, sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua umur.”

Film ini menampilkan jajaran pengisi suara ternama, termasuk Ariel Noah, Bunga Citra Lestari, dan Cinta Laura. Ariel Noah, yang mengisi suara Ayah Don, mengungkapkan tantangannya dalam proses ini. “Saya enggak tahu ya, awalnya, *voice over* itu

Herry Budiazhari Salim

apa. Gimana cara supaya suara saya yang khas. Tapi saya pertama kali, ya pasti ada latihannya,” kata Ariel. Ia juga menambahkan, “Seru, banyak hal baru, nggak semudah yang dibayangkan. Jadi pengalaman baru banget, gue perlu banyak belajar lagi.”

Cinta Laura, yang juga menjadi pengisi suara, menyatakan, “Film ini mengandung pesan yang sangat indah dan kuat. Apapun yang terjadi, mau kita bisa mencapai mimpi atau tidak, tetapi pada akhirnya yang paling penting adalah keluarga, teman-teman, dan orang-orang di sekitar yang benar-benar mengenal siapa diri kita sebenarnya.”

Reaksi dari Industri Perfilman

Joko Anwar, sutradara ternama Indonesia, memberikan apresiasi tinggi terhadap film ini. “Nontonnya aja bangga, apalagi bikinnya,” ujarnya. Sementara itu, aktor Reza Rahadian menyebut film ini sebagai tonggak penting dalam perkembangan industri animasi Indonesia. “Ini bukti bahwa kita punya talenta dan bisa menghasilkan karya yang luar biasa,” katanya.

Ambisi Global

“Jumbo” tidak hanya dirilis di Indonesia tetapi juga di 17 negara, termasuk beberapa negara di Eropa, Turki, Mongolia, dan Rusia. Produser eksekutif Herry Budiazhari Salim menyatakan, “Kami ingin menunjukkan ke dunia bahwa animator kita itu keren-keren, dan mampu menciptakan visual storytelling yang berkualitas tinggi. Harapannya, Jumbo bisa membuka kotak pandora bagi industri animasi Indonesia.”

“Jumbo” adalah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri animasi. Dengan cerita yang menyentuh, visual yang memukau, dan dukungan dari berbagai pihak, film ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.

MELIHAT INDONESIA DARI KACAMATA PEREMPUAN

Rumah-rumah dinding kayu yang beratapkan genteng dan ijuk bertebaran dalam jarak ratusan langkah jauhnya. Wajar saja desiran udara pagi ini gemericiknya dingin menusuk. Desa yang sangat rimbun dan hijau pepohonan, rasanya sebentar lagi matahari akan segera sapa hangatkan semesta bumi, kabut tipis pun mulai mendekat, lebih dekat.

Pagi ini tampak gembira dari biasanya, seorang gadis cantik jelita sendirian bermain di taman bunga depan pura dekat Istana. Pesonanya bagai mutiara yang sempurna, tidak mampu disembunyikan dengan ditutup lilitan selendang sutra di tubuhnya.

Gadis desa pecinta bunga ini adalah Dewi Kendari, nama yang aku rangkai dari saripati sansekerta terkemuka, begitu bening matanya. Rambut hitamnya yang terurai, dagu dan hidungnya yang bangir seperti baru saja dirias langsung oleh para-para Dewi kecantikan. Pesonanya menjadi buah bibir para pemuda Desa, ketika mata beningnya itu memandang, maka hati (yang normal) pasti akan lunglai bertekuk lutut dan tak berdaya, *Really?*

Hembusan angin membuat setangkai bunga menari dan tak sengaja menggoda betisnya sehingga ia merasa geli. Tiba-tiba raut Dewi Kendari menggelepar galak, tiga butir keringat memercik di keningnya membuat tapuk matanya terbuka seperti menantang tatapan tajam laksana panah Ksatria.

Kokohnya ribuan pengawal prajurit bertombak sekalipun tak bisa menghalangi amarahnya. Namun, amarah tak pudarkan cantiknya, dengan gemas ia memetik tangkai mawar, sekejap menciumnya dan, hmm harum sekali..., ia berbisik lembut.

Selepas senja pergi, sedang baca serius karya klasik novel fiksi yang mengisahkan seorang perempuan legenda dari negeri tanah seberang itu magisnya menggetarkan. Batiba terdengar bunyi dering kring.. kring.. kring.. telepon yang amat berharga.

“Bang sibuk? Kita boleh ngopi sejenak, berkumpul santai, kongkow-kongkow sembari mengurai kekusutan dan membicarakan agenda nasional kita. Jenuh hati karena terpaksa mengunyah ingar-bingar politik jual-beli yang tak ada jedanya, kita tunggu di Good Folks Cikini ya bang,” cakapnya singkat.

“Ow o oke cocok, tapi angpao Ketum he he,” seadanya aku jawab, tak sempat berpantun kalimat mutiara, tut-tut-tut suara di ujung telepon terburu-buru putus. Rasanya ini perintah, tanpa basa-basi dan tak perlu juga bergumam dalam hati, segera kemas-kemas laptop, notebook, potlot bawa jangan ketinggalan, menenteng ransel *cuss, on the way* (OTW). Bila perlu terbirit-birit, “jurtul” (juru tulis) kesigapannya memang begitu bukan?!

Seperti biasa petualangan dimulai, drama perjuangan rentan waktu jauhnya perlintasan menuju coffee shop tempat tongkrongan. Semangat menempuh kehororan macet, bedanya



di tengah perjalanan kali ini hujan terlalu deras mengguyur.

Paling perlu berteduh dan mendobelkan mantel hujan meski pakaian pasti kusut, basah, dan beraroma bau dupa asap yang membius. Menyadari perpaduan topik secangkir kopi yang strategis, tak ada yang sia-sia, justru rugi bila mengeliminasi tak bisa hanya alasan kehujanan.

Perempuan Suluh Zaman

Fragmen di atas merupakan jendela agar membaca dengan fasih setiap kisah kehidupan. Meski dua penggalan cerita berbeda tapi membuka pikiran jernih bertemu, punya pilihan tegas sekaligus menuntun hati yang tenang melihat perempuan dan keistimewaannya.

Penggalan kompositum sastra yang bisa sedikit mereda esensi kesibukan, keruwetan dan kegelisahan dunia. Menyempurnakan perasaan agar mau belajar dari orang-orang arif yang memindahkan gunung dengan memulai membawa batu-batu kecil. Mengisi pikiran dengan nalar tanpa menggerutu yang hampir selalu bernuansa menyakitkan. Sebab apa gunanya menjadi seorang kritikus, atau memilih bersilat lidah yang justru berbahaya.

Faktanya memang demikian, “bahwa petualangan intelektual harus menerabas segala

sekat disipliner mitos, religi dan fiksi. Menohok rezim patriarki yang sekian lama mendominasi,” kata Dewi Lestari Simangunsong (Dee) pesohor yang diimbangi ketangkasannya atau keahlian menggarap tulisan tematik fiksi ilmiah. Yang bahkan tulisannya menjadi semacam magnet kalangan remaja untuk membaca bahkan menggeluti kesastraan.

Masih dalam balutan suasana roman hari kasih-sayang, spesial valentine day, terlebih yang paling pokok, fragmen di atas mendorong mata hati untuk terus belajar menumbuhkan rasa memuliakan dan menghargai perempuan. Menghargai dan memuliakan suatu kebajikan yang dilakukannya yang hebat bahkan terkadang mustahil terbayangkan oleh kelaziman. Misalnya perempuan melakukan kebaikan pada sesama, pada tanah air, menjamin kelembutan pada dunia (kekacauan) lalu dibawanya pada ketenteraman. Kebajikan pada ruang-ruang lingkup ketidakberdayaan maupun keterbelakangan segala aspek kehidupan yang luas.

Dibalik keanggunannya, perempuan mampu menggerakkan perubahan fundamental kesadaran feminisme (kesetaraan dan kesejajaran). Selain kodratnya yang tentu saja tidak ada kehidupan baru jika bukan perempuan yang mengandung dan melahirkan. Perempuan mampu menjadi pelindung bangsa, ikut menyulam sutera kejayaan bangsa nusantara, berperan besar terhadap pembangunan negara, menuntun keselarasan kehidupan, menyudahi berbagai ketimpangan sosial, dan mengadvokasi kebijakan pro perempuan maupun kaum marginal lainnya.

Seperti secercah kisah seorang guru honorer di Nusa Tenggara Timur, Aznet Bell, perempuan yang setiap pagi-pergi dari rumahnya ke sekolah berjalan kaki sendirian. Ia bertekad kuat mendedikasikan seluruh hidupnya bagi anak-anak agar mendapatkan pendidikan berkualitas. Dengan berpakaian sederhana seadanya menempuh 10 kilometer jalan yang penuh debu, demi ingin anak-anak muridnya membangun desa dan nantinya juga membangun negara.

Di sekolah sederhana mengajar murid-murid yang tidak membayarnya itu, tetapi ia merasa sangat bersalah jika meninggalkan mereka.

Keadaan inilah yang mengikat pengabdianya, mendorong ia untuk selalu hadir di sekolah menjelaskan setiap mata pelajaran meskipun hanya dengan papan tulis kapur yang disandarkan ke dinding kelas dari kayu. Selama 7 jam ia berdiri di kelas mengajar 9 mata pelajaran kepada puluhan muridnya. Buah pengabdian itu, tahun 2015 menerima penghargaan Kick Andy Heroes.

“Kepada perempuan-perempuan yang dengan kasih sayang membungkus semangat juang, perempuan-perempuan yang telah menjadi cahaya di tengah keluarga, inspirasi di tengah masyarakat, bawa kekuatan bagi kemajuan bangsa. Ingatlah bahwa kalian tidak sendirian, di setiap langkah ada banyak perempuan lain yang akan berjalan bersama saling mendukung dan memperkuat satu sama lain,” seru menteri PPPA, Arifah Fauzi dikutip dalam sebuah tautan.

Suara perempuan tidak melulu lagi sekadar komoditas politik semata seperti selama ini, kini kemajuan perempuan memperjuangkan keadilan pengarusutamaan gender telah dibuktikan dari Undang-undang nomor 7 Tahun 2017. Pengaturan strategis mensyaratkan keterwakilan perempuan di mana partai politik diharuskan mengajukan sekurangnya 30% calon legislatif. Aturan yang menunjukkan ruang politik di Indonesia ramah terhadap perempuan, membuat perempuan dapat berkontestasi secara adil dan setara melawan politisi laki-laki.

Meski masih menerima kenyataan pahit, realitas politik pemilu tahun 2024 representasi jumlah perempuan di parlemen belum ideal dikarenakan hanya satu partai politik memenuhi keterwakilan perempuan di seluruh daerah pemilihan. Suatu bukti masih jamak terjadinya diskriminasi, dan dominasi kultural yang mengistimewakan dinasti politik kekerabatan kaum laki-laki yang berambisi menyendoki hak perempuan sulit dibendung. Problem mendasar kebijakan alternatif UU belum dipraktekkan secara konsekuen dan substantif. Sehingga membuat betapa sulitnya calon anggota legislatif perempuan menembus Senayan.

Di tiap kontestasi perempuan menghadapi beragam informasi bias kepemimpinan. Diantaranya mereka pakai idiom-idiom

yang mengukuhkan oligarki “memilih Imam (pemimpin) kok wedok, jangan ya dek ya Imam (pemimpin) kudu lanang, dan/atau ada pula “wanita jangan dikasih beban apalagi jadi gubernur, berat”. “memilih imam (pemimpin) kok wedok, jangan ya dek ya pemimpin (imam) kudu lanang, dan/atau ada pula “wanita jangan dikasih beban apalagi jadi pemimpin, berat” dan seterusnya-seterusnya. Hal ini sebagai challenge, taruhan perbaikan demokrasi dan membongkar sistem “kerajaan”.

Perempuan menyadari apa arti kemerdekaan, kesetaraan, dan kebebasan yang bermartabat. Melepas diri dari terbelenggu-terbelenggu yang bermahkota raja. Kaum laki yang serakah, menggunakan idiom-idiom yang mengukuhkan ambisi menyendoki haknya, memborong bagian-bagian terkecil sekalipun, sehingga perempuan tidak dapat tumbuh kesamaan derajat, mendapatkan tempat yang sesuai, tapi terus terkurung dalam cangkang ketidakberdayaan.

Lagi pula perempuan-perempuan Indonesia masa lampau telah menunjukkan dan meletakkan dasar-dasar kepemimpinan. Rekam-jejak kepemimpinan dan kejuangan perempuan telah dikenal pada jejak sejarah, sejak era perjuangan kemerdekaan. Dalam catatan sejarah Nusantara





bahwa perempuan sepanjang perairan Aceh, Banten, Sunda, Jepara, dan Ternate Maluku, memiliki semangat kebersamaan perjuangan.

Kadang muram, tapi tidak pernah membuat perempuan kehilangan harapan melihat kenyataan dan menemukan tempatnya di dalam sejarah. Perempuan wujudkan kemerdekaan Indonesia, ukiran sejarah perjuangan tersebut dibuktikan oleh perempuan-perempuan pahlawan seperti yang kita kenal mulai dari Ratu Sima. Sampai dengan pahlawan perempuan terakhir Ratu Kalinyamat pemimpin perempuan yang sangat disegani. Ratu Kalinyamat yang berhasil menyatukan para sultan mulai dari Aceh hingga sultan Jepara untuk membuat pertahanan supaya Portugis tidak bisa masuk Indonesia.

Kita mempunyai tokoh perempuan Cut Nyak Dien, sosok yang luar biasa pahlawan Aceh yang memimpin perlawanan terhadap penjajah. Seorang Perwira Belanda van der pol pun bahkan menyebutnya sebagai “keajaiban Hindia Belanda”. Kepahlawanan Cut Nyak Dien nilai yang berakar dalam masyarakat yang telah menjelma menjadi kearifan lokal itu wajib dijaga.

Tidak memilih bersembunyi di dalam rumah, menutup pintunya rapat-rapat sehingga tak

seorang pun di luar bisa menemukannya. Akan tetapi perempuan-perempuan pahlawan tersebut membuktikan bahwa seorang perempuan bisa menjadi panglima perang yang begitu tangguh. Memimpin pasukan perang dan menunjukkan pada dunia bahwa perempuan tidak tunduk pada penjajahan.

Memperjuangkan hak-hak perempuan dilakukan seperti yang kita kenal tokoh perempuan di antaranya Raden Ajeng Kartini, ikon pendidikan yang memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan. Ada pula Siti Walidah, tokoh pergerakan perempuan dan pendiri organisasi perempuan pertama di Indonesia.

Lantaran seksisme dan misogoni yang mengakar dalam masyarakat, bukannya membuat perempuan berhenti berkembang. Perempuan Indonesia terus menunjukkan peran tak mengenal gender. Tidak hanya pintar solek merias diri agar terlihat menawan, atau tak sekadar pada skala kecil menjadi ujung tombak penentu pengelolaan keuangan keluarga. Melainkan turut memberdayakan orang lain di sekitarnya untuk tumbuh dan berkembang. Perempuan menjadi pemimpin di berbagai bidang, tangguh berdaya baik dalam bidang ekonomi bisnis, menduduki posisi puncak pengambilan keputusan pada organisasi sosial-politik.

Memimpin dengan inovasi mengembangkan ilmu pengetahuan. Perempuan dalam pendidikan dan teknologi menurut data UNESCO tahun 2020, sekitar 30% dari mahasiswa di bidang stem di Indonesia adalah perempuan. Partisipasi perempuan pada stem yang meningkat ini menunjukkan tren positif dalam mendukung kesetaraan gender di sektor tersebut.

Perempuan terus berkembang dan memiliki keahlian, menyeimbangkan tatanan pemerintahan, hingga mengelola sumber daya alam. Berkiprah pada politik pemerintahan kepemimpinan partisipatoris yang menginspirasi. Ada perempuan dalam diplomasi global, ada Susi Pudjiastuti, mantan menteri Kelautan dan Perikanan yang mengimplementasikan kebijakan laut berwawasan lingkungan sehingga berani membasmi illegal fishing.

Sederetan nama-nama perempuan Indonesia lain telah menunjukkan kepiawaian dan berprestasi yang mungkin kebetulan saja luput dicatatkan dalam buku sejarah. Misalnya ada atlet badminton Susi Susanti yang berhasil naik podium tertinggi dan menyumbangkan medali emas Olimpiade Barcelona tahun 1992. Kerja kerasnya pada waktu itu mengharumkan nama tanah air Indonesia di kancah dunia internasional.

Awal dekade 2000-an merupakan keriuhan munculnya perempuan pengarang begitu banyak nama yang lahir. Hadir karya mereka selalu menawarkan perspektif dan pengungkapan inovasi yang berhasil menggairahkan dunia kesastraan di Indonesia. Dibalik fenomena sastrawan yang agak bias patriarki, kesastraan Indonesia jadi jauh lebih kaya dan variatif.

Dee di atas, adalah salah satu perempuan pengarang yang layak disebut. Melalui novel *Supernova*, *Putri dan Bintang Jatuh*, menyongsong kemapanan sastra adiluhung, ia semacam ikon baru tentang sastra yang ngepop. Kemunculannya menjadi fenomena dalam kesastraan Indonesia. Menerbitkan antologi pertamanya *Filosofi Kopi* yang merupakan kumpulan karyanya. *Filosofi*

Kopi berhasil menjadi karya sastra terbaik 2006 dan menjadi 5 besar khatulistiwa literary award. *Perahu Kertas*, satu fiksi populernya dengan segmen mengarah ke remaja dewasa, barangkali adalah salah satu karya yang paling laris.

Dee sejarah yang anomali, auratiknya sebagai pesohor diimbangi ketangkasannya dalam menulis dan menggarap tematik fiksi ilmiah berlatar sosiologi yang menjadi semacam magnet antusiasme kalangan remaja untuk membaca bahkan menggeluti sastra. Petualangan intelektual menerabas segala sekat disipliner mitos religi dan fiksi, menohok rezim patriarki kesastraan yang sekian lama mendominasi.

Wajar saja dalam artikel, “Bayang-bayang Perempuan Pengarang” (*Kompas*, 7/03/2014). Sapardi Djoko Damono agak bernada provokatif berujar bahwa masa depan novel Indonesia berada di tangan perempuan.

Christine Hakim yang telah mengharumkan Indonesia dengan seni peran. Ia menghidupkan atau merekonstruksi kembali sejarah Cut Nyak Dien pada imaji generasi Biru hari ini. Penghayatan perannya yang luar biasa seakan begitu nyata menampilkan sosok tinggi sang pahlawan sebagai patrio yang pantang menyerah.

Pada tahun 1978 hingga 1997 meraih 6 piala Citra pemeran wanita terbaik sebagai supremasi tertinggi perfilman Indonesia dan hingga kini. Belum ada aktris Indonesia menyamainya. Tahun 1999 majalah *Time* menobatkannya sebagai Asian Heroine. 2010 menjadi orang Indonesia pertama yang bermain film di Hollywood berperan sebagai Wayan yaitu sahabat pemeran utama Elizabeth Gilbert yang dibintangi aktris Julia Robert. Dan sedertan penghargaan lain diperolehnya.

Seorang perempuan terkemuka, manusia listrik Tri Mumpuni, pada tahun 2012 memperoleh penghargaan ashoka innovator for the public dari Kerajaan Inggris. Tri Mumpuni membangun listrik kebudayaan sosial, membangun solidaritas sosial. Dan mengembangkan teknologi solusi energi terbarukan dengan menggerakkan masyarakat di desa terpencil untuk mandiri energi.

Pada tahun 2015 Tri Mumpuni membuat Desa Cinta mekar yang memiliki pendapatan asli desa yang tinggi dari hasil penjualan Kwh ke PLN.



Semula Desa Cinta Mekar hanyalah Kampung tertinggal yang tak banyak diketahui orang luar warga hidup tanpa penerangan listrik dan bermata pencaharian sebagai petani sawah. Namun kehadiran pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) telah mengubah itu semua.

“Jangan underestimates, pengaruh kalian punya power to influence. So if you say the right thing you do the right right thing, you act the right thing I, then write the right thing. Sampaikan suatu saat anda akan jadi leader, anda akan menjadi panutan dari orang lain,” kata Sri Mulyani Indrawati pada girl leadership class.

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan republik Indonesia terlama, menahkodai perekonomian nasional telah dijalankannya selama lebih hingga dua dasawarsa. Ia mengabdikan dirinya untuk melayani kepentingan publik nasional dan global.

Perempuan yang tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan Managing Director dan Chief Operating Officer Bank Dunia (lembaga keuangan dunia). Sebelumnya menjabat Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional IMF. Berkat keberhasilannya mengelola perekonomian negara dan melewati berbagai krisis, berkali-kali ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik



dan salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia.

Perempuan yang menerangi zaman, Ruri Nostalgia penari muda Jawa klasik abad ini yang membiarkan tubuhnya menjadi rumah bagi kebudayaan dan membuktikan bahwa menari membawa raga bergerak seirama sukma. Baginya tubuh yang menarik sebatas raga hanya akan berhenti pada eksplorasi estetika, tapi tidak jadi rumah kebudayaan tempat manusia meneguhkan keberadaan. Ia membuktikan bahwa yang mustahil adalah menjadi otentik seperti dalam karyanya Kemolo Bumi (2009).

Ruri menunjukkan bahwa tari dengan berbagai ceritanya mampu menjadi semacam sumber moral. Relevan untuk hari ini mengurus masalah Indonesia secara langsung maupun tidak. Tahun 2013 ia meraih penghargaan Indi Women Cultural Artist dalam acara penghargaan Kartini, dan Indonesia Digital Women the World 2013.

Disebut rentan, dan rapuh adalah stereotip ini bukan hanya tidak akurat, tetapi juga buruk. Betapa hebatnya wanita melawan dan mengubah stigma negatif yang melekat itu, membuktikan suatu bukti primer.

Tokoh pergerakan perempuan Rosnida Sari yang mengajarkan dialog dan toleransi, mengajak mahasiswa-mahasiswanya memiliki pemahaman yang benar dan menunjukkan bahwa Islam itu tak seperti yang digambarkan media penuh prasangka, berpikiran tertutup dan intoleransi. Di tengah kecaman bahkan ancaman, ia memilih apa yang diyakininya Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan menebar kebaikan pada alam semesta. Tahun 2015 essay-nya yang mengulas pengalaman kuliah di gereja diterbitkan Australia Plus.

Respon yang muncul di luar dugaan, timbulkan polemik hingga dia dikecam oleh banyak pihak dimana dituduh melakukan pemurtadan. Setelah itu, bisa saja orang diluar sana akan menghantui dirinya. Tetapi dia mencoba menghalau ketakutannya, secepat mungkin dengan mendekati kedua tangannya, lalu ia bersimpuh suaranya lirih, “Tuhan lindungilah hamba”.

Perempuan investigatif, presenter Najwa

Shihab yang memandu talk show fenomenal, cerdas, kritis juga menghibur. Mata Najwa menjadi talk show yang paling ditunggu-tunggu pemirsa TV di Indonesia. Daya magnetnya mengundang antusiasme publik yang tidak pernah susut, ribuan rela antri berpanas-panas datang serbu demi menyaksikan, banyak berita yang menggambarkan Histeria kalangan kampus hal ini terjadi di berbagai daerah.

Hebatnya lagi, Mata Najwa on Stage, seakan tepat mewakili segmentasi generasi muda. Sebab gairah kalangan muda terpelajar Indonesia untuk memahami permasalahan krusial dengan cara yang berbeda efek dari programnya telah memunculkan satu brand baru tentang orang muda yang terpelajar kritis dan peduli.

Mutiara dalam Lakon

Perempuan-perempuan yang luar biasa hebatnya di atas harus dijadikan role model, tidak terputus zaman, menyambungkan kepeloporannya mulai era pergerakan kemerdekaan, sekarang, hingga sampai kapan zaman. Boleh saja perubahan ditandai dengan tumbang-naiknya rezim, perjuangan pergerakan wanita, tak hendak berhenti menjadi ikon sekaligus perlambangkan kepentingan publik, dan membangun moralitas kehidupan berbangsa.

Dan, surprising! Putri Khairunnisa, tokoh perempuan muda suluh (obor-lentera) penerang bagi perempuan masa kini. Ketinggian kasta, mengejutkan dunia mencapai tahta ketua umum organisasi induk pemuda Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Penghargaan, apresiasi, dan respect Putri Khairunnisa perempuan pertama dalam sejarah, sesuatu yang langka menahkodai organisasi induk pemuda. Ia berjodoh dengan zamannya dan berhasil menorehkan rekor era kebaruan. Sebab alasan satu diantara sejak KNPI lahir dideklarasikan hingga kini menapaki perjalanan sejarah panjang usianya yang sudah lebih lima setengah dekade ini, perempuan tidak sekali pun mendapat tempat. Seluruh khalayak tahu dalam jagat percaturan politik, alih generasi pergiliran ketua umum KNPI, ketegangan dinamikanya ruar biasa.

Sepertinya sudah menjadi credo, rentetan pengalaman pahit KNPI selama ini diakibatkan praktik 'demokrasi setengah hati' forum seremoni Kongres. Sebetulnya tidak menarik karena lebih pada komunike elite saja, mengesankan sebagai skenario kepentingan pragmatisme eksistensi pribadi orang perorang.

Seakan berkah bagi semesta pilar pemuda KNPI yang sedang terkungkung raksasa kegelapan. Terjerembab dalam cangkang krisis jati diri, alami erosi perpecahan, dualisme, trialisme, dan entah bisa saja berantakannya akan kian parah menjadi puing-puing.

Krusial di bold, baru saja datang kehidupan baru KNPI beranjak menuju transisi permanen, Karena asal diketahui saja, ketuanya harusnya sekaligus membebaskan KNPI dari budaya penyimpangan Hukum yang menahun oleh kalangan usia tua yang masih tetap kuasai, atau melanggeng di KNPI selama ini.

Ketentuan usai pemuda dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pada pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Bukan dikotomis, hanya Putri Khairunnisa satu-satunya yang memenuhi syarat usia sesuai yang di kategorisasi dalam undang-undang pemuda pada waktu itu. "Seluruh komponen mesti bersedia jujur diri masing-masing, jernih, berani ungkap ini dan sepenuhnya patuh kepada aturan," tegasnya Jumat, (22/7/2022) silam.

Putri Khairunnisa patut disejajarkan diri dengan sekaliber mereka-mereka pahlawan garnita lainnya. Sah saja bila Indonesia dijuluki negerinya para raja. Namun ia telah meletakkan patok-penanda atau mengawali reorientasi bahwa KNPI bukan milik segelintir (golongan) kaum pria, melainkan kepunyaan publik pemuda Indonesia. Dan membuktikan sekaligus mematahkan tantangan kaum perempuan selama ini yang dikesankan mitos tak mudah menahkodai sebuah organisasi besar, sebesar KNPI.

Yang mengagumkan lagi, keseriusannya menyajikan kaleidoskop kejayaannya KNPI.

Pengalaman sejarah pelajaran berharga yang membuatnya terus merawat semangat merapiakan kembali pilar KNPI. Mengelola serta merajut kembali fungsinya sebagai lokomotif membangun peradaban bangsa. Disamping menyoroti kompleksitas persoalan socio-politik bangsa, secara kolaboratif, kreatif, dan inovatif prestasinya dibuktikan tuntas membawa KNPI mentereng mengudara, dan tetap bertahan eksis merumput di tengah badai.

“Sedari awal komitmen saya mengkonsolidasi pemuda bersatu, rukun, kompak dan akur. Semut-semut saja kerjasama memindahkan butiran gula yang berat bobotnya melampaui besar badannya. Tapi ditengah ujian besar, jangan sampai kita kehilangan harapan, karena ingat berapa kalipun buku putih dirilis untuk mencuci sejarah buruk akan sia-sia,” ketusnya penuh filosofis mulai menguji etos pemuda.

Disini wanita kebaya yang baru saja menyelesaikan studi S2 Ketahanan Stratejik Universitas Indonesia ini mendekati subjek Dewi Gendari yang memesonanya, brilian, cemerlang dan cerdas. Menjadi mutiara yang menarik dikisahkan seperti dalam kearifan cerita kebudayaan lakon “Pandawa Boyong”. Memangnya Putri Khairunnisa pernah memerankan figur Dewi Gendari? Dewi yang merekatkan antara kekuatan, (kolaborasi) trinity Tentara, Polisi dan Rakyat.

Kesadaran melakukan emansipasi bahwa dirinya membutuhkan kerjasama kekompakan. Semua pihak dia tuntut punya komitmen, sinergitas antar komponen unsur trinity pokok KNPI. Yakni ketua-ketua KNPI pecahan, pemerintah, dan kelompok cipayung plus. Terbesit memutus lingkaran setan konfliktual organisasi. Merumuskan proposal penyatuan dirumuskan dengan kerja kejernihan berpikir, benar-benar yang bersumber dari keinginan transformasi. harapan untuk mengakhiri masalah atau menyetop kelanjutan perpecahan yang menentang ini.

Simbol Pemersatu

Gonjang-ganjing isu Kongres ‘penyatuan’ kembali muncul, tenggelam lagi adalah hal yang

tidak mengejutkan. Pasalnya setiap Kongres selesai diselenggarakan, pihak-pihak yang tidak lapang dada menelan kekalahan, kemudian berulah tergoda membuat KNPI pecahan baru. Selepas itu, diwacanakan lagi Kongres penyatuan, seolah (berputar mengelilingi kolam kecil). Sialnya lagi kendati telah di design susah payah berbagai cara-cara, format atau bentuk yang disertai segala usaha, tampaknya penyatuan kementokan.

Tetapi catat, kemerosotan, memudahkan kecemerlangan KNPI. Dan beresiko bakal adanya generasi kesialan hilang dalam pusaran sejarah. Dari situ mula-mula waktu dimulainya penghukuman sejarah kepada siapa saja yang dianggap pangkal bagian dari kondisi ini.

Alih-alih ijtihad panggilan ‘pengorbanan’ menyatukan KNPI, Kongres demi Kongres justru semakin mematenkan tradisi konfliktual pecah-belah. Sialnya lagi, semua bersikukuh dengan ego masing-masing, saling klaim siapa yang paling legal.

Padahal kabar terhembus (silahkan check kevalidannya) bahwa sekitar pada bulan maret tahun 2021 lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memutuskan mengunci (locked) atau tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru yang memberikan persetujuan atas perubahan badan hukum anggaran dasar dan kepengurusan perkumpulan dewan pengurus pusat KNPI setiap pasca Kongres terselenggara. Artinya bagi semua KNPI pecahan siapapun, tidak ada satupun memegang SK Kumham sebagai legalitas suatu kepengurusan.

Wajar saja, fase sekarang bagi Putri Khairunnisa mengandung faktor determinan pesan moral pemuda introspeksi diri. Permenungan dan sadar atas celaan-ejekan sebagai “generasi egois, mudah marah, pendendam, amnesia sejarah, namun bisanya hanya baper-baperan”. Refleksi yang kemudian salut dan merasa malu terhadap keberhasilan David Napitupulu, Akbar Tandjung, Aulia Rahman, Abdullah Puteh mantan-mantan ketua KNPI terdahulu lainnya.

Dan seumpama semua mengambil posisi untuk menjadi bagian dari perbaikan ini, pastinya mencapai kemajuan dan perubahan positif bagi



organisasi KNPI. Meneladani yang telah berjasa, para tokoh pendiri KNPI, seperti Ali Moertopo, Midian Sirait, Abdul Gafur dan seterusnya yang menyusun pondasi dan menyatukan.

Buka ingin memuji, sanjung, atau mengukur besar-kecilnya sebuah warisan prestasi abadi dan siapa melakukan apa. Namun perenungan mendalam terhadap yang diikhtikarkan para tokoh-tokoh ini agar juga semua memiliki kedalaman spiritual, kemuliaan, dan meninggikan derajat semangat persatuan menghindarkan diri dari perpecahan.

Memang tak sembarangan bisa, sebab ada watak hanya maunya memilih menang saja. Dalam konteks pemuda terkonsolidasi, gerakan reorganisasi KNPI apakah sukar terealisasi? Menuntaskan persoalan besar ini terlalu ambisius? Pemuda harus memutuskannya, tidak ada pilihan lain. Yang pasti mengabaikan kondisi keterbelahan sama halnya menjadi generasi penyaksi sejarah buruk, dan melihat etos kehidupan dunia kepemudaan semakin tergerus.

Sebab dalam bahasa yang lugas, generasi muda sebagai inti perjalanan bangsa di masa datang, merupakan “men of future”, lokomotif utama penggerak perubahan, duta-duta pembaharu yang syarat dengan “idea of progress” sadar apa yang menjadi cita-cita bangsa.

Singkat kata, penguatan posisi, peran dan

fungsi strategis pemuda, menjadi titik pijak merumuskan, dan mengembalikan situasi kenormalan KNPI. Perpecahan, atau keterbelahan harus dihindari kapanpun dan dimanapun, karena perpecahan sangat identik dengan jurang kehancuran, dekat dengan kelemahan dan dalam suasana saling bermusuhan tentu saja membuat pemuda kecil kemungkinan bisa melakukan hal-hal yang bermakna. Sulit menghasilkan karya-karya besar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Setelah tokoh-tokoh di atas mangkat bukan berarti sulit mendapatkan figur penggantinya. Melimpah stok pemuda yang teruji pengalaman sebagai seorang organisator, usia muda yang telah matang terbentuk, mengekspresikan sebagai simbol pemersatu, serta pantas menjadi juru penengah alternatif menjembatani bersatunya KNPI, itu saja menjadi dasar.

Satu diantara figur yang lain adalah Putri Khairunnisa, namun apakah ia mau tetap bertahan sumbang sumber dayanya di etape krusial ini? Terlebih dahulu melamarnya, sebab tanpa terlebih dahulu menentukan komponen simbol sentral pemersatu, maka kita akan sulit menghindari apriori terperangkap pola lama.

Syarat tambahan paling mendasar yang memandu ide persatuan adalah penyatuan mesti dipahami sebagai visi komprehensif, merupakan rumusan gagasan yang kompleks, konseptif produk pikiran yang berorientasi besar. Menggunakan ruang dialektika, rasionalitas, dan meneguhkan multipolar gerakan progresif lain dilewati sebelum berkongres.

Proses rekonsiliasi nasional tidak boleh dilakukan secara serampangan amatiran sebab ini mencangkup kepentingan luas dalam menjalani kehidupan organisasi. Menyentuh urusan kepemudaan yang ingin melihat keadaan yang lebih baik, mencicipi enaknya masa kejayaan Indonesia emas mendatang. Dan percayalah pula penyatuan kembali KNPI bukan ancaman bagi eksistensi siapapun.

Mujamin Jassin

Ketua Bidang Kominfo DPP KNPI



PERTUKARAN SANDERA HAMAS DAN ISRAEL TAK KUNJUNG SELESAI

Pertukaran sandera antara Hamas dan Israel telah menjadi salah satu isu paling kompleks dalam konflik Timur Tengah. Proses ini mencerminkan dinamika politik, militer, dan kemanusiaan yang rumit, dengan dampak besar terhadap kedua belah pihak.

Konflik antara Hamas dan Israel

telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan akar permasalahan yang mencakup sengketa wilayah, hak asasi manusia, dan kontrol politik. Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas sejak 2007, sering menjadi pusat ketegangan. Israel menuduh Hamas sebagai organisasi teroris, sementara Hamas menganggap Israel sebagai penjajah yang melanggar hak-hak

rakyat Palestina.

Pada Januari 2025, kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata yang mencakup pertukaran sandera dan tahanan. Kesepakatan ini difasilitasi oleh mediator internasional, termasuk Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat. Dalam tahap pertama, Hamas membebaskan 33 sandera Israel, termasuk beberapa jenazah, sebagai

imbalan atas pembebasan sekitar 1.800 tahanan Palestina dari penjara Israel.

Proses pertukaran ini berlangsung dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, Hamas membebaskan tiga wanita Israel pada 19 Januari 2025, sementara Israel membebaskan 90 tahanan Palestina. Tahap kedua terjadi pada 25 Januari, dengan pembebasan empat tentara wanita Israel oleh Hamas dan 200 tahanan Palestina oleh Israel². Tahap ketiga dan keempat melibatkan pembebasan lebih banyak sandera dan tahanan, termasuk anak-anak di bawah umur.

Namun, proses ini tidak berjalan mulus. Israel menunda pembebasan 620 tahanan Palestina, yang memicu kritik keras dari Hamas. “Penundaan ini adalah pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata,” ujar seorang pejabat Hamas.

Ketegangan meningkat pada Maret 2025 ketika perundingan untuk memperpanjang gencatan senjata gagal mencapai kesepakatan. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Gaza, menargetkan apa yang disebutnya sebagai “target teroris” milik Hamas. Serangan ini menewaskan ratusan warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, “Kami tidak akan berhenti berperang sampai semua sandera kembali ke rumah dan semua tujuan perang kami tercapai.” Di sisi lain, Hamas mengecam serangan ini sebagai “hukuman mati” bagi para sandera yang masih ditahan.

Pertukaran sandera ini juga mencerminkan dinamika politik yang kompleks. Hamas menggunakan proses ini untuk meningkatkan legitimasi di mata rakyat Palestina, sementara Israel menghadapi kritik



internasional atas tindakannya yang dianggap tidak konsisten. “Israel terus melanggar kesepakatan yang telah disepakati,” kata seorang pejabat Hamas.

Sementara itu, Amerika Serikat memainkan peran penting sebagai mediator. Utusan AS Steve Witkoff mengusulkan proposal pertukaran yang mencakup pembebasan lima sandera Israel, termasuk seorang tentara bernama Edan Alexander, dengan imbalan pelepasan sebagian besar tahanan Palestina.

Dari sudut pandang Israel, pertukaran sandera ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk melemahkan Hamas. Israel berusaha menggunakan proses ini untuk menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan warganya, sekaligus menekan Hamas secara diplomatik dan militer.

Namun, langkah ini juga menghadapi kritik internal. Beberapa anggota Knesset menuduh pemerintah Netanyahu gagal mencapai tujuan perang dan mengorbankan keamanan nasional. “Dalam sebulan terakhir,

pemerintah Israel tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai panglima tertinggi militer Israel,” kata seorang anggota Knesset.

Konflik ini memiliki dampak besar terhadap warga sipil di kedua belah pihak. Di Gaza, serangan udara Israel menyebabkan ratusan korban jiwa dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. “Tubuh orang-orang berserakan di tanah, dan tidak ada cukup dokter untuk menangani korban,” ujar seorang saksi mata.

Di sisi lain, keluarga sandera Israel menghadapi ketidakpastian yang menyakitkan. “Kami hanya ingin mereka kembali dengan selamat,” kata seorang kerabat sandera.

Pertukaran sandera antara Hamas dan Israel mencerminkan kompleksitas konflik yang mendalam. Meskipun proses ini memberikan harapan bagi beberapa pihak, ketegangan yang terus meningkat menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih sangat panjang. Jika kedua belah pihak tidak menemukan jalan tengah, konflik ini berisiko terus berlanjut tanpa akhir yang jelas.



ISRAEL DAN PALESTINA SEPAKAT GENCATAN SENJATA

Konflik antara Israel dan Palestina sejak Oktober 2023 berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata pada Rabu (15/1) di Qatar.

Berikut poin-poin isi perjanjian gencatan senjata kedua pihak.

Isi perjanjian gencatan senjata

1 | Hamas memberikan syarat yang harus dipenuhi Israel, antara lain:

- ✓ Membebaskan tahanan Palestina.
- ✓ Menarik pasukan dari wilayah pemukiman padat penduduk di Gaza.
- ✓ Warga sipil diizinkan kembali ke rumah.
- ✓ Membuka jalur bantuan.
- ✓ Warga Palestina boleh meninggalkan Gaza untuk mendapatkan perawatan medis.
- ✓ Penyebrangan Rafah-Mesir dibuka.

2 | Jika seluruh persyaratan dipenuhi, Hamas akan melepaskan seluruh tawanan yang masih hidup.

3 | Penyusunan rencana rekonstruksi Gaza untuk 3-5 tahun ke depan segera dilakukan apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Gencatan senjata berlaku mulai 19 Januari 2025

Kronologi konflik Israel-Palestina

7 Oktober 2023

Hamas menyerang area selatan Israel.

13 Oktober 2023

Israel menyerang balik penduduk Gaza.

21 November 2024

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan perintah penangkapan atas Perdana Menteri Israel.

2 Desember 2024




Presiden AS terpilih Donald Trump berjanji akan mengambil tindakan jika tawanan di Gaza tidak segera dibebaskan.

15 Januari 2025

Negosiator dari pihak Israel dan pihak Palestina menyepakati gencatan senjata.

Dampak konflik bagi Palestina

Data United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), per 16 Januari 2025

Korban meninggal	Korban luka/ceder	Hilang	Pengungsi
 46.645 orang	 110.012 orang	 >10.000	 1,9 juta orang



GEN BETA, GENERASI TERBARU RAS MANUSIA

Generasi adalah sekelompok orang yang lahir dalam periode waktu yang sama dan memiliki pengalaman historis, sosial, dan budaya yang serupa. Pengalaman-pengalaman tersebut dapat memengaruhi sikap, nilai, dan perilaku generasi tersebut.

Hal inilah yang membuat setiap generasi memiliki tipikal dan karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya Gen Z yang dikenal terbuka akan masalah kesehatan mental, Gen Alpha yang akrab sekali dengan teknologi, serta Gen Milenial yang merasakan transisi zaman konvensional ke zaman modern.

Namun, tinggal menghitung hari lagi Gen Alpha yang lahir pada tahun 2013-2024 akan berakhir dan diprediksi akan muncul generasi berikutnya yaitu Gen Beta. Seperti apa karakteristik Gen yang terbaru ini? Simak informasinya di bawah ini.

Melansir *Rubic News* istilah Generasi Beta ini sendiri dicetuskan oleh Mark McCrindle, analis sosial dan demografer pendiri McCrindle Research. Crindle adalah orang yang sebelumnya juga memberi nama untuk Generasi Alpha, yang merujuk pada anak-anak yang lahir dari tahun 2010 hingga sekitar tahun 2024.

McCrindle memilih istilah Generasi Beta untuk melanjutkan tradisi ilmiah penggunaan alfabet Yunani dalam menamai generasi setelah alfabet Latin tidak digunakan lagi. Sebelumnya telah digunakan nama Generasi Alpha, sehingga generasi berikutnya diberi nama Beta. Jika Generasi Alpha dikenal sebagai anak-anak digital yang tumbuh bersama perangkat pintar dan media sosial, Generasi Beta justru diperkirakan akan lebih maju.

Menurut prediksi PBB, masa pertumbuhan generasi Beta akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi terutama kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi.

Bahkan, Generasi Beta juga mungkin akan berinteraksi dengan simulasi diri mereka

sendiri yang dibuat oleh AI di media sosial atau menggunakan respons otomatis dalam interaksi online.

Tumbuh di era kemajuan teknologi, hal ini diprediksi akan membentuk karakteristik unik dari Generasi Beta dalam berbagai hal. Berikut beberapa karakteristiknya:

1. Batas Kerja dan Kehidupan Kabur: Otomatisasi AI mendorong pekerjaan fleksibel berbasis proyek, hal ini menciptakan budaya kerja yang selalu aktif yang berisiko mengganggu keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi.
2. Kreativitas AI: Generasi Beta akan terbiasa menggunakan alat bantu AI untuk mendesain, bercerita, dan memecahkan masalah dengan pendekatan kreatif.
3. Belajar Digital: Diperkirakan 80 persen Generasi Beta akan belajar online dengan AI yang akan mempersonalisasi pendidikan. Namun, kekhawatiran tentang gangguan dan keamanan online perlu dipertimbangkan dengan cermat.
4. Cakap Gawai, Tapi Rentan Stres: Penggunaan teknologi tinggi memang dapat meningkatkan pengetahuan. Namun hal ini juga menimbulkan kekhawatiran pada mereka, karena berisiko terhadap stres dari dampak media sosial.
5. Peduli pada isu sosial.

Menyaksikan dampak teknologi terhadap masyarakat dapat membuat Generasi Beta menuntut perilaku perusahaan yang bertanggung jawab.

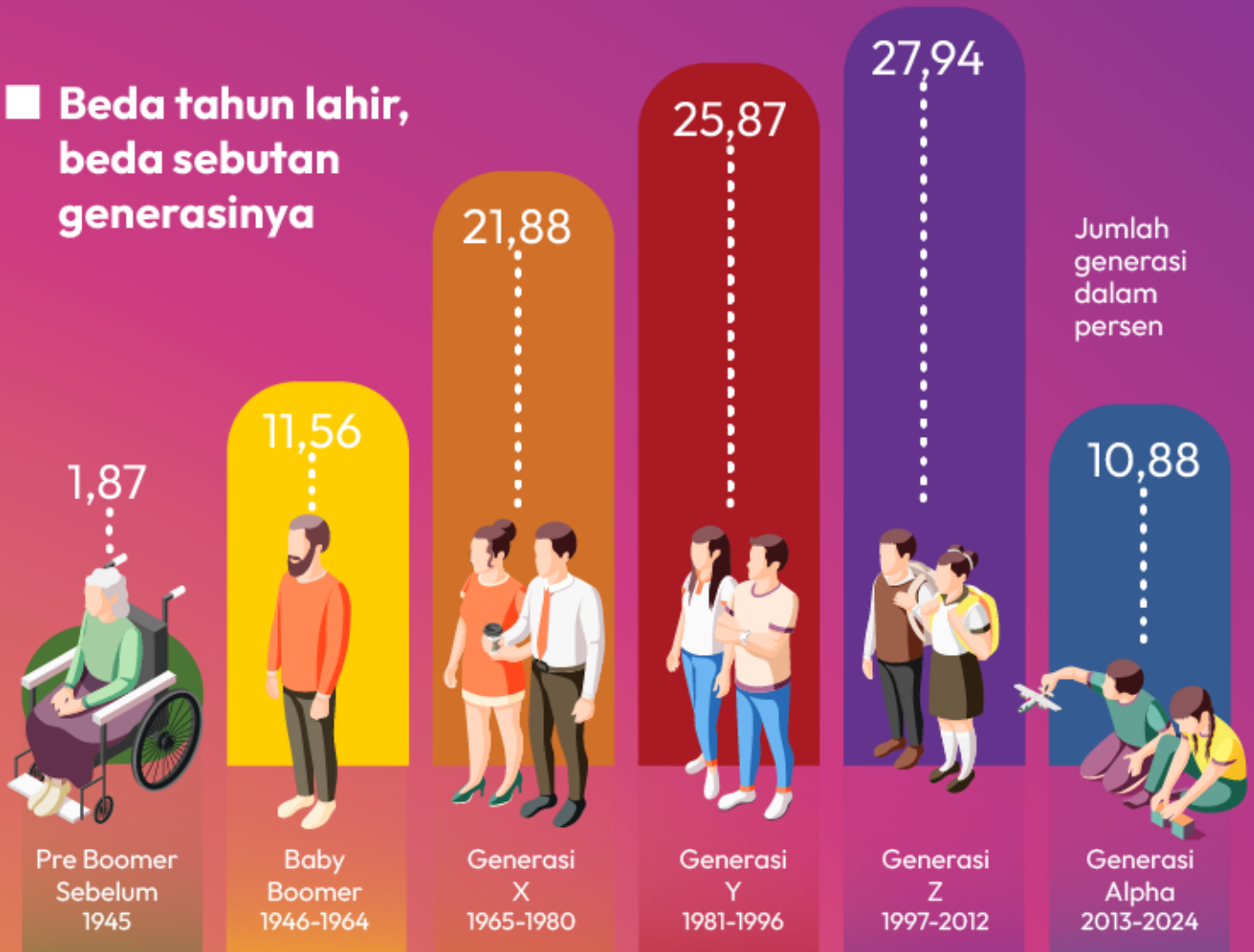
Mereka akan memilih perusahaan berbedikasi pada keberlanjutan, data etis, dan dampak sosial positif.

Dengan adanya Generasi Beta ini, diharapkan menjadi lebih adaptif dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan kesenjangan teknologi.

2025 Selamat Datang Gen Beta!

Tahun 2025 menandai dimulainya sebuah era baru, Generasi Beta. Artinya, semua anak yang lahir mulai tahun 2025-2039 akan menjadi generasi beta.

■ **Beda tahun lahir, beda sebutan generasinya**



Data: berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020

Sebutan generasi dibuat untuk memudahkan dalam memahami dan mengkategorikan kelompok-kelompok orang berdasarkan tahun kelahiran mereka

Lembaga riset asal Australia, McCrindle, memprediksi Gen Beta akan membentuk 16% populasi dunia pada 2035



BUMI UNTUK INDONESIA



Say hello to **wondr** by BNI

Jadiin maumu
dengan banking app
baru dari BNI.

